

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palangka Raya, Maret 2018
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah

.....

NIP.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'la atas semua limpahan Rahmat dan karunia-NYA, Sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dapat terselesaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya harus dipedomani oleh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk periode berikutnya. Diharapkan kebijakan strategis dalam jangka menengah benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

**Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dijabarkan ke dalam Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup dalam skema Reformasi Birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi. Adapun Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Tahun 2017. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja memaparkan capaian kinerja pemerintah dan realisasi anggaran serta evaluasi capaian terhadap indikator kinerja utama Pemerintah pada Tahun 2017. Dan diakhiri dengan Penutup, dimana menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang dalam meningkatkan kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 ini, dapat menjadi sarana masukan dan evaluasi atas pencapaian kinerja agar diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima Kasih.

Palangka Raya, Maret 2018

GUBERNUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun Anggaran 2017*

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	4
A. Sejarah Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah	4
B. Kondisi Geografis	10
C. Wilayah Administrasi Pemerintahan	11
D. Kondisi Demografis	12
1.4. Kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	14
1.5. Kedudukan dan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017	16
1.6. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Tengah	22
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis Pemrov Kalimantan Tengah	25

2.2. Pernyataan Visi dan Misi	28
2.3. Tujuan dan Sasaran	35
2.4. Strategi, Fokus/Tema Pembangunan, Arah Kebijakan	40
Daerah, Program, Perjanjian Kinerja dan Rencana Tahun 2016-2021	
A. Strategi	40
B. Fokus/Tema Pembangunan	42
C. Arah Kebijakan Daerah	42
D. Program	49
E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	50
G. Rencana Anggaran Tahun 2016 – 2021	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	55
3.1. Penjelasan Umum	56
3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja	59
3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2017	62
A. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran.....	62
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	64
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	69
Sasaran I Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten	69
Sasaran II Meningkatnya Konektivitas Antar Daerah	72
Sasaran III Meningkatnya Ketercukupan Energi ..	76
Sasaran IV Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	82
Sasaran V Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	98

Sasaran VI Meningkatnya Daya Beli Masyarakat .	104
Sasaran VII Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Ekonomi Hijau	108
Sasaran VIII Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat	111
Sasaran IX Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	119
Sasaran X Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	121
Sasaran XI Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	124
Sasaran XII Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	130
Sasaran XIII Meningkatnya Kualitas Pendidikan..	133
Sasaran XIV Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	139
Sasaran XV Terpasarkannya Destinasi Wisata.....	145
Sasaran XVI Menurunnya Degradasi Lingkungan.....	150
Sasaran XVII Meningkatnya Pendapatan Daerah	162
D. Realisasi Anggaran	166
BAB IV PENUTUP	172
Kesimpulan.....	172
Saran.....	174

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Tjilik Riwut
- Gambar 1.2 Monumen Kota Palangka Raya
- Gambar 1.3 Provinsi Kalimantan Tengah
- Gambar 1.4. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Gambar 1.5. Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (%)
- Gambar 1.6. Hadi Prabowo (kanan) saat dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Gambar 1.7. H. Sugianto Sabran (kiri) saat dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Gambar 1.8. Struktur Organisasi Pemrov Kalteng
- Gambar 1.9. Outline Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Gambar 2.1. Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran menyerahkan berkas nota keuangan APBD 2017 kepada Wakil Ketua DPRD Kalteng, Baharuddin Lisa usai membacakan pidato pengantar nota keuangan Selasa 27/12/2016.
- Gambar 2.2. Hubungan Antar-Elemen Visi
- Gambar 2.3. Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, RKPD Tahun 2016-2017
- Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Gambar 3.1. Penyerahan DIPA TA 2017
- Gambar 3.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- Gambar 3.3. Realisasi Sasaran Pembangunan
- Gambar 3.4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Tahun 2017
- Gambar 3.5. Rapat Koordinasi Daerah terkait RTRWP
- Gambar 3.6. Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Gambar 3.7. Rencana Pola Ruang Kalimantan Tengah
- Gambar 3.8. Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran saat kunker barsel
- Gambar 3.9. Peta Lintas Kalimantan
- Gambar 3.10. Perbandingan Rasio Elektrifikasi pertahun
- Gambar 3.11. Perbandingan Desa berlistrik Pertahun
- Gambar 3.12. Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan Prov. Kalteng
- Gambar 3.13. Perkembangan Ketersediaan Beras
- Gambar 3.14. Perbandingan Produktivitas Tanaman Hortikultura Prov. Kalteng
- Gambar 3.15. Panen Perdana Bawang Merah bersama Gubernur Kalimantan Tengah
- Gambar 3.16. Nilai Tukar Petani dari Sub Sektor Tahun 2017
- Gambar 3.17. Perbandingan Angka Konsumsi Ikan di Kalimantan Tengah
- Gambar 3.18. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
- Gambar 3.19. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
- Gambar 3.20. Perbandingan Jumlah Produksi Benih Ikan
- Gambar 3.21. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan
- Gambar 3.22. Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha di Kalimantan Tengah 2017
- Gambar 3.23. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah 2012 - 2017
- Gambar 3.24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun
- Gambar 3.25. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Kategori (c to c)
- Gambar 3.26. Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PNPB
- Gambar 3.27. Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PNPB
- Gambar 3.28. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Kategori (y to y)
- Gambar 3.29. Gubernur H. Sugianto Sabran saat menghadiri stand dagang UMKM
- Gambar 3.30 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah 2013-2017 (Persen)

- Gambar 3.31. Gubernur Kalimantan Tengah saat Pelepasan jemaah haji
- Gambar 3.32. Perbandingan Nilai Laporan Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun
- Gambar 3.33. Perbandingan HLS dan RLS Per Tahun
- Gambar 3.34. Gubernur Kalimantan Tengah saat kunjungi sekolah yang terbakar
- Gambar 3.35. Gubernur Kalimantan Tengah Saat Mengunjungi Sekolah Yang Terbakar
- Gambar 3.36. Peningkatan IPM di Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
- Gambar 3.37. Gubernur dan Wakil Gubernur saat HUT Kalteng ke 60
- Gambar 3.38. Foto bersama Gubernur saat Festival Budaya
- Gambar 3.39. Keadaan Hotel di Kalimantan Tengah
- Gambar 3.40. Jumlah Tamu Menginap di Hotel Bintang Desember 2016-Desember 2017
- Gambar 3.41. Jumlah Tamu Menginap di Hotel Non Bintang Desember 2016-Desember 2017
- Gambar 3.42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Tahun 2016
- Gambar 3.43. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan 2016
- Gambar 3.44. Kondisi Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
- Gambar 3.45. Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia
- Gambar 3.46. Tren Kejadian Bencana di Indonesia Per Tahun
- Gambar 3.47. Rencana Pelaksanaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Berdasarkan Kebutuhan Tahun Anggaran 2017
- Gambar 3.48. Grafik Realisasi Keuangan BL + BTL Perangkat Daerah s/d 31 Desember 2017
- Gambar 3.49. Grafik Realisasi Fisik BL + BTL Perangkat Daerah Kalimantan Tengah s/d 31 Desember 2017



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota 2017
- Tabel 1.2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
- Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
- Tabel 2.2. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun 2016-2021)
- Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
- Tabel 2.2. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun 2016-2021)
- Tabel 2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
- Tabel 2.4. Program yang dirancang untuk pencapaian sasaran Tahun 2016-2021
- Tabel 2.5. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Tabel 2.6. Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
(Pendapatan dan Belanja Daerah)
- Tabel 3.1. Skala Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran
- Tabel 3.2. Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
- Tabel 3.3. Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama
- Tabel 3.4. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan I
- Tabel 3.5. Capaian Indikator Pemerintah I
- Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan II
- Tabel 3.7. Capaian Indikator Pemerintah II
- Tabel 3.8. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan III
- Tabel 3.9. Jumlah PLTS Tipe SEHEN di Kabupaten
- Tabel 3.10. PLTS dengan Daya Rendah di Desa
- Tabel 3.11. Capaian Indikator Pemerintah III.a
- Tabel 3.12. Capaian Indikator Pemerintah III.b
- Tabel 3.13. Perbandingan pelayanan air limbah domestik Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 3.14. kondisi IPAL di Kabupaten/Kota
- Tabel 3.15. kondisi IPLT di Kabupaten/Kota
- Tabel 3.16. Capaian Indikator Pembangunan IV
- Tabel 3.17. Perkembangan Ketersediaan Beras Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 3.18. Capaian Indikator Pemerintah IV.a
- Tabel 3.19. Capaian Indikator Pemerintah IV.b
- Tabel 3.20. Capaian Indikator Pembangunan V
- Tabel 3.21. Laju Pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan Menurut Provinsi Triwulan IV 2017
- Tabel 3.22. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstans 2010 (miliar rupiah)
- Tabel 3.23. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Daerah
- Tabel 3.24. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Kalimantan
- Tabel 3.25. Sasaran Tingkat Kemiskinan Nasional
- Tabel 3.26. Capaian Indikator Pembangunan VI
- Tabel 3.27. Laju Inflasi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2017
- Tabel 3.28. Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota IHK di Wilayah Kalimantan
- Tabel 3.29. Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi/Deflasi Tahun 2017
- Tabel 3.30. Perbandingan PDRB Per Kapita Per Tahun
- Tabel 3.31. Proyeksi Target Nasional untuk Kalimantan Tengah
- Tabel 3.32. Capaian Indikator Pembangunan VII
- Tabel 3.33. Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PNB
- Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Penyetoran PNB
- Tabel 3.35. Capaian Indikator Pembangunan VIII
- Tabel 3.36. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional

Tabel 3.37. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tabel 3.38. Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Industri Pengolahan

Tabel 3.39. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Tabel 3.40. Capaian Indikator Pembangunan IX

Tabel 3.41. Capaian Indikator Pembangunan X

Tabel 3.42. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Tahun

Tabel 3.43. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kalimantan Tengah

Tabel 3.44. Capaian Indikator Pembangunan XI

Tabel 3.45. Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Tengah

Tabel 3.46. Opini BPK Per Tahun

Tabel 3.47. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.49. IKM Kalimantan Tengah Per Tahun

Tabel 3.50. Laporan Kinerja Kalimantan Tengah Per Tahun

Tabel 3.51. Wajib Lapo LHKPN Per Tahun

Tabel 3.52. Capaian Indikator Pembangunan XII

Tabel 3.53. Capaian Indikator Pemerintah XII

Tabel 3.54. Capaian Indikator Pembangunan XIII

Tabel 3.55. Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah Per Tahun

Tabel 3.56. Capaian Indikator Pemerintah XIII

Tabel 3.57. Perbandingan APM dan APK Kalimantan Tengah 2017

Tabel 3.58. Perkembangan Hasil Ujian Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun

Tabel 3.59. Capaian Indikator Pembangunan XIV

Tabel 3.60. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Per Tahun

Tabel 3.61. Data Jumlah Persalinan Ibu dan Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2016

Tabel 3.62. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 3.63. Data Jumlah Rumah Sakit Umum di Kalimantan Tengah

Tabel 3.64. Data Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 3.65. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 3.66. Indikator Capaian Pembangunan XV

Tabel 3.67. Capaian Indikator Pembangunan XVI

Tabel 3.68. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Tahun 2016

Tabel 3.69. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan Tahun 2016

Tabel 3.70. Capaian Indikator Pemerintah XVI

Tabel 3.71. Indeks Risiko Bencana Alam di Pulau Kalimantan

Tabel 3.72. Capaian Indikator Pembangunan XVI

Tabel 3.73. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2017

Tabel 3.74. Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

Tabel 3.75. Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kalimantan Tengah Per Triwulan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu adanya laporan yang akuntabel, akurat dan dapat dipercaya. Sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja sebagai salah satu instrumen dari SAKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,



pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah, diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan bersungguh-sungguh.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, guna menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran Gubernur yang dicanangkan kedalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan visi dan misi yang jelas serta peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya menjadi penting. Menerjemahkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran yang selaras dengan analisis teknokratik sangat menentukan apa dan bagaimana masa depan lima tahun pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan diwujudkan.

Dari tujuh belas sasaran yang dirancang sedemikian rupa dalam periode Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat di Kalimantan Tengah. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan banyaknya tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan menjadi perhatian khusus kedepannya. Dan dua faktor penting yang perlu dibenahi dalam rangka mensukseskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan



Tengah dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan sebagai berikut :

Pertama, masih banyaknya permasalahan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan ketimpangan pendapatan, masih kurangnya kesadaran dan moral aparatur sipil negara didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, hingga mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan unsur lain baik dengan Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja di lingkungannya, Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah maupun pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan, penghargaan dan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ini bisa diartikan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah perlu lebih banyak bekerja keras dalam meningkatkan efektivitas dan pencapaian kinerja dalam menjawab tantangan kedepan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan mewujudkan pemerintahan yang bukan hanya maju tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, harus pula merupakan upaya membangun kemandirian yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.



1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang Dasar 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik kekuasaan *vertikal* maupun secara *horizontal*. Pada pemisahan kekuasaan secara *horizontal* (kesamping) melahirkan lembaga – lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and balance*. Menunjuk pada pembagian fungsi – fungsi antara organ kenegaraan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara *vertikal* lazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara *teritorial*, menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan menggunakan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan.

Pada prinsipnya pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka timbul kembali gairah pemerintahan di daerah untuk mengembangkan wilayah potensial. Terlebih-lebih dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan seluas-

luasnya mengembangkan potensi wilayah termasuk yang dilakukan oleh masyarakat yang ada didalamnya.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan dan sasaran yang hendak dituju maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pemerintah mengharapkan dengan penetapan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang disusun dengan maksud dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan. Dan setiap akhir tahun anggaran dapat dilakukan penelusuran realisasi apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan rencana kinerja melalui mekanisme pelaporan, salah satunya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tersusunnya Laporan Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dimaksudkan sebagai wujud kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam masa satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dalam satu tahun kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Guna perbaikan Tata Kepemerintahan yang baik (Good Government) dan perbaikan kinerja, masih banyak kekurangan di dalam pemerintahan dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian sasaran secara maksimal;
3. Alat kendali untuk mengukur dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah selama kurun waktu 1 tahun.



1.3. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. SEJARAH PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Sejarah singkat pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan pemancangan tiang pertama Kota Palangka Raya dapat diketahui dari sambutan Bapak Tjilik Riwut pada Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Palangka Raya ke-13 yang diawali dengan sambutan seperti di bawah ini :



Gambar 1.1 Bapak Riwut

“Bapak Panglima, Bapak Gubernur, ibu-ibu, saudara-saudara para hadirin yang terhormat. Bersyukur kepada Yang Maha Besar Tuhan bahwa pada malam ini kami dapat menghadiri perayaan HUT XIII Kota Palangka Raya, di Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai. Pepatah mengatakan: “Tak kenal, tak cinta“, dengan demikian untuk lebih mencintai Kalimantan Tengah dan ibukotanya Palangka Raya, maka perlu sekali kita mengetahui sejarah pembentukan dan perjuangannya. Sejarah singkat ini akan kami baca secara bertingkat:”

Latar belakang Sejarah Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah

Semenjak tahun 1954, bertubi-tubi mosi dan resolusi-resolusi dan pernyataan-pernyataan dari parpol/ormas dan masyarakat seluruh Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada pokok isinya adalah sama yaitu “menuntut Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Tengah tersendiri”.



Selanjutnya pada akhir tahun 1956 waktu sidang parlemen, DPR Pusat membicarakan rancangan Undang-undang pembentukan 3 (tiga) Provinsi di Kalimantan yakni :

- a. Kalimantan Selatan (dalam hal ini termasuk di dalamnya Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang ini).
- b. Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Provinsi Kalimantan Barat.

Sidang Parlemen di Jakarta telah menge sahkan Undang-undang No. 25 tahun 1956 yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1957, tentang Provinsi Kalimantan Lama dibagi menjadi 3 Provinsi baru, hanya dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sesudah 1 (satu) tahun dibentuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Karesidenan terlebih dahulu.

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dalam pimpinan Ketua Presidium Kongres, yakni Sdr. Mahir Mahar, dan tokoh-tokoh Kalimantan Tengah lainnya, yang dilangsungkan di Kota Banjarmasin mulai tanggal 2 s/d 5 Desember 1956, dihadiri oleh 600 utusan yang mewakili segenap lapisan rakyat dari seluruh Kalimantan Tengah membahas Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah telah mengirim utusan menghadap Gubernur Kalimantan (pada saat itu Gubernur Milono) dan menghadap Pemerintah Pusat menghaturkan keputusan dan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah serta memberikan penjelasan-penjelasan. Hasilnya didapatkan pengertian dan penyesuaian pendapat dimana Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri telah mengambil satu keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 nomor: U.P.34/41/24, antara lain menetapkan:

Mulai tanggal 1 Januari 1957 membentuk “Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah” yang berkedudukan



langsung dibawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin, dan ditetapkan Personilnya terdiri dari 21 orang. Mereka berkantor sementara di Kantor Gubernur Kalimantan Lama dan Gubernur Milono sebagai Gubernur pada Kementerian dalam Negeri ditunjuk / ditugaskan sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tugas-tugas yang menyangkut urusan Pemerintah Pusat langsung bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Urusan Daerah Otonom bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.

Latar Belakang Sejarah Pembentukan/Penetapan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan terbentuknya Kantor Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah yang sementara berkedudukan di Banjarmasin, bermunculanlah suara-suara, tuntutan-tuntutan pernyataan dari parpol/ormas dan dari daerah-daerah masing-masing menurut iramanya sendiri-sendiri agar ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan di daerahnya masing-masing.

Berkenan dengan itu, maka Bapak R.T.A Milono, Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil suatu kebijaksanaan membentuk satu panitia untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang pantas/wajar untuk dijadikan ibukota provinsi Kalimantan Tengah.

Panitia tersebut dibentuk pada tanggal 23 Januari 1957, terdiri dari:

1. Mahir Mahar, Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Tengah sebagai ketua merangkap anggota;
2. Tjilik Riwut, residen pada Kementerian Dalam Negeri dpb. Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota;
3. G. Obus, Bupati KDH dpb. Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota.
4. E. Kamis, pensiunan Kiai kepala/pegawai PT Sampit Dayak di Sampit sebagai anggota.



5. C. Mihing, pegawai Jawatan Penerangan Provinsi Kalimantan di Banjarmasin sebagai anggota dan sekretaris.

Sebagai Penasihat Ahli:

1. R. Moenasir, Kepala Dinas PU Persiapan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ir. Van Der Pijl, pegawai PU Persiapan Provinsi Kalimantan Tengah bagian gedung-gedung.

Setelah panitia mengadakan rapat-rapat serta menghubungi tokoh-tokoh Kalimantan Tengah dan penjabat-penjabat pimpinan militer dan sipil tingkat Kalimantan di Banjarmasin, antara lain mendapat restu dari Kolonel Koesno Oetomo Panglima Tentara dan Teritorium VI/Tanjung Pura, didapat kesimpulan, “bahwa di sekitar Desa Pahandut di Kampung Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah”.

Alasan-alasan/dasar-dasar untuk memilih tempat tersebut menjadi calon ibukota antara lain sebagai berikut:

1. Karena ada perbedaan pendapat tentang calon-calon ibukota, misalnya ada yang mengusulkan Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Sampit dan Pangkalan Bun, maka dipandang perlu dicari satu kebijaksanaan untuk mengatasi perbedaan pendapat ini.
2. Panitia berpendapat pula karena alasan penuntutan (1) diatas perlu sekali dicari jalan keluar, yaitu mencari daerah baru yang dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Tengah dan penjabat-penjabat pemerintah tingkat Kalimantan.
3. Panitia pun berpendapat, alangkah baiknya apabila calon ibukota itu berada di tengah-tengah masyarakat seluruhnya untuk memudahkan melaksanakan proses kepemimpinan dan koordinasi pada masa-masa yang akan datang, dan memiliki satu kota baru yang dibangun di tengah-tengah hutan rimba dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri di alam merdeka.



4. Dan lain-lain alasan dipandang dari sudut politik, sosial, ekonomi, pertahanan keamanan dan psikologi.

Maka dengan Undang-undang Darurat No.10 tahun 1957, L.N. No.53 tahun 1957 yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang dinamai Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan merupakan perubahan Undang-undang No.25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dalam Pasal 2 ayat 1, undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Untuk sementara waktu Pemerintah Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin.”

Sementara dalam pasal 3 ayat 1, Undang-undang tersebut dinyatakan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 30 orang anggota. Selanjutnya dengan Undang-undang No. 27 tahun 1959 L.N. No. 72 tahun 1959 ditetapkan bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya. Sesudah Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan maka pada tanggal 17 Juli 1957 jam 10.17 menit telah diletakkan tiang pertama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah oleh Presiden RI Hal ini disaksikan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, pejabat-pejabat sipil dan militer tingkat Kalimantan dan Kalimantan Selatan/Kalimantan Tengah, serta 6 orang termasuk Menteri PUT, Ir. Pangeran Mochamad Noor dan para Korps Diplomatik serta para wartawan dalam dan luar negeri yang memprakarsai pendirian dan pembangunan ibukota Palangka Raya. Ir. Pangeran Moch. Noor adalah Gubernur RI yang pertama di Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta dari tahun 1945 s/d 1949, yang memang telah mempunyai rencana dan cita-cita membuka Kalimantan termasuk Kalimantan Tengah.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/12/2-206, tanggal 22 Desember 1959 telah ditetapkan untuk memindahkan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung mulai tanggal 20 Desember 1959.

Kemudian dengan Undang-undang No. 5 tahun 1965 Kotamadya Palangka Raya dibentuk menjadi Kotamadya Otonom yang diresmikan pada 17 Juni 1965 oleh Menteri Dalam Negeri. Satu keistimewaan yang patut dicatat dalam sejarah Kotamadya Palangka Raya, bahwa Lambang Kotamadya Palangka Raya telah diterjunkan dari udara dan dibawa oleh sukarelawan/sukarelawati dari atas Kota Palangka Raya bersama pasukan payung.

Sebagai catatan penutup/terakhir agar penjelasan bermanfaat untuk kita bersama untuk memelihara dan meneruskan pembangunan Kota Palangka Raya, disertakan amanat Bapak R.T.A. Milono pada hari peletakan tiang pertama Kota Palangka Raya, yang menyatakan:

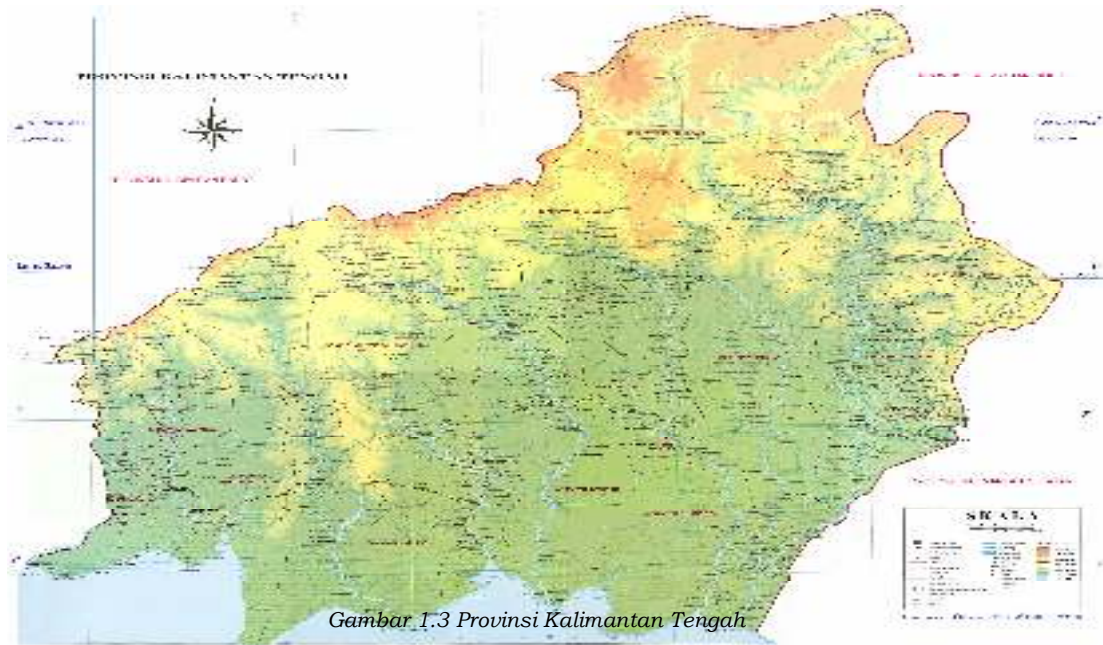
Gambar 1.2 Monumen Kota Palangka Raya



“Nama yang diberikan ini ialah: Palangka Raya. Palangka Raya artinya tempat yang Suci, yang Mulia dan Besar. Oleh karena itu sesuaikan nama ini dengan cita-cita yang dilahirkannya di Kalimantan Tengah dan semoga memberikan contoh yang baik bagi lain-lain daerah.”

Demikianlah sejarah singkat dan latar belakang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan penetapan Palangka Raya menjadi ibukotanya. (Sumber : Dokumen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah)

B. KONDISI GEOGRAFIS



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564 km², secara astronomis terletak pada posisi 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur dan 0°45' Lintang Utara - 3°30' Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- Sebelah Timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- Sebelah Selatan : Kalimantan Selatan dan Laut Jawa.
- Sebelah Barat : Kalimantan Barat.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.



C. WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Gambar. 1.4. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, hingga saat ini (setelah pemekaran wilayah) Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten, 1 Kota, 136 Kecamatan, 1.574 Desa dan Kelurahan.

KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	BUPATI/WALIKOTA
1. Barito Selatan	Buntok	Eddy Raya Saamsuri
2. Barito Utara	Tamiang Layang	Ampera AY Mebas
3. Barito Timur	Muara Teweh	Nadalsyah
4. Gunung Mas	Kuala Kurun	Arton S. Dohong
5. Kapuas	Kuala Kapuas	Ben Brahim S. Bahat
6. Katingan	Kasongan	Sakariyas
7. Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	Nurhidayah
8. Kotawaringin Timur	Sampit	Supian Hadi
9. Lamandau	Nanga Bulik	Marukan Hendrik
10. Murung Raya	Puruk Cahu	Perdie M. Yoseph
11. Pulang Pisau	Pulang Pisau	Edy Pratowo
12. Sukamara	Sukamara	Ahmad Dirman
13. Seruyan	Kuala Pembuang	Sudarsono
14. Palangka Raya	Palangka Raya	Riban Satia

Tabel 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota 2017



Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Tabel 1.2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase	Banyaknya Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan
1. Kotawaringin Barat	10 759,00	7,01	6	94
2. Kotawaringin Timur	16 796,00	10,94	17	185
3. K a p u a s	14 999,00	9,77	17	233
4. Barito Selatan	8 830,00	5,75	9	95
5. Barito Utara	8 300,00	5,40	6	103
6. Sukamara	3 827,00	2,49	13	32
7. Lamandau	6 414,00	4,18	10	88
8. Seruyan	16 404,00	10,68	5	100
9. Katingan	17 500,00	11,40	8	161
10. Pulang Pisau	8 997,00	5,86	12	99
11. Gunung Mas	10 805,00	7,04	8	127
12. Barito Timur	3 834,00	2,50	10	103
13. Murung Raya	23 700,00	15,43	10	124
14. Palangka Raya	2 399,50	1,56	5	30
Kalimantan Tengah	153 564,50	100,00	136	1 574

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Berdasarkan data tersebut diatas, maka kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Murung Raya dan kabupaten dengan luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Sukamara, sedangkan Kota Palangkaraya adalah satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 wilayah Kalimantan Tengah memiliki penduduk sebanyak 2.495.035 jiwa. Penduduk yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah, laki-laki sebanyak 1.302.796 jiwa atau 52,22% sedangkan perempuan sebanyak 1.192.239 jiwa atau 47,78%.



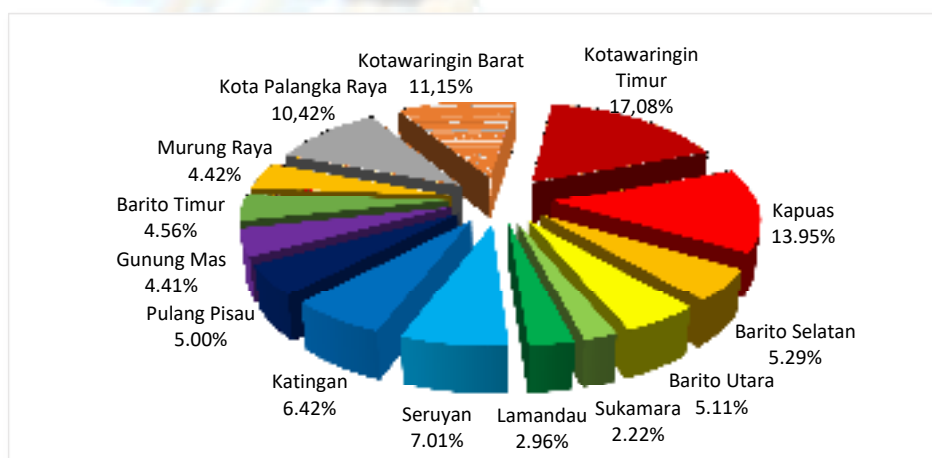
Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kotawaringin Barat	147.292	130.849	278.141	113
2	Kotawaringin Timur	225 087	201 089	426 176	112
3	Kapuas	177 648	170401	348 049	104
4	Barito Selatan	67 358	64 629	131 987	104
5	Barito Utara	66 211	61 268	127 479	108
6	Sukamara	29 404	25 917	55 321	113
7	Lamandau	39 480	34 495	73 975	114
8	Seruyan	94 068	80791	174 859	116
9	Katingan	83 964	76 341	160 305	110
10	Pulang Pisau	64 939	59906	124 845	108
11	Gunung Mas	58444	51503	109 947	113
12	Barito Timur	58539	55157	113 696	106
13	Murung Raya	57382	53008	110 390	108
14	Kota Palangka Raya	132980	126885	259 865	105
Kalimantan Tengah		1 302 796	1 192 239	2 495 035	109

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Secara umum, penyebaran penduduk di Kalimantan Tengah cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (17,08%), Kapuas (13,95%), dan Kotawaringin Barat (11,15%). Sedangkan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat keempat populasi penduduk dengan persentase penduduk 10,42 persen. Selain itu, penduduk dengan persentase hunian terkecil adalah Kabupaten Sukamara sebesar 2,22 persen dan Kabupaten Lamandau sebesar 2,96 persen.

Gambar 1.5.
Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2017



1.4. KONDISI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada Tahun 2016, terjadi 2 masa pemerintahan dengan Kepala Pemerintahan yang berbeda, Bapak Hadi Prabowo, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Tengah dan Bapak Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah yang menjabat sekarang.

1. Drs. HADI PRABOWO, MM (5 Agustus 2015 – 25 Mei 2016)

Drs. Hadi Prabowo, M.M. atau yang dikenal dengan inisial HP (lahir di Klaten, Jawa Tengah, 3 April 1960; umur 56 tahun) adalah Deputy I di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Sebelumnya, beliau adalah Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah. Selesai ditugasi sebagai Sekda Provinsi Jawa Tengah, pria berkumis ini lalu diberi tugas baru di Kementerian Dalam Negeri. Berturut-turut tugas yang diemban adalah Staf Ahli Menteri Dalam Negeri lalu Deputy I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).



Gambar 1.6. Hadi Prabowo (kanan) saat dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tanggal 5 Agustus 2015. Hadi Prabowo diangkat sebagai pejabat sementara (Pjs) gubernur Kalimantan Tengah pasca Agustin Teras Narang purnatugas pada tanggal 4 Agustus 2015. Hadi Prabowo telah dilantik sebagai Pejabat Gubernur oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Jakarta. Hadi Prabowo bakal menjadi orang nomor satu di Kalteng hingga terpilihnya pasangan gubernur dan wakil gubernur Kalteng definitif. Beliau berjanji akan memberi pengalaman dan kemampuan terbaiknya selama mengemban amanah tersebut.



2. H. SUGIANTO SABRAN (25 Mei 2016 – Sekarang)

H. Sugianto Sabran (lahir di Sampit, 5 Juli 1973; umur 43 tahun) adalah Gubernur Kalimantan Tengah sejak 25 Mei 2016. Beliau menggantikan Penjabat Gubernur Hadi Prabowo dan Gubernur sebelumnya, Agustin Teras Narang, setelah terpilih dalam Pilgub Kalteng 2016, dan berpasangan dengan Habib Said Ismail.



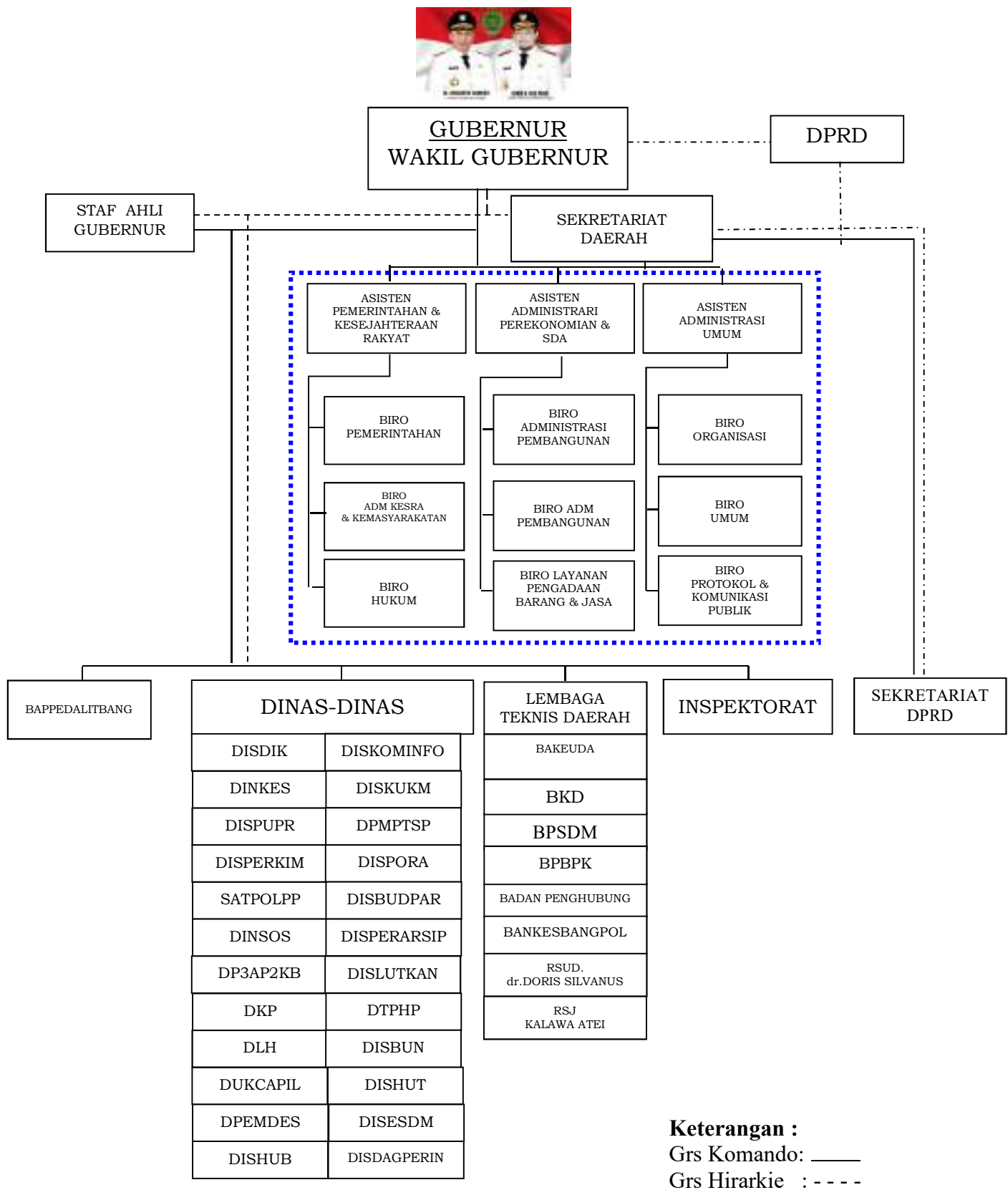
Gambar 1.7. H. Sugianto Sabran (kiri) saat dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelantikan Gubernur tersebut dimulai pukul 15.30 WIB pada hari Rabu, 25 Mei 2016 dan dirangkai dengan acara penyerahan petikan Keputusan Presiden (Keppres) di ruang Kredensial dan dilanjutkan dengan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara dan pada akhirnya Presiden Joko Widodo resmi melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran-Habib Ismail.

Harapan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur periode lima tahun ini kedepannya dapat membawa pembangunan semakin maju, mandiri, serta berdaya saing tinggi dan dapat melaksanakan amanah rakyat dengan bertanggung jawab.



1.5. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017



Gambar 1.8. Struktur Organisasi Pemrov Kalteng



PENJELASAN UMUM

Pada tanggal 15 Juni 2016 telah ditetapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Implikasi yang kemudian muncul dengan adanya PP dimaksud terhadap penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah:

1. Adanya Tipologi Perangkat Daerah, yaitu adanya Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sesuai dengan beban kerja.
2. Jumlah dan susunan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, yaitu ditentukan berdasarkan Tipe Perangkat Daerah yang didapat.
3. Penetapan Perda Pembentukan Perangkat Daerah dan Pengisian Kepala Personil, yaitu penetapan Perda yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP dimaksud diundangkan. Dengan kata lain, batas terakhir adalah tanggal 19 Desember 2016.
4. Pendanaan, yaitu pendanaan yang harus diperhitungkan untuk APBD Tahun 2017 dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru.

Masalah lain yang perlu diperhitungkan adalah karena banyaknya perampangan struktur organisasi Perangkat Daerah, maka akan banyak Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang akan kehilangan jabatannya. Dan, apabila Pejabat Struktural dimaksud kehilangan jabatannya, maka akan ada potensi sengketa Kepegawaian apabila kasus kehilangan jabatan tersebut tanpa disertai upaya preventif terlebih dahulu.



Upaya preventif yang dimaksud disini, antara lain:

- a. Pemindahan Personil dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. Dilakukan melalui Inpassing dengan tetap memperhitungkan angka kredit dari pekerjaan pada suatu Perangkat Daerah yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menggunakan Sistem Seleksi Pengisian Personil pada Perangkat Daerah yang baru, dilakukan melalui sistem seleksi untuk mendapatkan personil yang memenuhi persyaratan dan kompeten untuk menduduki jabatan Struktural dimaksud.

Menyikapi Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP itu diatur mengenai komposisi perangkat daerah yang efisien, efektif, fleksibel, dan tata kerja jelas. Dan sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

Dari total 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari dinas dan badan di lingkungan Pemprov Kalteng akan dirampingkan menjadi sekitar 32 instansi saja. Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dalam pidatonya di Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang III, menyebutkan angka itu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 25 Dinas dan 6 badan.

Gubernur menjelaskan, langkah awal pembentukan perangkat daerah dimulai dengan pemetaan urusan pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 15-17 Juni 2016 lalu. Pemetaan urusan pemerintahan ini dilakukan dengan sistem aplikasi



kemudian diteliti Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Kemendagri. Dengan adanya perubahan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut nantinya, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kalteng akan mengalami perubahan.

Dikatakan, hasil konsultasi Pemprov bersama DPRD Kalteng kepada Kementerian Dalam Negeri, bahwa pembentukan perangkat daerah telah disepakati Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe C, Inspektorat tipe B dan 25 dinas serta badan penunjang.

Dan pada Tanggal 16 Desember 2016, Peraturan Daerah tersebut disahkan di sidang paripurna yang dihadiri Pejabat Sementara (Pj) Sekretaris Daerah dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 memuat tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, dengan 3 Staf Ahli, 3 Asisten, dan 6 Biro.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Provinsi merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;



7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
22. Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
23. Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;



24. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
 25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- e. Badan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
 6. Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang koordinasi dan penghubung pelaksanaan urusan pemerintahan di Jakarta.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus dan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 pasal 17 ayat 1 .

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 pasal 18 ayat 1.



1.6. ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu “Kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh beberapa permasalahan pokok atau Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 adalah :

1. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah;
2. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Rendahnya daya saing SDM; dan
5. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan konsisten oleh *stakeholders* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah akan terealisasi. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat, maka diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlaksana secara optimal.



1.7. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjabarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya beberapa celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, yang menguraikan tentang penjelasan umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan penekanan kepada aspek organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja pada tahun 2016.

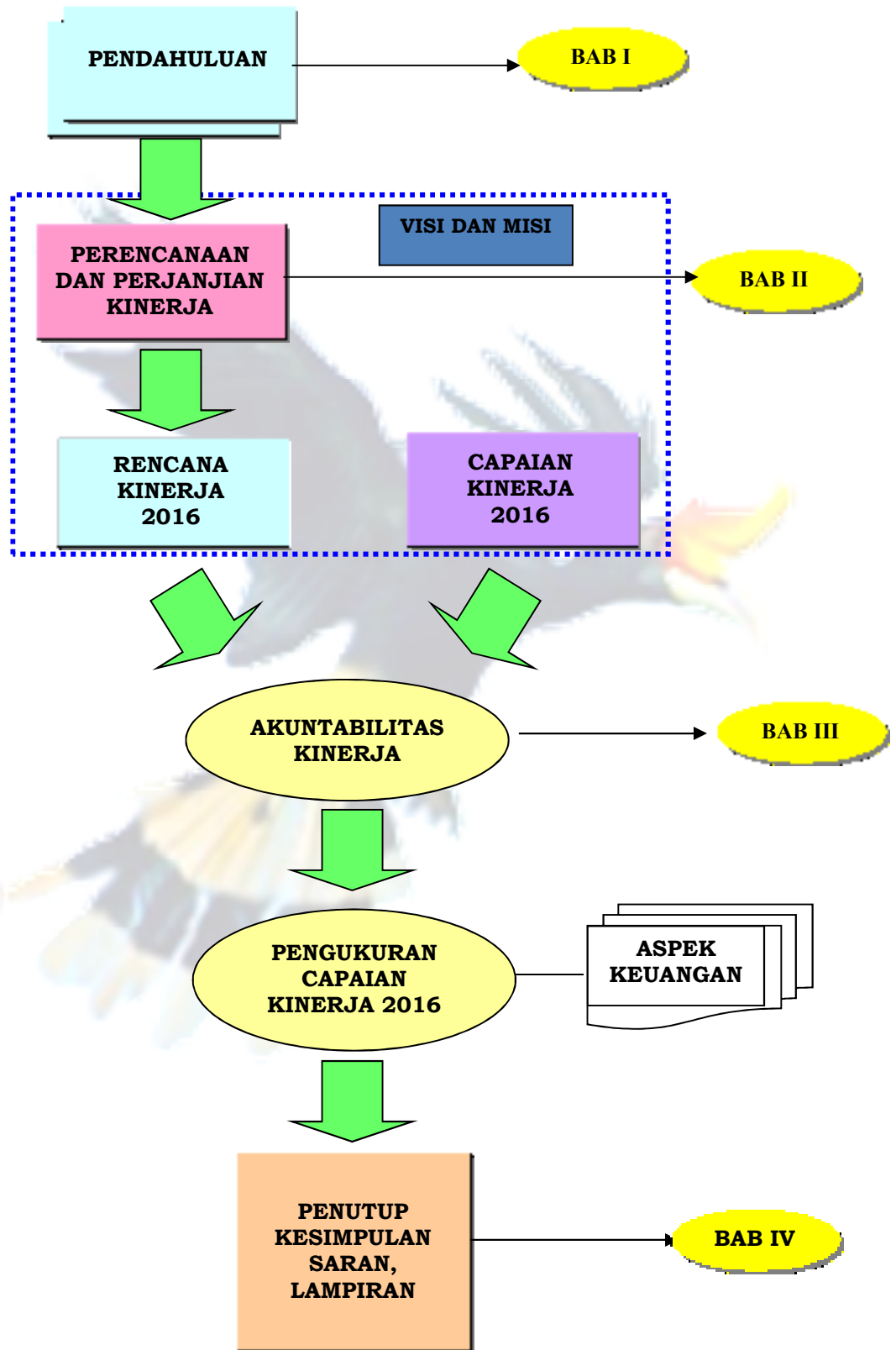
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016 dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016;
- b. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD.
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi.
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan uraian simpulan umum atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



**OUTLINE LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Gambar 1.9. Outline Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



2.1. RENCANA STRATEGIS PEMROV KALIMANTAN TENGAH.

Dalam rangka pelaksanaan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen awal perencanaan dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan setiap SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah untuk memfinalkan rancangan Renja SKPD tahun 2017 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 diperkirakan naik 19,30% atau Rp. 661,55 miliar dibanding pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2016. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran kala membacakan langsung nota keuangan Rancangan APBD 2017 pada sidang paripurna di gedung DPRD.

Rancangan APBD 2017 itu meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sugianto mengatakan, pendapatan daerah pada 2017 diperkirakan Rp. 4,08 triliun, naik dibandingkan kondisi pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp. 3,47 triliun.



Gambar 2.1. Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran menyerahkan berkas nota keuangan APBD 2017 kepada Wakil Ketua DPRD Kalteng, Baharuddin Lisa usai membacakan pidato pengantar nota keuangan Selasa 27/12/2016.

Pendapatan daerah diperkirakan Rp 4,08 triliun, naik Rp. 661,55 miliar atau 19,30% dari APBD-P 2016 yang sebesar Rp. 3,47 triliun. Dengan adanya peningkatan target pendapatan tersebut diharapkan dapat lebih optimal dalam menyediakan dana pembangunan daerah, tandas beliau.

Sumber pendapatan daerah tersebut, terdiri komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 1,32 triliun, Pendapatan transfer Rp. 2,76 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1,02 miliar.

Sementara dari sisi belanja daerah, dianggarkan mencapai Rp. 3,98 triliun atau mengalami kenaikan Rp. 657,19 miliar (19,74%) dari APBD-P 2016 yang sebesar Rp. 3,32 triliun. Belanja daerah ini dikelompokkan menjadi dua, Belanja Tidak Langsung (BL) dianggarkan sebesar Rp. 2,42 triliun dan Belanja Langsung (BL) dialokasikan Rp. 1,56 triliun.

Gubernur menegaskan, belanja daerah pada tahun anggaran 2017 baik BL maupun BTL diarahkan kepada program prioritas pembangunan. Diantaranya ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dan yang mengarah pada sektor-sektor produktif.



Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih terarah dan terpantau pencapaiannya sesuai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun Gubernur Kalimantan Tengah.

Sebagai dasar akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dipandang pula sebagai :

- Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun berikutnya;
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
- Sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam Dokumen RPJMD.



2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI

A. VISI

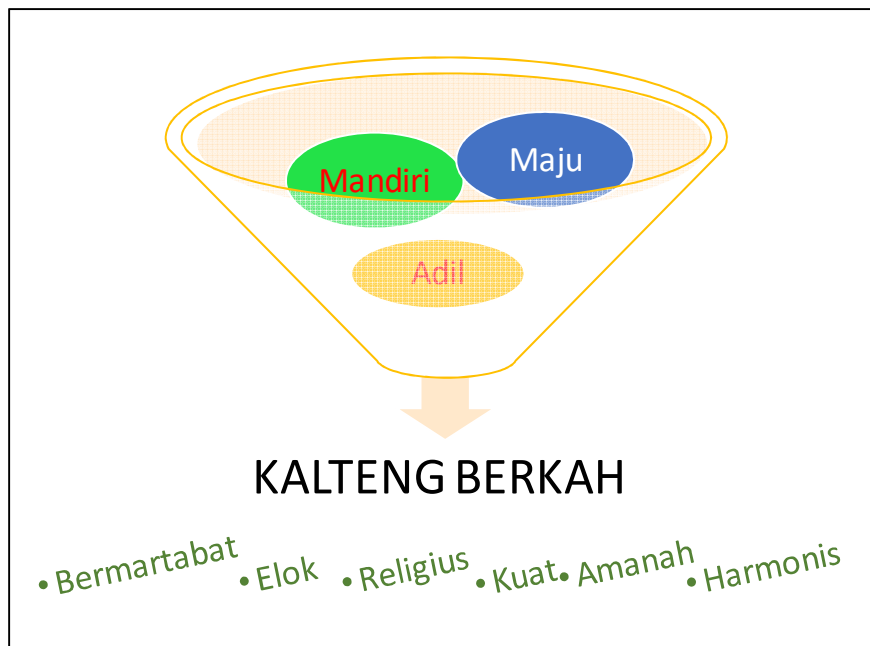
Visi pembangunan yang baik dapat menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada kemajuan, keadilan, dan kemandirian secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

***Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)***

Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang sesuai dengan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021). Pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.



Visi ini diambil dari Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 18 Januari 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri, dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar 2.2. Hubungan Antar-Elemen Visi

1. Maju

Tingkat kemajuan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja sektor perekonomian dan sosial. Perekonomian dapat dinilai dari tingkat pendapatan properti sektor industri dan jasa dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, keterpaduan antar sektor ekonomi, keberlanjutan dan kemiskinan. Kemajuan juga diukur dari indikator kependudukan dan SDM.

2. Mandiri

Definisi dari kata mandiri adalah dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian

sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

3. Adil

Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Adil sendiri bermakna keadaan dimana semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Maksud dari elemen misi Adil ini adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hak dan kewajibannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara merata. Keadilan diwujudkan dalam aspek yang luas, yakni kesempatan meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan hak politik, pertahanan dan keamanan, perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Ketiga elemen tersebut yaitu maju, mandiri, dan adil diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.



B. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis, serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. **Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi,** Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang, ternyata pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum seperti yang diharapkan/direncanakan.
2. **Pengelolaan Infrastruktur,** Indikator kemakmuran dan kemajuan suatu daerah salah satunya adalah penyediaan fasilitas infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas dan ketercukupan energi yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.



3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai,

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut.

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan,

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi.



5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata, Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.



7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam,

Lingkungan yang nyaman merupakan cita-cita bagi setiap Pemerintah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah digunakan dan menjadi instrumen pendukung dalam penyusunan RPJMD yang mengkedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin antara lain dalam usulan perbaikan rumusan visi misi dan rekomendasi penyempurnaan Kajian Rencana Program (KRP) pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan sehingga perlu peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan agar otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal. Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggerakkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan di daerah.



2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Tengah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran diklasifikasikan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan lagging indikator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indikator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.



Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

1. Misi pertama : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Tujuan : Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah yang Berkualitas.
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten.
2. Misi kedua : Pengelolaan Infrastruktur.
Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas.
Sasaran : 1. Meningkatnya Konektivitas Antar Daerah.
2. Meningkatnya Ketercukupan Energi.
3. Misi ketiga : Pengelolaan Sumber Daya Air, Daerah Pesisir dan Pantai.
Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Sumber daya Air, Daerah Pesisir dan Pantai.
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
4. Misi keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
Tujuan Pertama : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah.
Sasaran : 1. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.
Tujuan Kedua : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten.
Sasaran : 1. Meningkatnya Sektor Ekonomi Hijau.
2. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat.



5. Misi kelima : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah.
- Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik.
- Sasaran : 1. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan.
6. Misi keenam : Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata.
- Tujuan Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
- Tujuan Kedua : Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata.
- Sasaran : Terpasarkannya Destinasi Wisata.
7. Misi ketujuh : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
- Sasaran : Menurunnya Degradasi Lingkungan.
8. Misi kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan.
- Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah.



Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					Target Akhir 2021
		Target Awal 2016	2017	2018	2019	2020	
1. Terealisasinya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	18	18	45	45	45	45
2. Meningkatnya Konektivitas Antardaerah	Prosentase Jalan Mantap	47,52	59,7	67,78	75,85	83,93	92
	Persentase Konektivitas Jalan	89,4	89,8	93,2	96,6	100	100
3. Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Desa Berlistrik (%)	74,8	81,8	85,3	89,3	94,3	100
	Rasio Elektrifikasi (%)	69,8	75,5	79,5	83,5	87,5	92,5
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Produktivitas Padi (kw/ha)	35,07	37,34	38,28	39,04	39,60	40,02
	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,74	102,75	103,5	103,5	106	107,5
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,84	104,90	105,45	105,90	106,26	107
5. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam Pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,85	13	14	14	15	15
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3
6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi (%)	4,74	4,4 – 4,5	4,3 – 4,4	4,2 – 4,3	4,1 – 4,2	3,4
	PDRB perkapita (Juta Rp.)	40,14	43,54	45,41	47,61	49,95	52,67
7. Meningkatnya Sektor Ekonomi Hijau	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	23,50	24	24,35	24,65	25	25,5
8. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	16,15	16,5	16,8	17,1	17,5	18
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,50	4,00	4,00	3,50	3,50
9. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,23	80	82	84	86	88



Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					Target Akhir 2021
		Target Awal 2016	2017	2018	2019	2020	
11. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	47,52	65	70	75	80	85
12. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	B	BB	BB	BB	A
	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B	B	BB	BB	BB	A
13. Meningkatkan Kualitas Pendidikan	IPM	68,53	69,30	70,00	70,70	71,60	72,50
	Rata-rata Lama Sekolah	8,03	8,50	8,75	9,00	9,50	10,00
	Angka Harapan Usia Sekolah	12,22	12,75	13,00	13,50	14,00	15,00
14. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,54	70,50	70,90	71,40	72,00	72,75
15. Terpasarkannya Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	373.000	433.000	493.000	553.000	613.000	673.000
16. Menurunnya Degradasi Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	70,37	71,5	72	72,5	73	73,5
17. Meningkatkan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	36,60	30-32	32-35	35-40	40-45	45-50
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Transfer (%)	58,32	42,33	40-50	50-55	55-60	55-60
	Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD (%)	47,38	33,3	45-50	45-50	50-55	55-60

Sumber : RPJMD BAPPEDA Januari 2017



2.4. STRATEGI, FOKUS / TEMA PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM, PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016-2021

A. STRATEGI

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;



5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan langkah yang telah ditempuh, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun 2016-2021)

Sasaran		Strategi/Prioritas					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten	S(1) Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah					
2	Meningkatnya Konektivitas Antardaerah	S(2) Pemerataan Infrastruktur Wilayah					
3	Meningkatnya Ketercukupan Energi						
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	S(3) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai					
5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	S(4) Stabilitas Ekonomi Daerah					
6	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat						
7	Meningkatnya Sektor Ekonomi Hijau	S(5) Peningkatan Pendapatan Masyarakat					
8	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat						
9	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	S(6) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi					
10	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan						
12	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan						
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	S(7) Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas					
14	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
15	Terpasarkannya Destinasi Wisata	S(8) Pengelolaan Industri Pariwisata					
16	Menurunnya Degradasi Lingkungan	S(9) Pengelolaan SDA Secara Bijaksana yang Berkelanjutan					
17	Meningkatnya Pendapatan Daerah	S(10) Peningkatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)					



B. FOKUS / TEMA PEMBANGUNAN

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3.
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, RKPD Tahun 2016-2017

C. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Untuk selanjutnya, dapat diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap tahun sebagaimana tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang			X	X		
		2	Pembangunan Wilayah Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang		X	X	X		
2	Pemerataan Infratsruktur Wilayah	3	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Komunikasi dan Informasi	X	X	X	X	X	X
		4	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	X	X	X	X	X	X
		5	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jalan antar Kabupaten/Kota yang Layak		X	X	X	X	X
		6	Peningkatan Ketercukupan Energi		X	X	X	X	X
3	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai	7	Pemberdayaan Petani			X	X	X	X
		8	Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Air			X	X	X	X
		9	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan		X	X	X	X	X
		10	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai		X	X	X	X	X
4	Stabilitas Ekonomi Daerah	11	Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Strategis		X	X	X	X	X
		12	Pengurangan Beban dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin		X	X	X	X	X
		13	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	X	X	X	X	X	X



Strategi/Prioritas	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	14	Peningkatan Nilai Tambah Produksi Regional Kalimantan Tengah	X	X	X	X
		15	Pemberian Kemudahan dalam Berbagai Investasi di Kalimantan Tengah		X	X	X
		16	Peningkatan Produksi Hasil pada setiap Subsektor Pertanian	X	X	X	X
		17	Perluasan Lapangan Usaha dan Kesempatan Berkarya di Instansi Pemerintahan dan Swasta	X	X	X	X
6	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	18	Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Komunitas Tertentu		X	X	X
		19	Pengembangan Usaha Rumah Tangga yang Mendorong Perekonomian		X	X	X
		20	Pengelolaan Administrasi Aset dan Keuangan Daerah yang Baik	X	X	X	X
		21	Peningkatan SDM Aparatur Pelaksana Pemerintahan	X	X	X	X
		22	Peningkatan Standar Pelayanan Publik	X	X	X	X
		23	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		X	X	X
		24	Peningkatan Pelayanan Publik atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi		X	X	X
		25	Perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan		X	X	X



Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	26	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Guru pada Semua Jenjang Pendidikan		X	X	X	X	X
		27	Pengoptimalisasi Manajemen Pendidikan		X	X	X	X	X
		28	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan		X	X	X	X	X
		29	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	X	X	X	X		X
		30	Peningkatan Promosi Kesehatan Masyarakat	X	X	X	X	X	
		31	Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	X	X	X	X	X	
8	Pengelolaan Industri Pariwisata	32	Pengembangan Objek-Objek Pariwisata	X	X	X	X	X	X
		33	Pengadaan Pendidikan Kepariwisata	X	X	X			
9	Pengelolaan SDA secara Bijaksana yang Berkelanjutan	34	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	X	X	X	X	X	X
		35	Pengelolaan Pengendalian Kebakaran Hutan secara Sistematis		X	X	X	X	X
		36	Pelaksanaan Legalisasi Kepemilikan Lahan		X	X	X		
		37	Pengelolaan Pertambangan	X	X	X	X	X	X
		38	Pemanfatan Hasil SDA	X	X	X	X	X	X
10	Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	39	Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		X	X	X	X	X



D. PROGRAM

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan yang ditetapkan pada RPJMD maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Program yang dimaksud disebut sebagai Program Prioritas yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun jumlah program-program yang mendukung masing-masing sasaran pada Tahun 2016-2021 berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Jumlah Program
1	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten	2
2	Meningkatnya Konektivitas Antardaerah	9
3	Meningkatnya Ketercukupan Energi	2
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	10
5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	11
6	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	6
7	Meningkatnya Sektor Ekonomi Hijau	8
8	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat	
9	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	3
10	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	2
12	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	2
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	5
14	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	10
15	Terpasarkannya Destinasi Wisata	3
16	Menurunnya Degradasi Lingkungan	8
17	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1

Tabel 2.4.
Program yang dirancang untuk pencapaian sasaran Tahun 2016-2021



E. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017 sebagaimana daftar terlampir.

Kehhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya dan terencana sedemikian rupa sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.5.
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
I. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten	1.	Persentase Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang	Persen	18
II. Pengelolaan Infrastruktur	Meningkatnya Konektivitas Antardaerah	1.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	1.800
		2.	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Empat)	Km	1.250
		3.	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4(Empat)	Km	12.500
	Meningkatnya Ketercukupan Energi	1.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Unit	651.429
		2.	Rasio elektrifikasi	Persen	78,9



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
III. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir Dan Pantai	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	1.	Produktivitas padi	Kw/Ha	37,34
			- Padi Sawah	Kw/Ha	41,58
			- Padi Ladang	Kw/Ha	25,59
			- Jagung	Kw/Ha	34,74
			- Kedelai	Kw/Ha	12,79
			- Kacang Tanah	Kw/Ha	12,03
			- Kacang Hijau	Kw.Ha	8,77
			- Ubi Kayu	Kw/Ha	160,82
			- Ubi Jalar	Kw/Ha	97,94
			Produktivitas Tanaman Hortikulura		
			- Buah-Buahan	Ku/Pohon	0,34
			- Sayur	Ku/Ha	25,58
			- Tanaman Hias	Tangkai/m ²	2,81
			- Tanaman Obat	Kg/m ²	1,93
		2.	Nilai Tukar Nelayan	NTN/NTBi	104,90
		3.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	85173.26
		4.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	130.526,1
IV. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	1.	Kontribusi PDRB Kalteng dalam Pembentukan PDRB Kalimantan	Persen	13
		2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,5
		3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,3
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1.	Laju Inflasi Provinsi	Persen	4,4 – 4,5
		2.	PDRB Perkapita	Juta/Rp.	43,54
	Meningkatnya Sektor Ekonomi Hijau	1.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	24



MISI	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat	1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	16,5
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50
V. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	1.	Opini BPK	Opini	WTP
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	2.	Jumlah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	65
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	LKIP/ Pemerintah	B
		2.	Jumlah SKPD yang Menyusun LAKIP yang Baik	SKPD	37
			Nilai Kategori = AA > 90 – 100 (Sangat Memuaskan);	SKPD	-
			Nilai Kategori = A > 80 – 90 (Memuaskan);	SKPD	-
			Nilai Kategori = BB > 70 – 80 (Sangat Baik);	SKPD	-
			Nilai Kategori = B > 60 – 70 (Baik, Perlu Perbaikan);	SKPD	5
			Nilai Kategori = CC > 50 – 60 (Cukup);	SKPD	25
			Nilai Kategori = C > 30 – 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan);	SKPD	15
			Nilai Kategori = D > 0 – 30 (Sangat Kurang);	SKPD	-
VI. Pendidikan, Kesehatan Dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	8,50
		2.	Angka Harapan Usia Sekolah	Persen	12,75



MISI	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	UHH/ Tahun	70,50
	Terpasarkannya Destinasi Wisata	1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	433.000
		2.	Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	492
VII. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Menurunnya Degradasi Lingkungan	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,5
		2.	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Lingkungan Hidup	Persen	45
VIII. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Persen	30-32
		2.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Transfer	Persen	42,33
		3.	Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	Persen	33,3

Indikator Kinerja Utama yang digunakan Indikator Kinerja yang sebagian besar berdasarkan Renstra yang digunakan oleh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2016 - 2021.



G. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016-2021

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2016-2021, yang meliputi pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2016-2021).

Tabel 2.6. Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
(Pendapatan dan Belanja Daerah)

No.	URAIAN	RENCANA ANGGARAN					
		APBD TA.2016	APBD TA. 2017	APBD TA. 2018	APBD TA. 2019	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENDAPATAN DAERAH	3.427.236.875.000	4.088.792.553.726	4.158.299.667.225	4.294.901.405.931	4.427.978.426.995	4.615.506.131.000
	Pendapatan Asli Daerah	1.233.094.359.800	1.327.494.134.000	1.577.720.774.000	1.636.892.724.000	1.700.447.469.000	1.793.067.004.000
	Pendapatan Transfer	2.172.424.105.200	2.760.273.619.726	2.579.533.393.225	2.656.943.431.931	2.726.443.432.995	2.821.329.127.000
	Pendapatan Lainnya	21.718.410.000	1.024.800.000	1.045.500.000	1.065.250.000	1.087.525.000	1.110.000.000
B.	BELANJA DAERAH	3.328.970.710.606	3.986.167.377.726	4.088.399.667.225	4.204.901.405.931	4.337.978.426.995	4.795.506.131.000
	Belanja Tidak Langsung	1.751.361.041.086	2.422.976.341.726	2.358.055.516.291	2.399.838.337.608	2.472.094.362.205	2.550.029.674.457
	Belanja Langsung	1.577.609.669.520	1.563.191.036.000	1.730.344.150.934	1.805.063.068.323	1.865.884.064.789	2.245.476.456.543

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016; hasil analisis



3.1. PENJELASAN UMUM



Gambar 3.1. Penyerahan DIPA TA 2017

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 serta DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017. Penyerahan DIPA yang dihadiri oleh semua kepala lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, gubernur, bupati, serta walikota itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/16). DIPA tersebut diserahkan kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L), dengan total nilai mencapai Rp763,6 triliun. Sedangkan DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,3 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, DIPA diterima langsung oleh Gubernur H Sugianto Sabran. Dalam amanatnya Presiden Jokowi menjelaskan bahwa anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 yang mencapai Rp764,3 triliun, disamping Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan, menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta kesenjangan. Selain itu, Presiden juga meminta agar pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bisa bahu membahu dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan.

Sementara itu, jumlah DIPA yang diterima Gubernur Kalteng Sugianto Sabran untuk Tahun Anggaran 2017, mencapai Rp17,598 triliun.

Sebagai sebuah instansi pemerintah sektor publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai rencana strategis yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 pada tanggal 18 Januari 2017. Keterlambatan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 disebabkan perlunya kajian mendalam melalui tahapan yang panjang sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan indikatif.

2. Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan melalui verifikasi dan integrasi seluruh Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

3. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan



daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

4. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

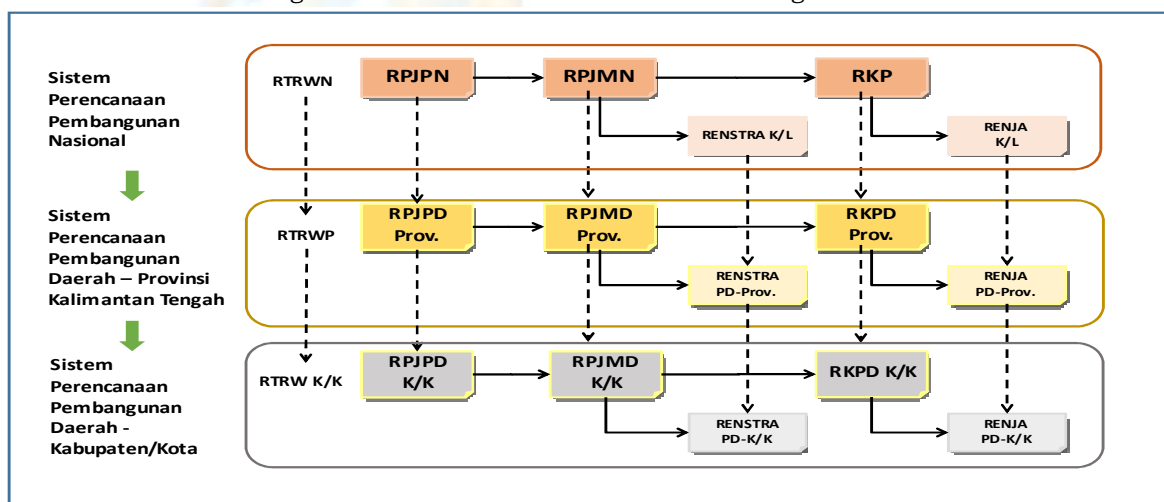
Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

5. Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah.

Hubungan antar dokumen pembangunan dapat terlihat pada Gambarberikut ini:

Gambar 3.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Realisasi Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2017 tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

3.2. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun akuntabilitas kinerja yang transparan dan akuntabel maka diperlukan kerangka pengukuran kinerja yang sistematis. Berikut kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah :

A. Manfaat Pengukuran Kinerja

Berikut ini adalah alasan mengapa perlu adanya pengukuran capaian kinerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Untuk pelaporan;
2. Untuk mengevaluasi;
3. Untuk mengendalikan;
4. Untuk menganggarkan;
5. Untuk memotivasi;
6. Untuk merancang;
7. Untuk pembelajaran;



8. Untuk pengembangan.

B. Prinsip Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan dan dilaksanakan yaitu :

1. Seluruh aktivitas kinerja yang signifikan harus dapat diukur;
2. Kinerja yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat obyektif untuk menentukan nilainya;
3. Kinerja yang tak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan;
4. Capaian Kinerja yang diharapkan harus ditetapkan;
5. Hasil Capaian menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas dan mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan Capaian;
6. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan;
7. Pelaporan Kinerja dan analisis harus kerap dilakukan;
8. Pelaporan yang sering dilakukan memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat;
9. Tindakan korektif yang tepat begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif.

C. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup ukuran tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Berikut Cara Penilaian :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dapat digunakan rumus berikut :



RUMUS I

$$\text{Prosentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus berikut :

RUMUS II

$$\text{Prosentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

D. Skala Penilaian

KINERJA ITU PRESTASIMU

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah berdasarkan prosentase capaian rata-rata atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91 ≤	Sangat Berhasil
II	76 ≤ 90	Berhasil
III	66 ≤ 75	Sedang
IV	51 ≤ 65	Rendah
V	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil capainya kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.



E. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, Data yang diperoleh dari sumber kedua, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Kinerja SKPD, dan Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi yang berada di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.

3.3. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pengukuran capaian target indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016-2021 akan dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang ada dengan realisasinya. Berikut analisis capaian indikator kinerja pembangunan pada tahun 2017 :

Tabel 3.2. Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6 = (4/3*100)	7	8 = (5/7*100)
1. Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang Akomodif dan Konsisten	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	16,67	18	16,67	92,61	45	37,04
2. Meningkatnya Konektivitas Antar Daerah	Persentase Jalan Mantap	43,62	59,7	68,73	115,13	92	74,71
	Persentase Konektivitas Jalan	87,03	89,8	94,87	105,65	100	94,87
3. Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Desa Berlistrik (%)	82,6	81,8	82,97	101,43	100	82,97
	Rasio Elektrifikasi (%)	75,9	75,5	75,89	100,52	92,5	75,89
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Produktivitas Padi (kw/ha)	29,01	37,34	31,54	84,47	40,02	78,81
	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,81	102,75	99,16	96,51	107,5	92,24
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,66	104,90	108,51	103,44	107	101,41



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6 = (4/3*100)	7	8 = (5/7*100)
5. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam Pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,98	13	11,17	85,92	15	74,47
	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	6,36	6,5	6,74	103,69	7,5	89,87
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,26 (Sept 2017)	100,75	4,3	77,67
6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi (%)	2,11	4,4-4,5	3,18	127,73	3,4	106,47
	PDRB perkapita (Juta Rp.)	44,1	43,54	44,1 (2016)	101,29	52,67	83,73
7. Meningkatnya Sektor Ekonomi Hijau	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	21,94	24	20,70	86,25	25,5	81,18
8. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	16,70	16,5	16,67	101,03	18	92,61
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,82	4,50	4,23	106	3,50	79,14
9. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
10. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	t.a.d	80	74,33	92,91	88	84,47
11. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	56,80	65	56,80 (2016)	87,38	85	66,82
12. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B (61,21)	B	B (61,35)	100	A	50
	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B (2015)	B	B	100	A	50
13. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IPM	68,53 (2015)	69,30	69,13 (2016)	99,75	72,50	95,35
	Rata-rata Lama Sekolah	8,03 (2015)	8,50	8,13 (2016)	95,65	10,00	81,30
	Angka Harapan Usia Sekolah	12,22 (2015)	12,75	12,33 (2016)	96,71	15,00	82,20



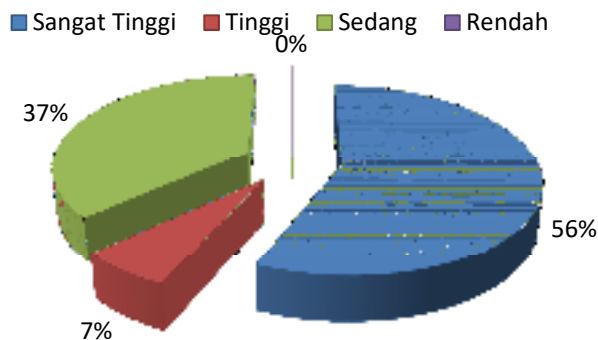
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6 = (4/3*100)	7	8 = (5/7*100)
14. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,54 (2015)	70,50	69,57 (2016)	98,68	72,75	95,63
15. Terpasarkannya Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	373.000	433.000	866.915	200,21	673.000	128,81
16. Menurunnya Degradasi Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	70,37 (2014)	71,5	74,71 (2016)	104,49	73,5	101,65
17. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	32,64	30-32	32,74	102,31	45-50	72,76
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Transfer (%)	66,44	42,33	51,83	122,44	55-60	94,24
	Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD (%)	46,03	33,3	41,23	123,81	55-60	74,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

Dari 30 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi pada Tahun 2017, ada 17 (tujuh belas) indikator yang melebihi capaian, 2 (dua) indikator yang menunjukkan capaian 100%, 11 (sebelas) indikator yang berada di kisaran 80-90 persen. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai berbenah diri dalam menyukseskan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah dimana dimulai bertahap dari integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dan kerja keras seluruh stakeholder dalam capaian sejumlah indikator tersebut. Adanya capaian yang masih menggunakan keluaran data tahun 2016 disebabkan data tersebut tersedia pada tahun 2017.



Persentase Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017



Gambar 3.3. Realisasi Sasaran Pembangunan

B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 3.3. Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
				TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5	6 (4*100/3)
1.	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	Persen	16,67	18	16,67	92,61
2.	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	Persen	92,4	80	92,1	115,12
3.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	556,31	1.800	473,74	26,32
4.	PanjangJalan Dilalui Roda 4 (Empat)	Km	962,71	1.250	847,24	67,78
5.	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4(Empat)	Km	971.553	12.500	971.553	7772,42
6.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Unit	490.949	651.429	654.573	100,48
7.	Persentase Penduduk yang terlayani sistem limbah yang memadai	Persen	61,09	87,23	61,09	70,03

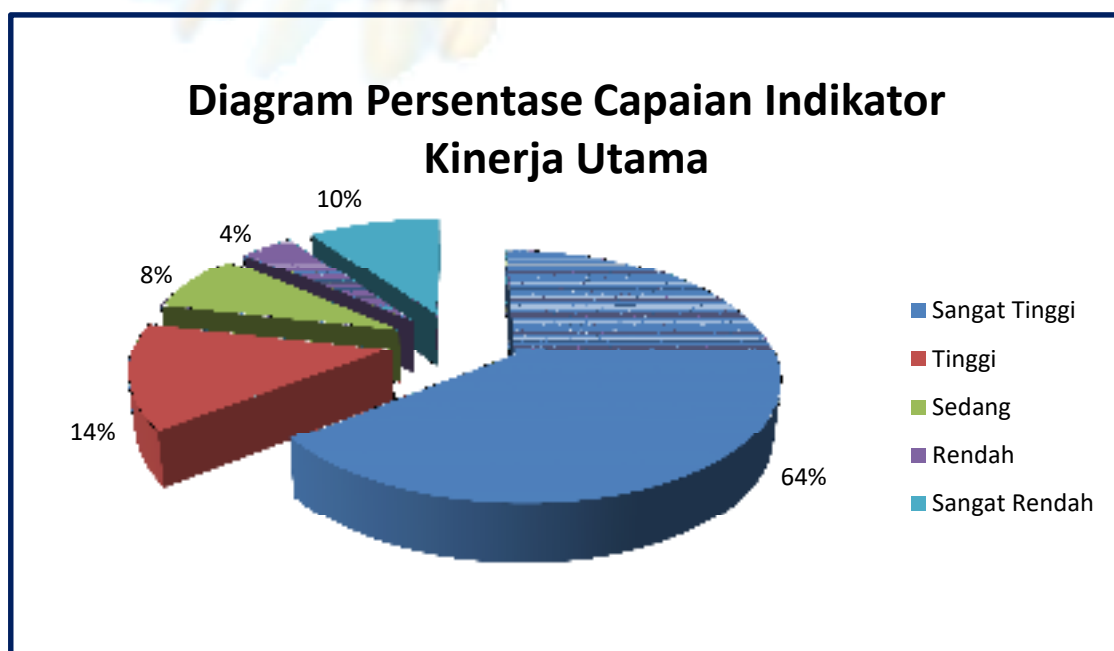


INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
				TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6 (4*100/3)	
8.	Produktivitas padi	Kw/Ha	29,01	37,34	31,54	84,47
	- Padi Sawah	Kw/Ha	32,13	41,58	34,18	82,20
	- Padi Ladang	Kw/Ha	21,48	25,59	21,71	84,84
	- Jagung	Kw/Ha	37,00	34,74	44,60	128,38
	- Kedelai	Kw/Ha	13,79	12,79	12,33	96,40
	- Kacang Tanah	Kw/Ha	11,44	12,03	11,73	97,51
	- Kacang Hijau	Kw.Ha	8,68	8,77	9,09	103,65
	- Ubi Kayu	Kw/Ha	246,69	160,82	343,91	213,85
	- Ubi Jalar	Kw/Ha	100,98	97,94	108,67	110,96
	Produktivitas Tanaman Hortikultura					
	- Buah-Buahan	Ku/Pohon	0,29	0,34	0,32	86,37
	- Sayur	Ku/Ha	49,07	28,58	18,97	66,36
	- Tanaman Hias	Tangkai/m ²	1,19	2,81	1,12	39,71
	- Tanaman Obat	Kg/m ²	1,45	1,93	1,08	52,14
9.	Nilai Tukar Nelayan	NTN/NTBi	112,47	104,90	108,51	103,44
10.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	75.903,28	85,173,26	79.271,03	93,07
11.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	142.466,60	130.787,3	152.789,30	117,06
12.	Peningkatan Produksi Benih Ikan	Produksi	60.180.000	59.500.000	60.180.000	101,14
13.	Kontribusi PDRB Kalteng dalam Pembentukan PDRB Kalimantan	Persen	10,85	13	11,17	85,92
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,36	6,5	6,74	103,69
15.	Angka Kemiskinan	Persen	5,91	5,3	5,26	100,75
16.	Laju Inflasi Provinsi	Persen	2,11	4,4-4,5	3,18	127,73
17.	PDRB Perkapita	Juta/Rp.	44,1	43,54	44,1 (2016)	101,29
18.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	21,94	24	20,70	86,25
19.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	16,70	16,5	16,67	101,03
20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,54	4,50	4,23	106
21.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100
22.	Wajib Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Orang	371	271	218	96,89
23.	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	77,23	80	74,33	92,91
24.	Jumlah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	RB	56,80	65	56,80 (2016)	87,38
25.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	LKIP/Pemerintah	B	B	B	100
26.	Jumlah SKPD yang Menyusun LAKIP yang Baik	SKPD	34	37	26	70,27
	Nilai Kategori = AA > 90 – 100 (Sangat Memuaskan);	SKPD	-	-	-	-
	Nilai Kategori = A > 80 – 90 (Memuaskan);	SKPD	-	-	-	-
	Nilai Kategori = BB > 70 – 80 (Sangat Baik);	SKPD	-	-	-	-
	Nilai Kategori = B > 60 – 70 (Baik, Perlu Perbaikan);	SKPD	3	10	13	260
	Nilai Kategori = CC > 50 – 60 (Cukup);	SKPD	10	20	13	73
	Nilai Kategori = C > 30 – 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan);	SKPD	21	15	6	75



INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
				TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5	6 (4*100/3)
	Nilai Kategori = $D > 0 - 30$ (Sangat Kurang)	SKPD	-	-	1	0
27.	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	8,03	8,50	8,13 (2016)	95,65
28.	Angka Harapan Usia Sekolah	Persen	12,22	12,75	12,33 (2016)	96,71
30.	Angka Harapan Hidup	UHH/ Tahun	69,54	70,50	69,57 (2016)	98,68
34.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	844.626	433.000	866.915	200,21
35.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,37	71,5	74,71 (2016)	104,49
36.	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Lingkungan Hidup	Kasus	25	45	25	55,56
37.	Pemantauan, Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah Lokasi	6	7	2	28,57
38.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Persen	32,64	30-32	32,74	102,31
39.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Transfer	Persen	66,44	42,33	51,83	122,44
40.	Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	Persen	46,03	33,3	41,23	123,81

“Memacu Pemerataan dan Penguatan Pergerakan Perekonomian Daerah” merupakan Tema Pembangunan pada Tahun Kedua Pemerintahan Gubernur Kalimantan Tengah Bapak **H. Sugianto Sabran** dan Wakil Gubernur Bapak **Habib Said Ismail**. Capaian sasaran Pemerintah tersebut dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Tahun 2017



Dari 44 Indikator Kinerja Utama Pemerintah dapat dicapai :

1. 33 Indikator menunjukkan hasil sangat tinggi;
2. 7 Indikator menunjukkan hasil tinggi;
3. 4 Indikator menunjukkan hasil sedang;
4. 2 Indikator menunjukkan hasil rendah;
5. 5 Indikator menunjukkan hasil sangat rendah.

Penjelasan :

1. Data yang digunakan merupakan data terbaru yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Laporan Kinerja dari Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari RPJMD Tahun 2016-2021 ternyata masih perlu diselaraskan kembali dengan Renstra dan IKU yang digunakan SKPD disebabkan adanya data realisasi untuk pencapaian target tahun 2017 tidak ada atau belum tersedia;
3. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan sesuai kebijakan figur seorang pimpinan daerah juga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan mulai aktifnya Perangkat Daerah yang baru terbentuk di tahun 2017 otomatis masih perlu berbenah dalam hal menata perencanaan dan mekanisme dalam akuntabilitas kinerjanya.

Solusi :

1. Untuk pencapaian target pada tahun berikutnya agar indikator kinerja yang tidak tersedia datanya ditinjau kembali atau direvisi;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat terpenuhi di Tahun berikutnya dengan disertai perubahan perangkat daerah yang terjadi di Provinsi Kalteng.
3. Untuk Perangkat Daerah yang baru dikoordinasikan dan dibimbing di dalam pembuatan skema akuntabilitas kinerjanya melalui Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.



C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN I

Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang
Yang Akomodif Dan Konsisten

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	$6 = (4/3 \times 100)$	7	$8 = (4/6 \times 100)$
1.	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	18	18	16,67	92,61	45	37,04

Tabel 3.4. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan I

Penyelesaian RTRWP Mendesak

Upaya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah hingga kini masih



Gambar 3.5. Rapat Koordinasi Daerah terkait RTRWP

terkendala status kawasan hutan meskipun Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sehingga banyak fasilitas umum, fasilitas sosial, permukiman dan

perizinan pihak ketiga yang pernah diterbitkan berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2003 tentang RTRWP masih terkendala dalam kawasan hutan.

Hasil Rakornas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) se Indonesia September 2017 di Jakarta menegaskan percepatan penyelesaian permasalahan holdingzone/outlinezone pada Perda RTRW Provinsi setelah adanya usulan Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan.





RTRWP
MENJADI
PERMASALAHAN
DI KALIMANTAN
TENGAH
Kerugian Bagi
Pemerintah Daerah dan
Masyarakat Kalimantan
Tengah.

- *Menghambat percepatan pembangunan daerah*
- *Banyak program yang direncanakan terganjal karena masalah fungsi kawasan, misalnya Kepala Daerah harus berhati-hati membangun jalan, takut dianggap merambah hutan.*
- *Program Pertanian, percontakan sawah bagi masyarakat di Pedalaman adayang batal dilaksanakan*

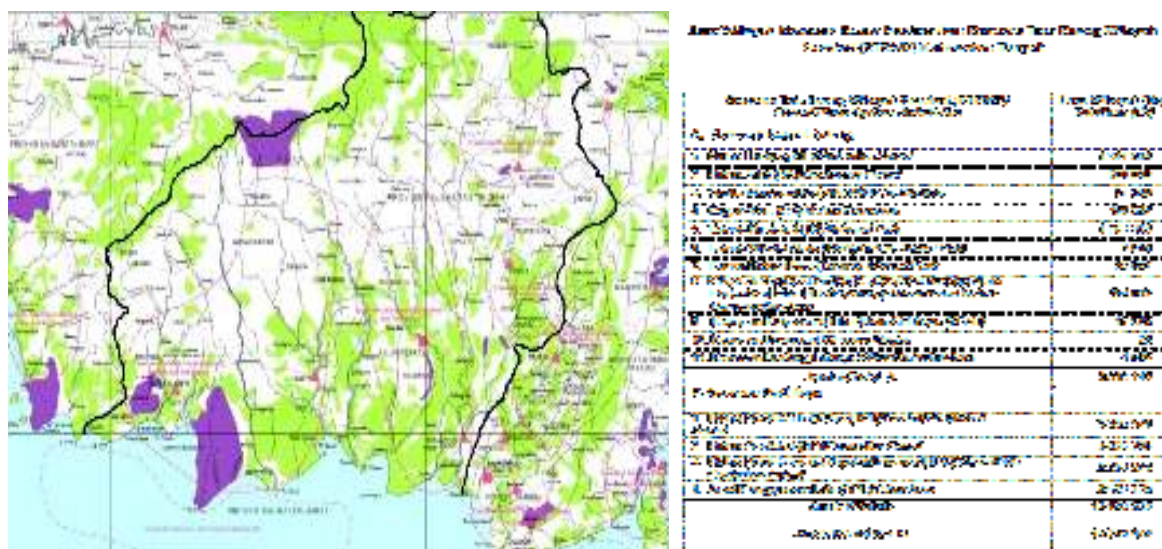
Gambar 3.6. Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh antara lain melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan inventarisasi desa/kelurahan di Kalimantan Tengah yang masuk dalam kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah bekerja sama dengan LAPAN untuk mendukung data lapangan melalui proses penginderaan jauh resolusi tinggi guna mengidentifikasi kawasan – kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial, permukiman dan perizinan pihak swasta yang masuk kawasan hutan.

tim ahli BKPRD juga telah membuat kajian telaahan dan draf surat permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam integrasi tata ruang wilayah Kalimantan Tengah guna percepatan penyelesaian RTRWP yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Penyelesaian masalah tata ruang pada tahun 2017 masih terkendala sehingga tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Diharapkan pada tahun berikutnya bisa dituntaskan.

Gambar 3.7. Rencana Pola Ruang Kalimantan Tengah



Sumber : Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Di Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penjabaran dari Indikator Sasaran Pembangunan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6 (4*100/3)
Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	16,67	18	16,67	92,61

Tabel 3.5. Capaian Indikator Pemerintah I

Dari tabel diatas didapat dari informasi mengenai Rencana RTRW Provinsi Kalimantan berjumlah 6 jenis peta yaitu :

1. Peta RTRW-P;
2. Peta Kawasan Strategis Ekonomi;
3. Peta Kawasan Strategis Sosial Budaya;
4. Peta Kawasan Strategis dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
5. Peta Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi;
6. Peta Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

Dari 6 (enam) jenis peta tersebut pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum baru bisa menyediakan 1 (satu) buah peta.



SASARAN II

Meningkatnya Konektivitas Antar Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6 = (4/3*100)	7	8 = (4/6*100)
2.	Prosentase Jalan Mantap	43,62	59,7	68,73	115,13	92	74,71
	Persentase Konektivitas Jalan	87,03	89,8	94,87	105,65	100	94,87

Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan II

Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebagian besar sudah terkoneksi baik antar kabupaten maupun antarprovinsi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk ke Provinsi Kalimantan Timur sudah terhubung walaupun sebagian ruas masih terdapat jalan tanah.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5 (4*100/3)
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	556,31	1.800	473,74	26,32
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Empat)	Km	962,71	1.250	847,24	67,78
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4(Empat))	Km	971.553	12.500	971.553	7772,42

Tabel 3.7. Capaian Indikator Pemerintah II

Isu Permasalahan :

Curah Hujan yang tak menentu di Kalimantan Tengah sering membuat kondisi jalan menjadi berlubang dan tergenang sehingga akses transportasi dari kabupaten ke kota maupun sebaliknya menjadi susah untuk dilewati.



Solusi :



Gambar 3.8. Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran saat kunker barsel

Kualitas jalan di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu banyak perbaikan dan ditinjau kembali. Panjang jalan Provinsi Kalimantan Tengah total sebesar 1.100 Km (49 Ruas Jalan) dengan panjang efektif penanganan sampai tahun 2015 adalah sebesar 167,97 km. Total panjang jalan Provinsi dengan lebar jalan $\geq 5,5$ m sebesar 310 km dan total panjang jalan dengan lebar jalan

<5,5 m sebesar 492 km. Panjang jalan provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi mantap yang merupakan gabungan dari jumlah jalan baik (556,31 km) dan jumlah panjang jalan sedang (406,40 km) adalah sebesar 962,71 km.

Status Jalan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan type permukaan (km) dan kondisi (km) dapat dilihat sebagai berikut :

Jalan Provinsi Berdasarkan Type Permukaan (km)

Aspal/Beton		Penetrasi	Agrerat/Krikil	Tanah
761,51	140,62	39,52	109,89	48,47

Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi (km)

Mantap			Tidak Mantap		
Baik	Sedang	Total	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
556,31	406	962,71	113,01	24,29	137,30

Tabel 3.7. Kondisi Jalan di Kalimantan Tengah



Hingga saat ini dari lintas selatan sepanjang 835,93 Km yakni ruas jalan dari Batas Kalimantan Barat – Pangkalan Bun – Sampit – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Batas Kalimantan Selatan telah ditangani hingga kondisi sekarang adalah mantap sepanjang 806,60 Km (96,492 %), sedangkan yang tidak mantap 29,326 Km (3,508 %). Sedangkan untuk Lintas Tengah sepanjang 598,52Km yakni dari Tb. Samba – Rabambang – Tb. Jutuh – Tewah – Kuala Kurun – Sei Hanyu – Tb. Muara Laung – Sp. Muara Laung – Puruk Cahu – Muara Teweh - Batas Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini mempunyai kondisi mantap sepanjang 518,784 Km (86,678 %) dan kondisi tidak mantap sepanjang 79,731Km (13,322 %). Untuk penghubung Lintas dengan panjang 280,392 Km, terdiri atas kondisi mantap sepanjang 245,879 Km (87,691 %), dan kondisi tidak mantap sepanjang 34,513Km (12,309 %). Secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1.743,270 Km (87,03%) kondisi mantap dan 258,814Km (12,92%) kondisi tidak mantap.

Untuk Lintas Selatan telah dilaksanakan pelebaran menjadi 6 meter sepanjang 705,137(85,846 %) dan masih terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 6 meter sepanjang 115,321Km (13,796%). Sedangkan untuk Lintas Tengah hanya 34,021 % (203,618Km) dengan lebar minimal 6 m, dan masih terdapat 65,979 % (394,897Km) dengan lebar kurang dari 6 meter. Untuk Penghubung Lintas dengan panjang 280,392Km juga hanya terdapat 18,096 % (50,740Km) dengan lebar minimal 6 m, dan masih terdapat 81,904 % (229,652Km) dengan lebar kurang dari 6 meter. Secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah terdapat jalan dengan lebar minimal 6 meter sepanjang 971,963 Km (56,680 %) dan lebar kurang dari 6 meter sepanjang 739,870Km (43,145 %).





Gambar 3.11 Peta Lintas Kalimantan

Berdasarkan jenis permukaan secara keseluruhan bahwa jalan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar telah diaspal yakni 82,296 % atau sepanjang 1.411,238 Km terletak di Lintas Selatan sepanjang 835,926 Km, di Lintas Tengah sepanjang 306,82 Km dan di Penghubung Lintas 268,492 Km. Terdapat 16.281 % jalan masih berupa agregat atau sepanjang 279,195 Km, pada Lintas Selatan agregat 0 Km, Lintas Tengah 267,295 Km dan Penghubung Lintas sepanjang 11,90 Km sedangkan yang masih berupa jalan tanah sepanjang 24,4 Km (1,423%) yakni di Lintas Tengah.

Upaya yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam meningkatkan perbaikan dan optimalisasi konektivitas jalan antar daerah, antara lain :

- a. Optimalisasi fungsi, monitoring dan pengendalian terhadap program dan kegiatan dalam konektivitas jalan antar daerah hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan dan diantisipasi sejak tahap perencanaan;
- b. Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral maupun lintas sektor secara berkala sehingga penyebab timbulnya hambatan dan kendala dapat diambil langkah dan strategi untuk menimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi;

SASARAN III

Meningkatnya Ketercukupan Energi.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4/6*100)
3.	Rasio Desa Berlistrik (%)	82,6	81,8	82,97	101,43	100	82,97
	Rasio Elektrifikasi (%)	75,9	75,5	75,89	100,52	92,5	75,89

Tabel 3.8. Capaian Indikator Sasaran Pembangunan III

Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tipe Sehen yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

Pembangkit Listrik Tenaga Surya	
Kabupaten	Unit
Kotawaringin Barat	205
Kotawaringin Timur	155
Total	360

Tabel 3.9. Jumlah PLTS Tipe SEHEN di Kabupaten

Sementara Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017 membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat pada 2 Kabupaten sebanyak 5 Unit yaitu :



Pembangkit Listrik Tenaga Surya			
Kabupaten	Desa	Unit	Daya (kWp)
Katingan	Desa Tumbang Gae dan Rangan Rondan	2	30
	Desa Tumbang Mahop	1	30
	Desa Sebangau Jaya	1	40
Barito Selatan	Malitin	1	15

Tabel 3.10. PLTS dengan Daya Rendah di Desa

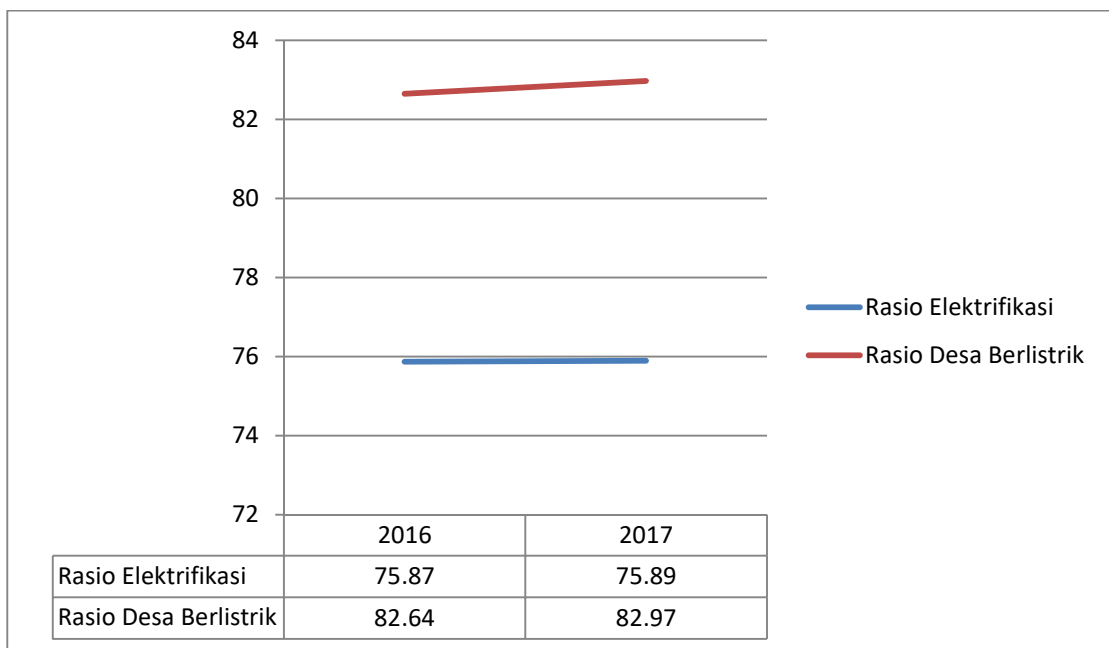
Manfaat yang didapat masyarakat pedesaan melalui pemasangan PLTS tersebar dan terpusat ini dari segi lingkungan adalah selalu tersedianya penerangan yang bersumber dari energi yang terbarukan, karena pada dasarnya PLTS menggunakan sinar matahari dimana sinar matahari merupakan energi yang tidak akan pernah habis, sehingga tidak menyebabkan krisis karena kelangkaan energi.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	5	6	7 (4*100/3)
Rumah Tangga Pengguna Listrik	Unit	490.949	651.429	654.573	100,48

Tabel 3.11. Capaian Indikator Pemerintah III.a

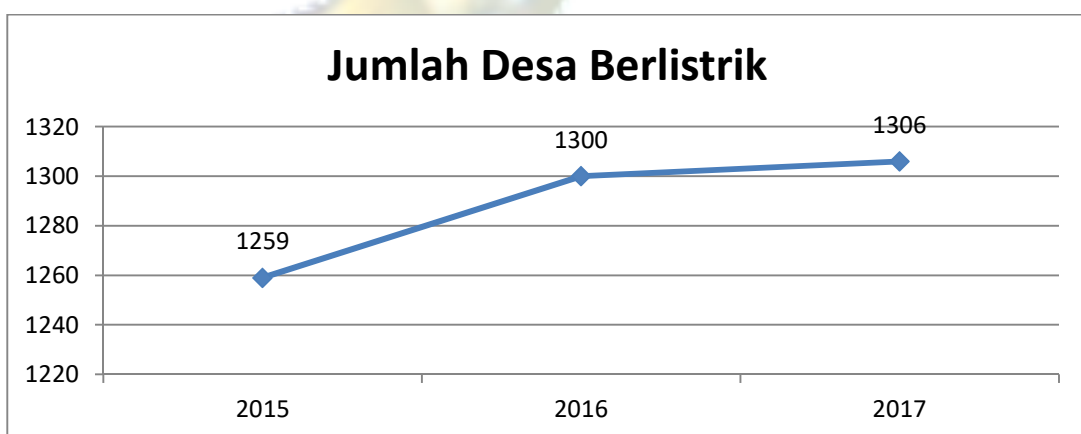
Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah hingga saat ini telah mencapai 75,89 Persen dan Rasio Desa berlistrik mencapai 82,97 Persen dari 1574 desa dengan jumlah Rumah Tangga (RT) berlistrik adalah sebanyak 654.573 RT. Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 maka Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa berlistrik tahun 2017 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam gambar berikut ini :





Gambar 3.10. Perbandingan Rasio Elektrifikasi pertahun

Pemerintah akan tetap melanjutkan penyelesaian target desa berlistrik untuk mewujudkan pembangunan sektor energi yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sesuai dengan visi Gubernur “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”.



Gambar 3.11. Perbandingan Desa berlistrik Tahunan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			Target	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5 (4*100/3)
Persentase Penduduk yang terlayani sistem limbah yang memadai	Persen	61,09	87,23	61,09	70,03

Tabel 3.12. Capaian Indikator Pemerintah III.b

Cakupan pelayanan air limbah domestik Provinsi Kalimantan Tengah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk	Sistem Terpusat		Sistem Komunal		Sistem Setempat		Terlayani Sanitasi Layak	
		(jiwa)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Palangka Raya	252.105	360	0,27	100	0,04	61.801	35,00	62.261	24,70
2	Barito Selatan	136.092	-	-	175	0,13	45.656	34,26	45.831	33,68
3	Barito Timur	114.249	-	-	-	-	31.704	27,7	31.704	27,75
4	Barito Utara	179.653	-	-	-	-	58.713	32,68	58.713	32,68
5	Gunung Mas	153.259	-	-	-	-	39.024	25,46	39.024	25,46
6	Kapuas	405.453	-	-	110	0,03	110	0,03	220	0,05
7	Katingan	454.438	-	-	150	0,05	27.709	13,07	27.859	6,13
8	Kotawaringin Barat	269.629	-	-	200	0,08	243.125	89,51	243.325	90,24
9	Kotawaringin Timur	482.885	540	0,11	240	0,05	370.038	76,63	857	0,18
10	Lamandau	71.575	120	0,16	200	0,28	14.788	20,66	15.108	21,11
11	Murung Raya	103.158	-	-	-	-	16.568	16	16.568	16,06
12	Pulang Pisau	124.000	-	-	-	-	59.148	47,701	16	0,01
13	Seruyan	145.152	-	-	-	-	45.718	31,49	48	0,03
14	Sukamara	52.913	-	-	735	1,39	34.870	65,9	46.453	87,79
Total		2.944.561	1.020	0,03	1.910	0,14	1.014.102	30,47	587.986	26,13

Tabel 3.13. Perbandingan pelayanan air limbah domestik Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan di 7(tujuh) Kabupaten/Kota sejak tahun 2008-2016, dalam kurun waktu tersebut masih ada target kapasitas yang belum tercapai. Adapun kondisi IPAL di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



N o	Kabupaten /Kota	Nama IPAL	Tahun Pemban gunan	Kapasitas SR (L/Hari)	Jumlah Sambungan Rumah Eksisting	Kapasitas Belum Terpakai
KOTA						
1	Palangka Raya	IPAL Komunal Perumahan Tirta Mas I	2008	96	120	11,5
		IPAL Komunal Bumi Palangka I	2009	96	100	9,6
		IPAL Komunal Perumahan Tirta Mas II,	2010	96	100	9,6
KABUPATEN						
2	Barito Selatan	Jl. Karau, Buntok Kota	2016	96	153	12,2
3	Kapuas	IPAL Komunal Denmar	2011	96	100	9,6
		Jl. Tendean, Komp. Kantor Dermaga Dishub	2016	96	150	12
4	Katingan	IPAL Komp. BTN Jl. Bahalap Permai Km.16, Desa Hampalit, Kereng Pangi	2016	96	201	16,1
5	Kotawaringin Barat	IPAL Komunal RSH Graha Mas Pangkalan Bun			159	15,3
6	Kotawaringin Timur	IPAL RSH Wengga, Jl. Cilik Riwt Km. 3	2011	96	100	9,6
		IPAL Perumahan Pandawa	2016	96	132	6,76
7	Lamandau	IPAL Kawasan Perum Pemda Bukit Hibul	2015	96	102	9,79

Tabel 3.14. kondisi IPAL di Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini telah memiliki 6 (enam) unit Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT). Namun yang beroperasi hanya IPLT Kabupaten Kotawaringin Barat dan IPLT Kota Palangka Raya, adapun kondisinya dapat dilihat berikut ini :

N o	Nama IPAL/IPLT	Kabupaten	Kapasitas IPLT		Status (Berfungsi/Tidak Berfungsi)	Tahun Pembangunan
			Volume	Satuan		
1	IPLT	Kapuas	30	m ³ /hari	Belum Beroperasi	2013-2014
2	IPLT Pasir Panjang	Kotawaringin Barat	28	m ³ /hari	Belum Beroperasi	2014
3	IPLT Sudirman	Kotawaringin Timur	50	m ³ /hari	Berfungsi	2011-2012
4	IPLT Tjilik Riwt Km.14	Palangka Raya	50	m ³ /hari	Berfungsi	2007,2008, 2011
5	IPLT Sukamara	Sukamara	-	-	-	2015
6	IPLT Kawasan Perum Pemda Bukit Hibul	Lamandau	48.96	m ³ /hari	OP Tidak Jalan	2015

Tabel 3.15. kondisi IPLT di Kabupaten/Kota



Isu Permasalahan :

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dalam pelaksanaan program ini, yaitu Keterbatasan anggaran menjadi kendala di dalam pelayanan publik, sehingga kegiatan pembangunan hanya terbatas pada dana yang sudah dianggarkan dalam DPA 2017, sedangkan masih banyak kegiatan yang diusulkan belum ada solusi penyelesaian dana maupun anggarannya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2017 ini sudah mencapai target.

Solusi :

1. Pelibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energy serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat;
2. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan dan Kursus;
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor energi dan sumber daya mineral;
4. Untuk realisasi target pada tahun 2018 agar semua desa dapat menikmati penerangan listrik maka perlunya dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.



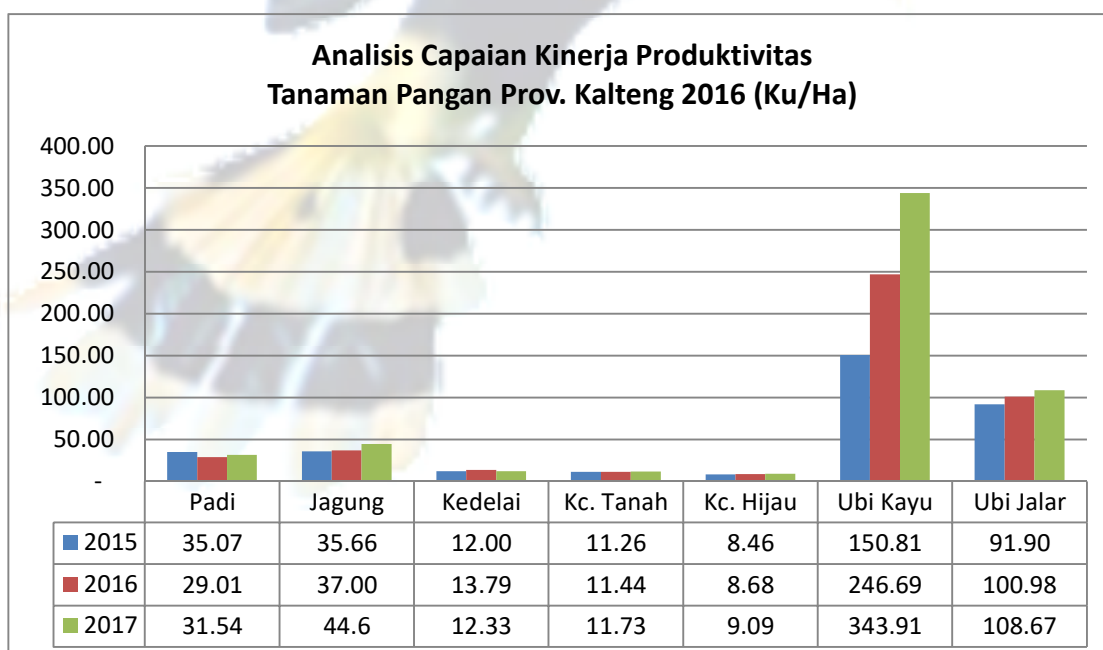
SASARAN IV

Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2		3	4	5 = (4/3*100)	6	7 = (4/6*100)
4.	Produktivitas Padi (kw/ha)	29,01	37,34	31,54	84,47	40,02	78,81
	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,81	102,75	99,16	96,51	107,5	92,24
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,66	104,90	108,51	103,44	107	101,41

Tabel 3.16. Capaian Indikator Pembangunan IV

Produktivitas Tanaman Padi tahun 2017 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan cukup baik karena rata-rata pencapaian telah melebihi target 50 persen. Bahkan ada komoditas yang telah melebihi target 100 persen seperti jagung, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.



Gambar 3.12. Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan Prov. Kalteng

Sumber : Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (ARAM II)



Analisis penyebab meningkatnya produktivitas padi :

1. Terjadi peningkatan produktivitas di Kabupaten-Kabupaten yang merupakan sentra pertanaman padi seperti di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Dimana kedua Kabupaten ini menyumbangkan hampir 70 persen produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Tengah dalam setahun melalui padi sawah;
2. Adanya dukungan program teknis yang dilaksanakan di kedua Kabupaten ini yang memberikan efek meningkatnya produksi padi sawah meskipun terjadi penurunan produktivitas padi di beberapa Kabupaten namun hal tersebut masih dapat tertutupi oleh produktivitas padi di Kabupaten ini;

Analisis penyebab meningkatnya produktivitas jagung :

1. Adanya dukungan program teknis dari Pemerintah di tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 yang bersumber dari dana APBD dan dibantu dana APBN berupa bantuan benih, pupuk dan pestisida di Kalimantan Tengah pada Sub Round (SR) I dan II yang mampu meningkatkan produktivitas jagung.

Analisis penyebab menurunnya produktivitas kedelai :

1. Terjadinya penurunan produktivitas kedelai di daerah sentra kedelai yaitu Kabupaten Pulang Pisau antara lain di Kecamatan Belanti dan Maliku yang terkena banjir yang merendam tanaman kedelai;
2. Adanya serangan hama ulat grayak di Kabupaten Pulang Pisau

Rekomendasi solusi :

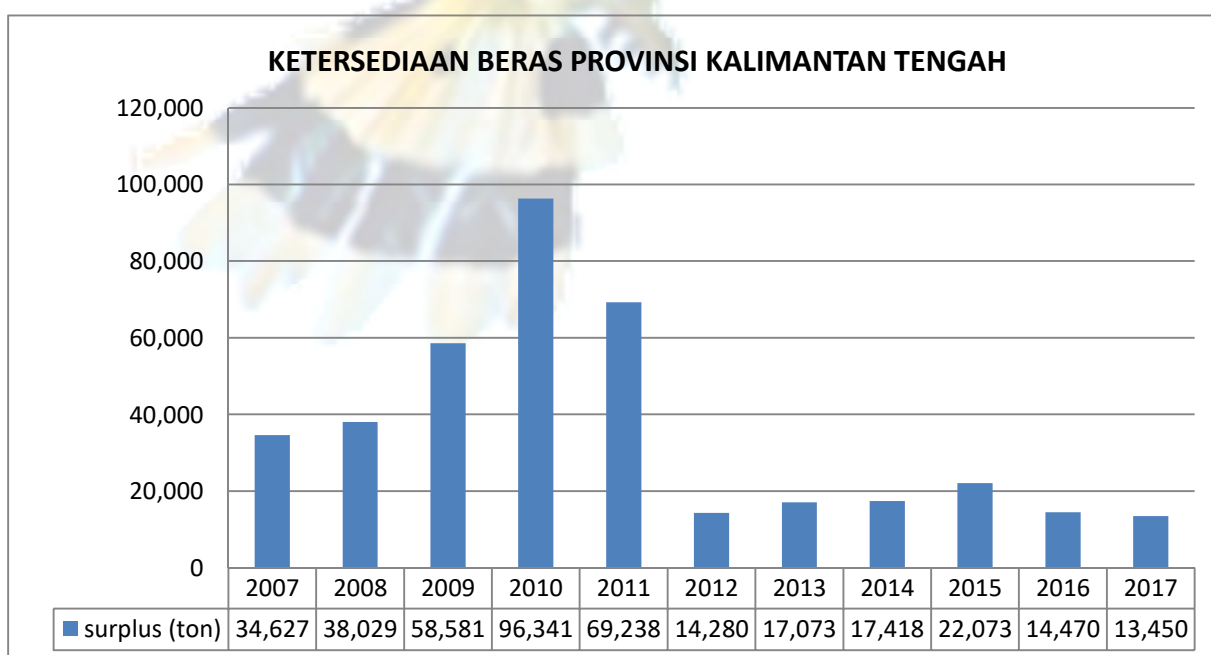
1. Menggunakan varietas unggul yang tahan akan serangan hama dan tahan dalam kondisi iklim yang lembab;
2. Pengaturan pengairan di sekeliling lokasi pertanaman agar tanaman tidak tergenang.



Hasil yang dapat dirasakan dari keberhasilan peningkatan produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Tengah telah membawa Provinsi ini mengalami surplus beras selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dari tahun 2007 sampai tahun 2017 guna memenuhi kebutuhan akan beras di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung swasembada beras secara Nasional.

No.	Tahun	Surplus/Defisit (Ton)	Keterangan
1.	2007	34.627	Beras
2.	2008	38.029	Beras
3.	2009	58.581	Beras
4.	2010	96.341	Beras
5.	2011	69.238	Beras
6.	2012	142.805	Beras
7.	2013	170.732	Beras
8.	2014	174.185	Beras
9.	2015	220.731	Beras
10.	2016	144.709	Beras
11.	2017	134.500	Beras

Tabel 3.17. Perkembangan Ketersediaan Beras Provinsi Kalimantan Tengah



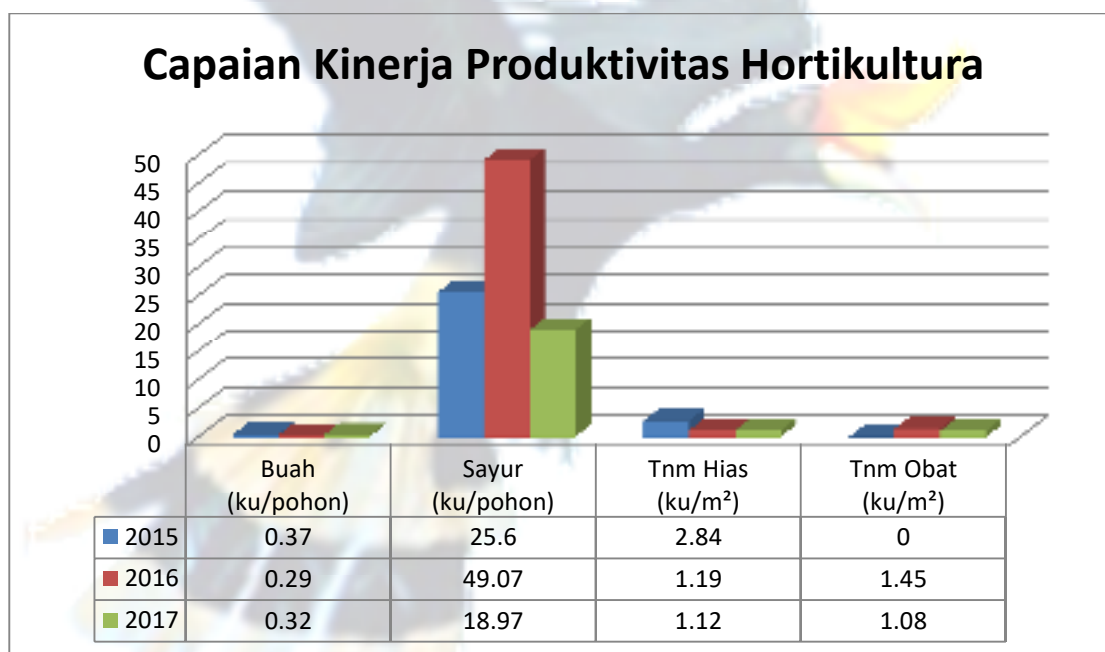
Gambar 3.13. Perkembangan Ketersediaan Beras



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6 (4*100/3)
Produktivitas padi	Kw/Ha	29,01	37,34	31,54	84,47
- Padi Sawah	Kw/Ha	32,13	41,58	34,18	82,20
- Padi Ladang	Kw/Ha	21,48	25,59	21,71	84,84
- Jagung	Kw/Ha	37,00	34,74	44,60	128,38
- Kedelai	Kw/Ha	13,79	12,79	12,33	96,40
- Kacang Tanah	Kw/Ha	11,44	12,03	11,73	97,51
- Kacang Hijau	Kw.Ha	8,68	8,77	9,09	103,65
- Ubi Kayu	Kw/Ha	246,69	160,82	343,91	213,85
- Ubi Jalar	Kw/Ha	100,98	97,94	108,67	110,96
Produktivitas Tanaman Hortikultura					
- Buah-Buahan	Ku/Pohon	0,29	0,34	0,32	86,37
- Sayur	Ku/Ha	49,07	28,58	18,97	66,36
- Tanaman Hias	Tangkai/m2	1,19	2,81	1,12	39,71
- Tanaman Obat	Kg/m2	1,45	1,93	1,08	52,14

Tabel 3.18. Capaian Indikator Pemerintah IV.a

Memperhatikan data diatas terlihat untuk produktivitas buah-buahan pada tahun 2017 masih rendah jika dibandingkan pada tahun 2016.



Gambar 3.14. Perbandingan Produktivitas Tanaman Hortikultura Prov. Kalteng

Analisis penyebab rendahnya produktivitas tanaman hortikultura :

1. Menurunnya luas panen pada tahun 2017;
2. Pergeseran pola curah hujan atau musim yang mempengaruhi sumber daya dan merubah sistem hidrologi (siklus air) dan sumber daya alam, merusak dan menyebabkan penurunan kualitas lahan.



3. Tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2017 yang menyebabkan banyak lahan pertanian yang tergenang air cukup tinggi, sehingga banyak lahan petani yang ditanami sayuran juga terkena dampaknya, banyak tanaman yang membusuk sebelum dipanen seperti di daerah Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya.
4. Tingginya curah hujan juga menyebabkan rontoknya bunga dan bakal buah yang menyebabkan menurunnya luas panen seperti di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur dan Kapuas.



Gambar 3.15. Panen Perdana Bawang Merah bersama Gubernur Kalimantan Tengah

Rekomendasi solusi :

1. Mengupayakan adanya dukungan program teknis dari Pemerintah yang lebih besar bagi petani baik berupa benih sayuran seperti cabe dan bawang merah ataupun bibit buah-buahan seperti jeruk dan durian yang merupakan komoditas utama hortikultura untuk mendukung meningkatnya luas panennya.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam melakukan penanaman komoditas hortikultura untuk mengantisipasi iklim yang ekstrim seperti mengetahui umur panen, teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan.

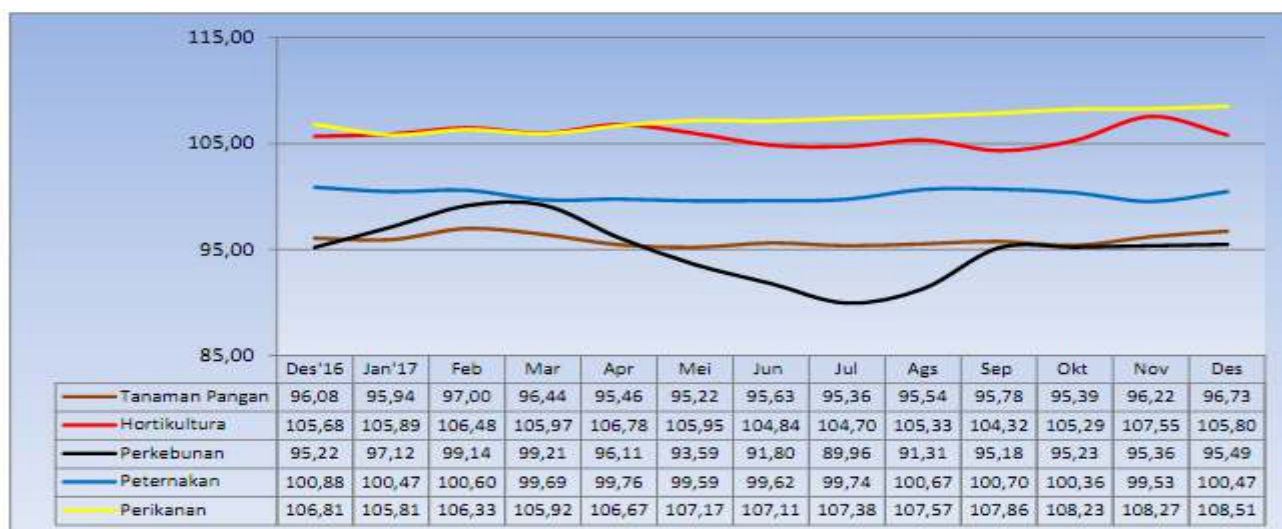
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6 (4*100/3)
Nilai Tukar Petani	NTP	98,81	102,75	99,16	96,51
Nilai Tukar Nelayan	NTN/NTBi	112,47	104,90	108,51	103,44
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	75.903,28	85,173,26	79.271,03	93,07
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	142.466,60	130.787,3	152.789,30	117,06
Peningkatan Produksi Benih Ikan	NTN/NTBi	112,47	104,90	108,51	103,44

Tabel 3.19. Capaian Indikator Pemerintah IV.b

Capaian ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) yang nilainya didapatkan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya. Capaian ini dapat terjadi ketika kenaikan produktivitas pelaku usaha perikanan diikuti pula dengan kenaikan harga produk perikanan yang mengakibatkan kenaikan nilai produksi. Dengan meningkatnya NTN di Kalimantan Tengah maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan meningkat dan karena NTN Kalimantan Tengah lebih dari 100% menandakan bahwa nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus.

Besarnya nilai tukar hasil produksi di tingkat petani produsen, memiliki korelasi positif terhadap perubahan indeks harga pada kelompok komoditas yang dicakup dalam lima subsektor yakni tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, NTP subsektor mengindikasikan seberapa kuat daya tukar hasil produksi pada subsektor tertentu terhadap tingkat harga di pasaran, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi pada masing-masing subsektor tersebut selama periode waktu yang sama.





Gambar 3.16. Nilai Tukar Petani dari Sub Sektor Tahun 2017

a. Subsektor Tanaman Pangan

Nilai tukar subsektor tanaman pangan selama ini relatif rendah yakni selalu di bawah 100,00 persen. Artinya, daya tukar hasil produksi subsektor ini masih belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan harga pasar di level eceran, baik untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun pengeluaran selama proses produksi. Meskipun demikian, nilai tukar sub sektor ini tumbuh 0,51 poin, yakni dari 96,22 persen di November 2017 menjadi 96,73 persen di Desember 2017. Menguatnya nilai tukar dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,74 poin, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang sebesar 1,12 poin. Kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) disebabkan oleh meningkatnya indeks harga kelompok tanaman padi (1,83 poin) dan palawija (0,16 poin) dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) didominasi oleh meningkatnya indeks harga konsumsi rumah tangga atau Konsumsi Rumah Tangga (1,32 poin) dan indeks kelompok BPPBM (0,24 poin).

b. Subsektor Hortikultura

Dibandingkan bulan sebelumnya, terjadi penurunan nilai tukar subsektor hortikultura sebesar 1,75 poin. Penurunan nilai tukar terjadi sebagai dampak dari penurunan (It) sebesar 0,99 poin namun



indeks harga yang dibayar petani (Ib) meningkat sebesar 1,11 poin. Penurunan indeks harga yang diterima petani (It) selama Desember 2017 disebabkan oleh merosotnya indeks harga kelompok tanaman obat (2,73 poin) dan buah-buahan (2,20 poin). Adapun kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dipengaruhi oleh kombinasi dari kenaikan indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga (1,30 poin) dan indeks kelompok BPPBM (0,04 poin).

c. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat

Nilai tukar subsektor tanaman perkebunan rakyat merupakan yang terendah dibandingkan subsektor lainnya. Selama Desember 2017, nilai tukarnya hanya sebesar 95,49 persen meskipun sedikit meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 95,36 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas karet dan sawit selama ini. Menguatnya indeks harga pada kelompok subsektor ini menyebabkan terjadi peningkatan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,17 poin. Namun demikian, indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami peningkatan sebesar 1,06 poin yang disebabkan oleh kenaikan indeks harga kelompok Konsumsi Rumah Tangga (1,31 poin).

d. Subsektor Peternakan

Selama Desember 2017, nilai tukar subsektor peternakan sebesar 100,47 persen atau meningkat 0,94 poin dibandingkan November 2017 yang sebesar 99,53 persen. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sebesar 2,00 poin, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang sebesar 0,85 poin. Kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga komoditas pada kelompok tanaman ternak besar (2,76 poin), unggas (2,06 poin), hasil ternak (1,73 poin), dan ternak kecil (1,26 poin). Kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) disebabkan oleh meningkatnya indeks harga



kelompok Konsumsi Rumah Tangga (1,23 poin) dan kelompok BPPBM (0,11 poin).

e. Subsektor Perikanan

Dibandingkan subsektor lainnya, capaian nilai tukar subsektor perikanan merupakan yang tertinggi yakni sebesar 108,51 persen selama Desember 2017. Kontribusi nilai tukar terutama berasal dari perikanan tangkap yang mencapai 114,11 persen dan perikanan budidaya sebesar 97,93 persen. Selama ini, nilai tukar subsektor perikanan tangkap juga disebut sebagai Nilai Tukar Nelayan (NTN). Peningkatan nilai tukar subsektor perikanan sebesar 0,24 poin, secara keseluruhan dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok perikanan tangkap (0,58 poin) dan budidaya (1,44 poin).

1) Perikanan Tangkap

Nilai tukar nelayan perikanan tangkap selama Desember 2017 mencapai 114,11 persen atau tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Secara umum, nilai tukar subsektor ini dipengaruhi oleh selisih tipis antara kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) (0,58 poin) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) (0,50 poin). Kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) disebabkan oleh meningkatnya indeks harga perikanan tangkap di laut (0,64 poin) dan perairan umum (0,45 poin). Sementara itu, kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) terjadi sebagai dampak dari meningkatnya indeks harga kelompok Konsumsi Rumah Tangga (0,84 poin).

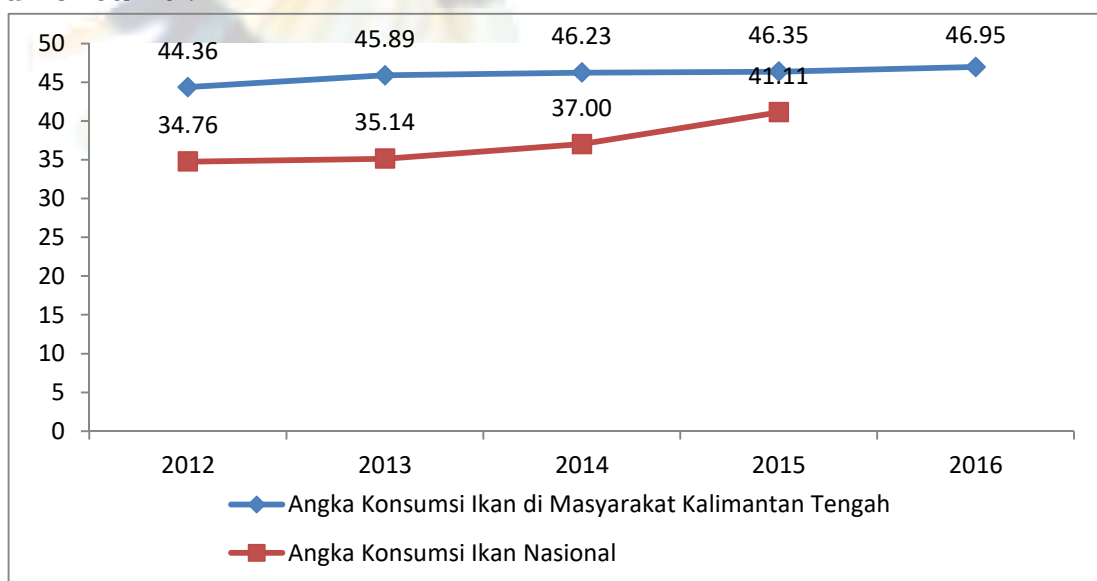
2) Perikanan Budidaya

Nilai tukar perikanan budidaya relatif lebih rendah dibandingkan perikanan tangkap. Meskipun perikanan tangkap relatif lebih rentan terhadap cuaca dan musim, namun dianggap lebih menguntungkan dibandingkan perikanan budidaya. Kendati nilai tukar perikanan budidaya masih di bawah 100,00



persen, namun terjadi pertumbuhan sebesar 0,71 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian indeks harga yang diterima petani (It) pada perikanan budidaya cukup tinggi yakni 122,74 persen, namun diikuti oleh lebih tingginya indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mencapai 125,34 persen. Kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) berasal dari meningkatnya indeks harga perikanan budidaya air tawar (1,55poin), sedangkan harga perikanan budidaya air payau sama dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga kelompok Konsumsi Rumah Tangga (0,87poin) dan BPPBM (0,12 poin).

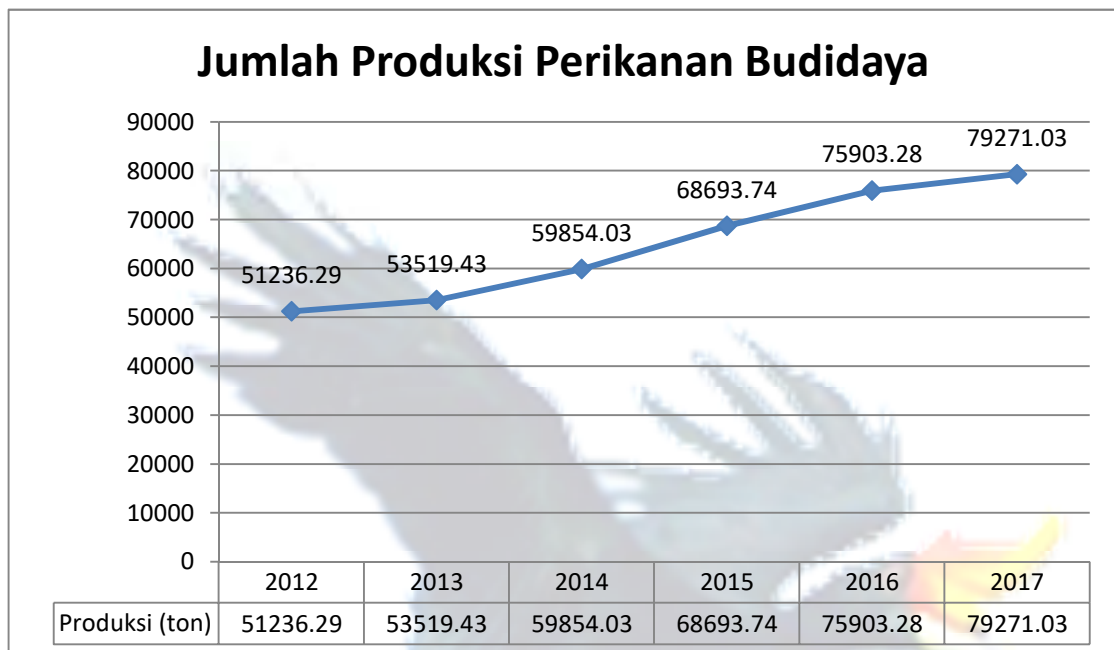
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disebabkan karena permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sangat tinggi. Disamping nilai gizi yang terkandung dalam ikan tersebut sangat berguna bagi kesehatan, harga ikan di pasaran yang masih terjangkau apabila dibandingkan dengan harga daging yang lebih tinggi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan protein bagi keluarga, masyarakat Kalimantan Tengah lebih memilih ikan untuk dikonsumsi.



Gambar 3.17. Perbandingan Angka Konsumsi Ikan di Kalimantan Tengah



Capaian ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data tahunan statistik sejak tahun 2012 hingga 2016 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 10,39%.



Gambar 3.18. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Secara Umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Perluasan kawasan dan budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan risiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
2. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
3. Masih cukup rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam

mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

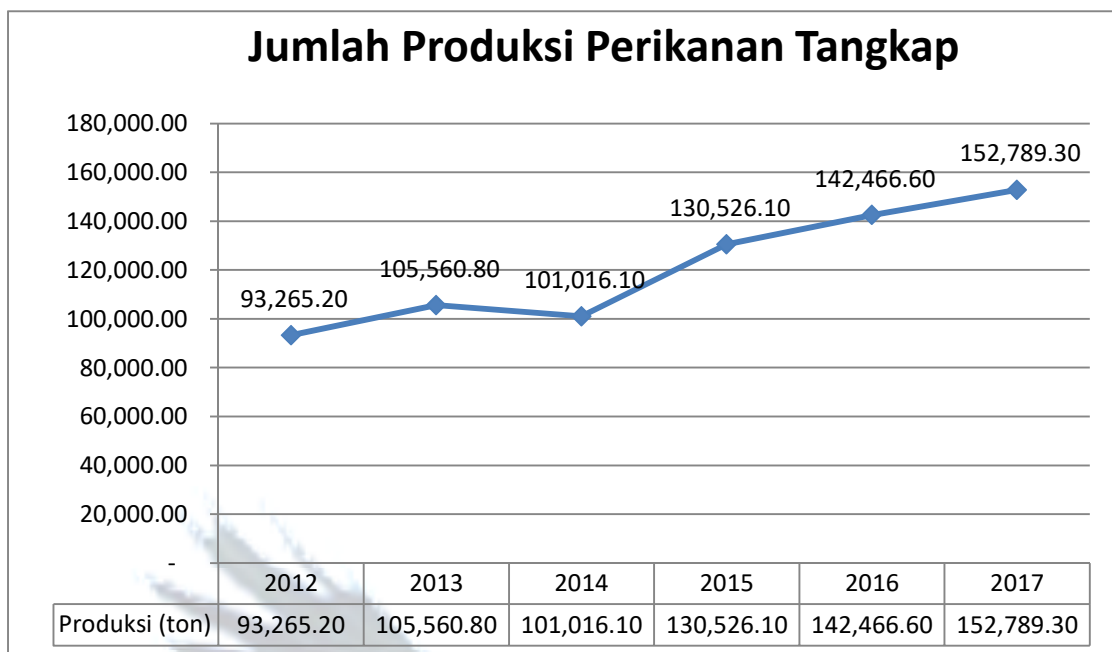
Rekomendasi solusi :

1. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui pilot project kelompok binaan pembudidaya handal;
2. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya;
3. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
4. Jalinan intensif kerjasama Pemerintah Daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.

Capaian Produksi Perikanan Tangkap

Capaian ini berdasarkan pada peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dengan 8 (delapan) kegiatan pokok. Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari tahun 2012 – 2016, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 11,81 persen.





Gambar 3.19. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Isu Permasalahan :

1. Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hamper tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalaupun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh. Selain itu, pelabuhan perikanan masih belum mampu menjadi sentra aktifitas nelayan, dikarenakan masih belum lengkapnya kebutuhan nelayan pada areal pelabuhan;

3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumber daya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan; dan
4. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.

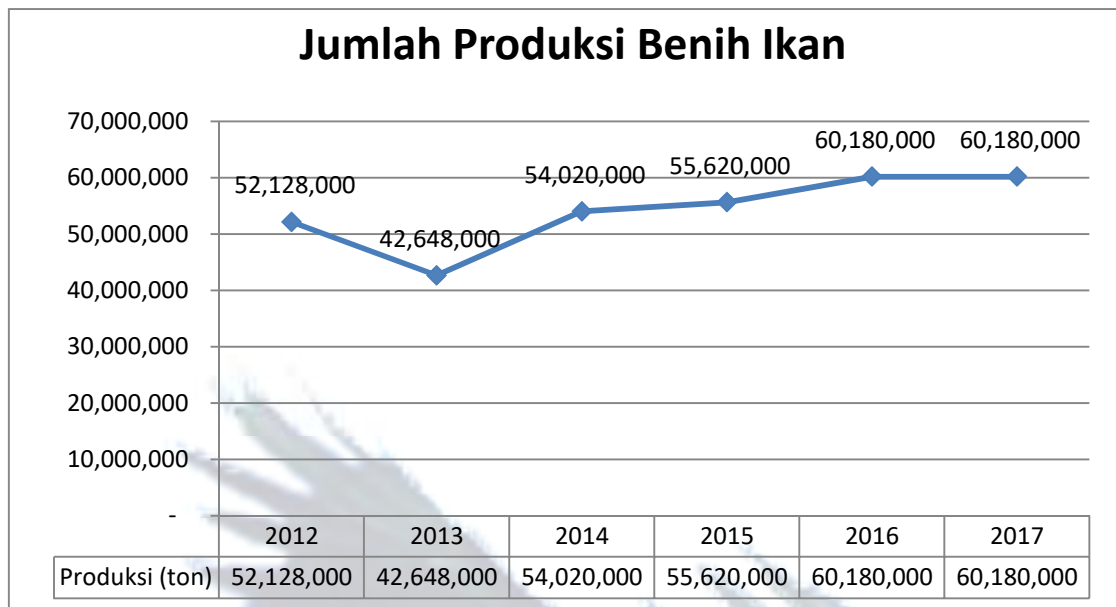
Rekomendasi Solusi :

1. Optimalisasi fungsi pelabuhan-pelabuhan perikanan di Kalteng. Pelabuhan perikanan memegang peranan penting pada sector perikanan tangkap di laut. Ketersediaan kebutuhan nelayan dan kewajiban pengurusan dokumen kapal dan berlayar pada pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap nelayan. Jika hal ini dimaksimalkan, maka penerapan kebijakan pemerintah, data base penangkapan, dan pengelolaan perikanan tangkap laut dapat dilaksanakan melalui fungsi pelabuhan perikanan;
2. Menggerakkan fungsi pengelolaan perijinan seirama dengan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat yang teridentifikasi kurang dalam perijinan dapat terlayani segera.

Capaian Produksi Benih Ikan

Capaian ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang mampu dihasilkan selama jangka waktu 1 tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya dengan 5 (lima) kegiatan pokok. Berdasarkan data tahunan statistic, sejak tahun 2012 – 2016 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi benih perikanan budidaya sebesar 18,11 persen.





Gambar 3.20. Perbandingan Jumlah Produksi Benih Ikan

Isu Permasalahan :

1. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan risiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
2. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
3. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
4. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya ikan dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan



khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Rekomendasi Solusi :

1. Optimalisasi fungsi UPT perbenihan yang dimiliki Pemerintah Daerah (baik Kabupaten/Kota), melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada, peningkatan keberadaan sarpras pendukung, dan juga kemampuan alih teknologi melalui pembinaan kepada UPR yang berada di sekitar dan menjadi wilayah kerjanya.
2. Dinas dapat melakukan kerjasama dengan provinsi tetangga/daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai penyuplai benih ke Kalteng, dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas benih yang masuk sembari menyiapkan kemampuan dalam daerah dalam menyediakan benih;
3. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR);
4. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
5. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya; dan
6. Jalinan intensif kerjasama Pemerintah Daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.



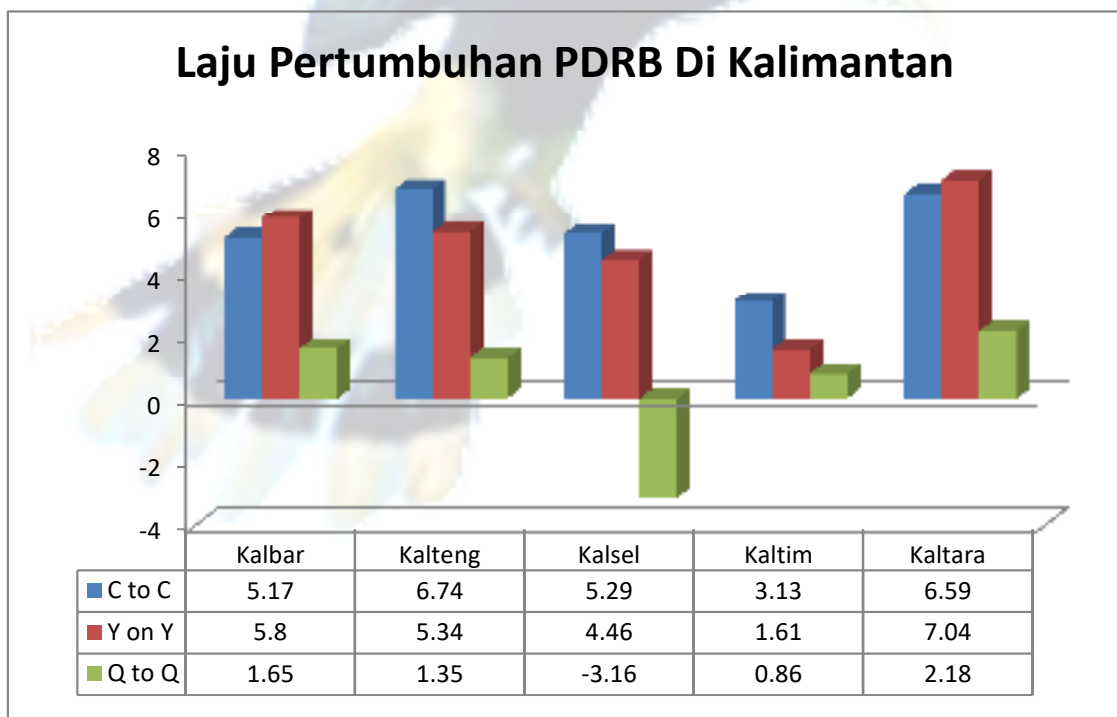
SASARAN V

Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
5.	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam Pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,98	13	11,17	85,92	15	74,47
	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	6,36	6,5	6,74	103,69	7,5	89,87
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,26 (Sept 2017)	100,75	4,3	77,67

Tabel 3.20. Capaian Indikator Pembangunan V

Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan IV-2017 mengalami pertumbuhan tertinggi di regional Kalimantan. Namun untuk pertumbuhan *y-on-y* dan *q to q*, perekonomian Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan tertinggi.



Gambar 3.21. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan

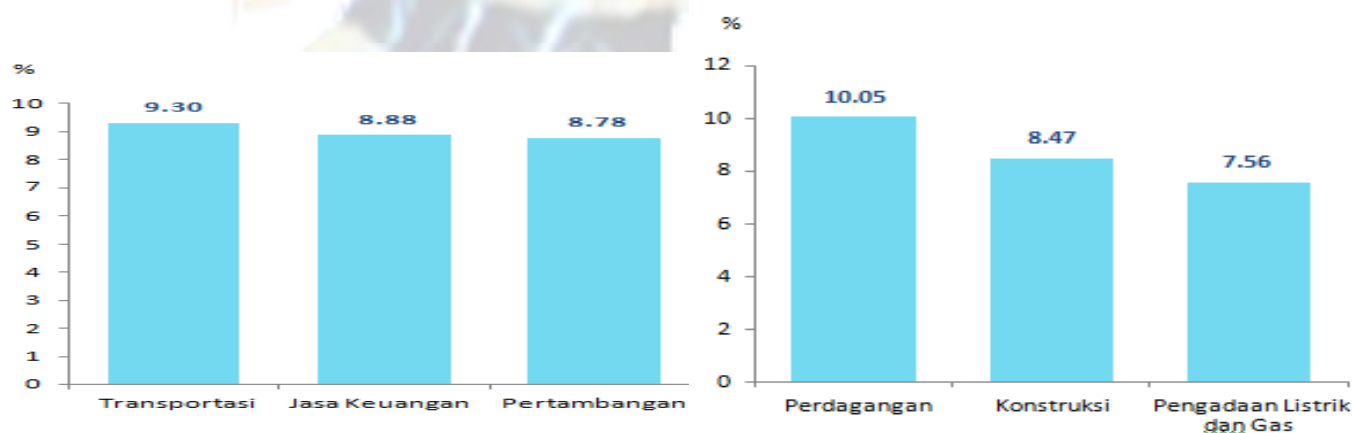


Wilayah	PDRB (miliar rupiah)		Laju Pertumbuhan (persen)			Kontribusi Terhadap Pulau (persen)	Kontribusi Terhadap 34 Provinsi (persen)
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010	c to c	y on y	q to q		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kalimantan Barat	46.435,5	32.217,1	5,17	5,80	1,55	15,82	1,30
Kalimantan Tengah	32.785,2	22.841,1	6,74	5,84	1,35	11,17	0,92
Kalimantan Selatan	41.101,4	31.002,3	5,29	4,16	-3,16	14,01	1,15
Kalimantan Timur	152.631,0	114.064,0	3,13	1,51	0,86	52,01	4,28
Kalimantan Utara	20.496,8	14.055,5	6,59	7,04	2,60	6,58	0,57
KALIMANTAN	293.450,9	214.194,2	4,33	3,37	0,54	100,00	8,22

Tabel 3.21. Laju Pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan Menurut Provinsi Triwulan IV 2017

Struktur perekonomian Kalimantan triwulan IV-2017 secara spasial didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 52,01 persen. Kalimantan Tengah memiliki kontribusi sebesar 11,17 persen.

Perekonomian Kalimantan Tengah Tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp126.176,1 miliar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp89.565,1 miliar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV-2017 (*c-to-c*) tumbuh 6,74 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh seluruh kategori. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,30persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan didorong oleh hampir semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor sebesar 11,52 persen.



Gambar 3.22. Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha di Kalimantan Tengah 2017



Tabel 3.22. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23 015,5	24 548,4	26 121,3	17 031,9	17 691,0	18 457,5
B.	Pertambangan dan Penggalan	10 855,4	12 165,2	14 433,0	12 654,6	13 605,3	14 799,9
C.	Industri Pengolahan	16 131,3	18 362,7	21 038,4	11 976,4	12 865,9	13 971,9
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	72,9	82,4	98,2	61,9	68,3	72,3
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	96,6	106,4	114,6	65,6	68,5	68,5
F.	Konstruksi	9 247,6	10 992,8	12 344,3	6 918,5	7 459,5	7 853,8
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11 720,6	13 281,6	15 418,6	8 712,5	9 327,1	10 123,3
H.	Transportasi dan Pergudangan	6 637,6	7 583,4	8 854,3	4 735,1	5 186,8	5 668,9
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 879,0	2 194,7	2 407,6	1 321,5	1 430,4	1 510,4
J.	Informasi dan Komunikasi	1 016,0	1 096,8	1 208,4	937,6	996,0	1 059,6
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3 247,6	3 616,9	4 133,7	2 491,9	2 673,1	2 910,6
L.	Real Estat	2 124,8	2 385,1	2 679,3	1 572,1	1 656,3	1 726,6
M,N.	Jasa Perusahaan	38,4	42,5	48,5	29,0	30,8	32,4
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6 363,5	6 949,6	7 819,8	4 827,3	4 955,5	5 164,1
P.	Jasa Pendidikan	4 707,8	5 386,8	5 777,3	3 436,1	3 650,8	3 786,7
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 872,5	2 157,6	2 386,0	1 362,3	1 435,8	1 516,8
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1 036,5	1 186,7	1 292,8	756,7	808,4	841,7
PDRB		100 063,5	112 139,5	126 176,1	78 891,0	83 909,5	89 565,1

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2017 mencapai 137.884 orang (5,26 persen), bertambah 421 orang (0,10 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang berjumlah 137.463 orang (5,36persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2016–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 7.722 orang (0,52 persen) sedangkan daerah perdesaan berkurang 7.301 orang (0,42 persen).



Tabel 3.23. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Daerah)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2012	32.977	117.775	150.752	4,25	7,64	6,51
September 2012	33.032	112.050	145.082	4,21	7,19	6,19
Maret 2013	34.113	106.483	140.596	4,30	6,75	5,93
September 2013	47.023	102.361	149.384	5,80	6,45	6,23
Maret 2014	40.779	105.545	146.324	4,98	6,57	6,03
September 2014	39.452	109.373	148.825	4,75	6,74	6,07
Maret 2015	41.323	106.377	147.700	4,86	6,50	5,94
September 2015	48.723	99.406	148.129	5,68	6,02	5,91
Maret 2016	41.069	102.416	143.485	4,60	6,23	5,66
September 2016	40.615	96.848	137.463	4,49	5,83	5,36
Maret 2017	42.840	96.320	139.160	4,59	5,81	5,37
September 2017	48.337	89.547	137.884	5,01	5,41	5,26

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 6,51 persen hingga pada tahun 2017 menurun hingga mencapai angka 5,26 persen.

Gambar 3.23. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah 2012 - 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah



Tabel 3.24. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Kalimantan

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalimantan Barat	88.887	304.922	388.808	5,25	9,09	7,86
Kalimantan Tengah	48.337	89.547	137.884	5,01	5,41	5,26
Kalimantan Selatan	66.211	128.346	194.557	3,59	5,60	4,70
Kalimantan Timur	102.392	116.277	218.668	4,27	9,74	6,08
Kalimantan Utara	21.752	26.752	48.526	5,39	9,14	6,96

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Kalimantan pada September 2017 tampak bahwa persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,86 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,70 persen. Dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 388.808 orang, sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Provinsi Kalimantan Utara hanya berjumlah 48.526 orang.

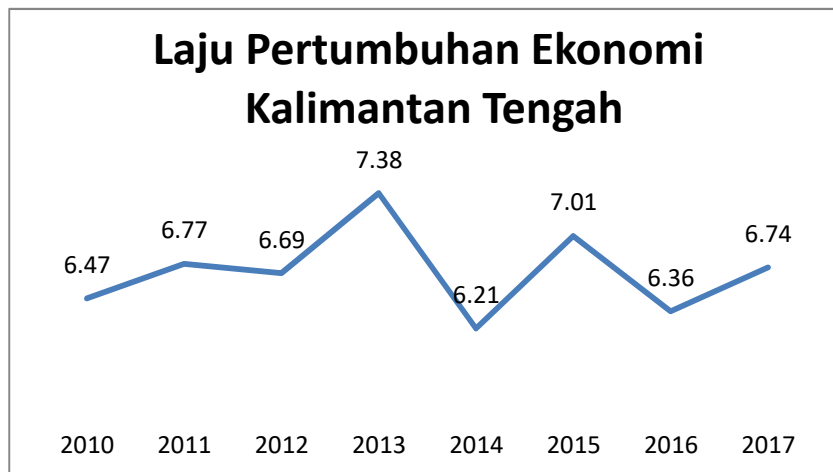
Tabel 3.25. Sasaran Tingkat Kemiskinan Nasional

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019					
Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sumatera	10.2	9.6	8.8	8.0	7.3
Jawa-Bali	9.9	9.3	8.6	7.9	7.1
Nusa Tenggara	17.7	16.4	15.1	13.8	12.5
Kalimantan	6.3	5.9	5.4	4.9	4.4
Sulawesi	10.7	9.9	9.1	8.3	7.6
Maluku	13.9	13.1	12.0	11.0	9.9
Papua	29.8	27.4	25.1	22.8	20.6

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

Jika dibandingkan dengan sasaran nasional, target tingkat kemiskinan pada tahun 2017 untuk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai target yang terpenuhi.





Gambar 3.24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun

Isu Permasalahan :

Dalam skala Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian memang berkembang dari tahun ke tahun, namun perlu digaris bawahi terkait pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wilayah regional administrasi masih kurang efisien dalam pergerakan roda perekonomian wilayah terutama daerah terpencil/terpelosok. Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan yang menyebabkan secara kumulatif pembangunan daerah di daerah berjalan tidak seimbang.

Solusi :

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui program nasional dan daerah seperti Program Beras Sejahtera (RASTERA), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jamkesda yang dialokasikan di setiap Kabupaten/Kota serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada masyarakat miskin di wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan ekonominya.

SASARAN VI

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Tabel 3.26. Capaian Indikator Pembangunan VI

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3		4	5 = (4/3*100)	6	7 = (4/6*100)
6.	Laju Inflasi (%)	2,11	4,4-4,5	3,18	127,73	3,4	106,47
	PDRB perkapita (Juta Rp.)	44,1	43,54	44,1 (2016)	101,29	52,67	83,73

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Tabel 3.27. Laju Inflasi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2017

Wilayah Inflasi	Inflasi (Persen)											
	2016											
	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des
Kalimantan Tengah	0.36	-0.42	-0.15	-0.35	0.17	0.81	0.30	0.27	-0.09	-0.44	0.81	2.11
Sampit	0.70	-0.44	-0.34	-0.46	0.42	0.65	0.49	0.56	-0.46	-0.63	1.15	2.46
Palangka Raya	0.17	-0.41	-0.04	-0.29	0.02	0.91	0.20	0.12	0.11	-0.34	0.62	1.91

Wilayah Inflasi	Inflasi (Persen)											
	2017											
	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des
Kalimantan Tengah	0,87	1,15	1,73	1,91	2,27	3,23	3,17	2,85	2,58	2,33	2,51	3,18
Sampit	0,91	1,18	2,11	2,24	2,26	3,06	3,65	2,52	2,23	2,36	2,66	3,29
Palangka Raya	0,85	1,13	1,52	1,73	2,27	3,32	2,91	3,03	2,78	2,31	2,42	3,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2017



Kota	Indeks Harga Konsumen (IHK)			Inflasi/ Deflasi Des 2017(%)	Inflasi Tahun Kalender 2017 (%)	Inflasi Tahun ke Tahun (%)
	Des 2016	Nov 2017	Des 2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pontianak	134,80	139,31	140,00	0,50	3,86	3,86
2. Singkawang	125,54	130,99	132,11	0,86	5,23	5,23
3. Sampit	126,99	130,37	131,17	0,61	3,29	3,29
4. Palangka Raya	123,35	126,34	127,19	0,67	3,11	3,11
5. Tanjung	127,47	128,50	130,53	1,58	2,40	2,40
6. Banjarmasin	126,28	130,13	131,11	0,75	3,82	3,82
7. Balikpapan	131,58	132,94	134,81	1,41	2,45	2,45
8. Samarinda	128,83	132,61	133,58	0,73	3,69	3,69
9. Tarakan	136,60	139,17	140,38	0,87	2,77	2,77

Tabel 3.28. Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota IHK di Wilayah Kalimantan

Stabilnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 3,11 persen dan Sampit sebesar 3,29 persen pada Desember 2017. Kedua wilayah tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Jika dilihat dari data *seriesnya*, maka inflasi kedua kota tersebut tidak bisa dibandingkan dan diprediksi karena tingkat fluktuatif yang cukup signifikan dan keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri sesuai pembentukan kondisi pasar di masyarakat.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menuju suatu kestabilan harga dimana laju inflasi berada pada tingkatan normal di kisaran ± 6 persen. Laju inflasi pada tahun 2017 mencapai 3,18 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,11 persen, walaupun demikian inflasi Kalimantan Tengah bisa dikatakan terkendali.



Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi/Deflasi (%)	
	Palangka Raya	Sampit
(1)	(2)	(3)
Umum	0,67	0,61
Bahan Makanan	0,51	0,48
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,02	0,06
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,00	0,02
Sandang	0,07	0,01
Kesehatan	0,00	-0,00
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	-0,01	-0,00
Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,08	0,04

Tabel 3.29. Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi/Deflasi Tahun 2017

Isu Permasalahan :

1. Struktural di sektor riil yang menimbulkan keraguan. Tantangan pertama, yakni terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri terutama produktivitas yang rendah luas lahan;
2. Permasalahan struktural terkait nilai tukar rupiah yang masih bergejolak tinggi. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku;
3. Produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi;
4. Ketergantungan energi nasional pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG;
5. Pasar yang tidak efisien. Hal itu tercermin dari tingkat distribusi yang panjang dan didominasi pelaku besar.

Rekomendasi Solusi :

1. Diperlukan kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi. Melalui implementasi pengembangan pusat harga nasional sehingga bisa diketahui harga yang tinggi dan penyesuaian dengan harga yang murah;
2. Pembenahan produksi dalam daerah, untuk memenuhi tingkat kebutuhan, supaya jangan sampai terjadi kekurangan stok yang dapat memicu inflasi;
3. Menghimbau masyarakat Kalimantan untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan menggunakan produk dalam negeri;



4. Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.

Tabel 3.30. Perbandingan PDRB Per Kapita Per Tahun

Uraian	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
- Nilai (Juta rupiah)	34,4	36,8	40,1	44,1
- Nilai (US\$)	3.284,6	3.104,3	3.000,6	3.327,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2016

Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten. Perekonomian Kalimantan Tengah Tahun 2017 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 126.176,1 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 89.565,1 miliar. Untuk PDRB perkapita Tahun 2017 data masih belum tersedia.

Tabel 3.31. Proyeksi Target Nasional untuk Kalimantan Tengah

	Perkiraan 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp) *)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000

Sumber : RPJMN 2014-2019



SASARAN VII

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Ekonomi Hijau

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6 = $(4/3 \times 100)$	7	8 = $(4/6 \times 100)$
7.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	21,94	24	20,70	86,25	25,5	81,18

Tabel 3.32. Capaian Indikator Pembangunan VII

Jika dilihat dari Struktur perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2017 didominasi oleh tiga kategori utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,70 persen); Industri Pengolahan (16,67 persen), dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,22 persen).

Gambar 3.25. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Kategori (c to c)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2016

Salah satu indikator tercapainya peningkatan perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan. Target Kinerja Indikator tersebut tercapai sebesar 85% dari target penerimaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target 100% dari Penerimaan PNBP Provinsi Kalimantan Tengah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 750.074.858.987,- dan Dinas Kehutanan

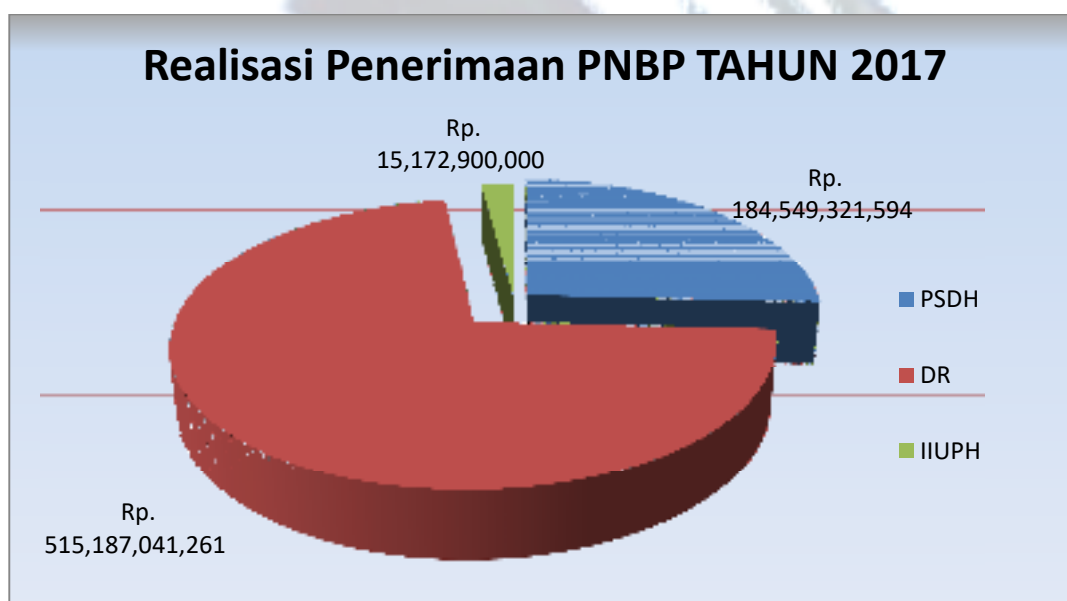


Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 85% atau sebesar Rp.637.563.630,-.

Realisasi Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hutan (IIUPH) yang direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.33. Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PNBP

No	Jenis PNBP	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
1	PSDH	185.639.870.058	184.549.321.594	99,41
2	DR	528.409.738.929	515.187.041.261	97,50
3	IIUPH	36.025.250.000	15.172.900.000	42,12
	Jumlah	750.074.858.058	714.909.262.856	95,31



Gambar 3.26. Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PNBP

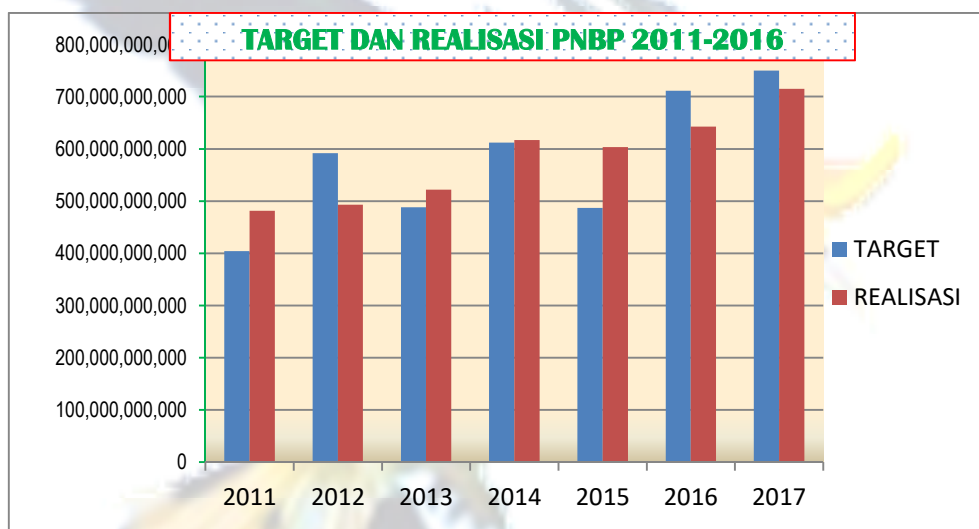
Dari hasil rekapitulasi sebagaimana disajikan pada tabel di atas, total penerimaan PNBP Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 642.464.849.008 atau 90,35% dari target. Data yang dipakai untuk perhitungan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah data rekonsiliasi PSDH/DR Triwulan IV Tahap II Tahun 2016 baik dilaksanakan pada tingkat provinsi Kalimantan Tengah maupun pada Tingkat Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. :

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Penyetoran PNB

Tahun	Target (Rp)	Target %	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2011	404.370.063.660,67	70	481.491.471.706,25	170,10
2012	591.689.842.842,42	80	493.078.053.374,65	104,00
2013	488.068.348.020,00	90	521.854.137.532,79	118,00
2014	612.001.310.441,00	100	616.633.618.908,35	100,76
2015	487.223.387.964,31	100	603.218.262.548,44	123,81
2016	711.045.631.912,00	80	642.464.849.008,00	112,94
2017	750.074.858.058,00	85	714.909.262.856,00	112,13



Gambar 3.27. Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PNB

Secara umum permasalahan terkait adalah :

Belum adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peningkatan pemantauan penyetoran PNB yang bersifat online, seperti perangkat elektronik baik komputer ataupun laptop dan jaringan internet yang stabil untuk memantau penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara kontinyu sehingga data terkini selalu tersedia.

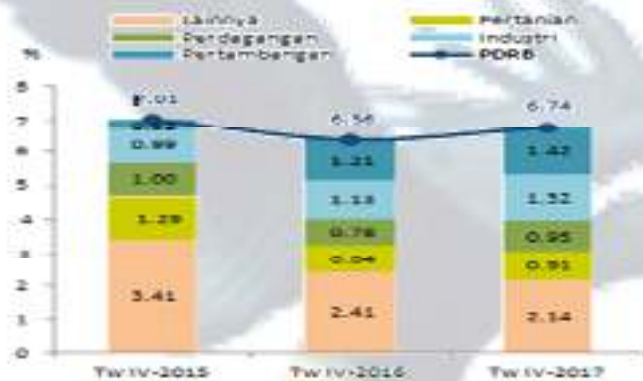
SASARAN VIII

Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.35. Capaian Indikator Pembangunan VIII

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL 2016	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
1	2	3	4	5 = (4/3*100)	6	7 = (4/6*100)
8.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	16,15	16,33	101,11	18	90,72
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,82	106,17	3,50	137,71

Gambar 3.28. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Kategori (y to y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2016

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2017 didominasi oleh tiga kategori utama yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,70 persen); Industri Pengolahan (16,67 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,22 persen).

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor pengolahan Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mencapai Rp. 21,038 trilyun memberikan kontribusi sebesar 3,01 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai Rp. 2.739,40 trilyun pada tahun 2017.

Tabel 3.36. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional



TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2013	1.998,69	11,23	0,56 %
2014	2.215,75	14,31	0,65 %
2015	2.405,40	16,12	0,67 %
2016	2.544,60	18,36	0,72 %
2017	2.739,40	21,04	0,77 %

Bila dilihat dari Laju Pertumbuhan ADHK 2010, Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 8,78 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 8,60 persen dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,54 persen.

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (ADHK 2010)			Distribusi PDRB (ADHB)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,92	3,87	4,33	23,00	21,89	20,70
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	7,51	8,78	10,85	10,85	11,44
C.	Industri Pengolahan	6,51	7,43	8,60	16,12	16,37	16,67
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	30,64	10,34	5,82	0,07	0,07	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,08	4,35	0,12	0,10	0,09	0,09
F.	Konstruksi	10,65	7,82	5,29	9,24	9,80	9,78
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,20	7,05	8,54	11,71	11,84	12,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	12,10	9,54	9,30	6,63	6,76	7,02
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,52	8,24	5,59	1,88	1,96	1,91
J.	Informasi dan Komunikasi	5,24	6,23	6,38	1,02	0,98	0,96
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,18	7,27	8,88	3,25	3,23	3,28
L.	Real Estat	6,69	5,36	4,24	2,12	2,13	2,12
M,N.	Jasa Perusahaan	7,85	6,03	5,45	0,04	0,04	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,80	2,66	4,21	6,36	6,20	6,20
P.	Jasa Pendidikan	8,67	6,25	3,72	4,70	4,80	4,58
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30	5,40	5,64	1,87	1,92	1,89
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	7,57	6,84	4,11	1,04	1,06	1,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,01	6,36	6,74	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.37. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha



Industri pengolahan sendiri adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Industri Pengolahan sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih);
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang);
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang);
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).

Tabel 3.38. Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Industri Pengolahan

No.	Uraian	Industri Pengolahan
1.	Kota Palangka Raya	241
2.	Kabupaten Kapuas	40
3.	Kabupaten Pulang Pisau	4
4.	Kabupaten Katingan	72
5.	Kabupaten Ktw. Timur	128
6.	Kabupaten Gunung Mas	74
7.	Kabupaten Barito Timur	46
8.	Kabupaten Barito Selatan	48
9.	Kabupaten Barito Utara	23
10.	Kabupaten Murung Raya	12
11.	Kabupaten Seruyan	330
12.	Kabupaten Ktw. Barat	190
13.	Kabupaten Lamandau	103
14.	Kabupaten Sukamara	134
Jumlah		1445

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah 2017

Isu Permasalahan :

1. Belum adanya kesadaran dari kabupaten/kota bahwa pendataan yang valid dan *up to date* sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pengembangan IKM;
2. Lemahnya komunikasi dan koordinasi serta belum adanya sinkronisasi antara program/ kegiatan pembangunan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga pelatihan ataupun pembinaan yang



- dilaksanakan di wilayah kabupaten/ kota tidak dapat didukung oleh dana kabupaten/ kota;
3. Peta Panduan atau Roadmap untuk kawasan industri di Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan;
 4. Pengembangan industri melalui pendekatan Klaster, OVOP, Komoditi Potensial/ Kompetensi Inti Daerah dan Industri Kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten/ kota;
 5. Belum optimalnya akurasi data IKM Aneka Industri dan Kerajinan yang ada di daerah kabupaten/ kota;
 6. Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan pasca kegiatan secara menyeluruh;
 7. Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM yang berhubungan dengan pelayanan teknis dan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan;
 8. Masih terbatasnya pengetahuan IKM dalam pengenalan bahan/material logam, sehingga mutu produk yang dihasilkan masih relatif rendah;
 9. Kurangnya pengembangan desain yang dikembangkan oleh IKM terhadap produk yang dihasilkan;
 10. Peserta yang mendapatkan pelatihan/ pembinaan adalah berdasarkan rekomendasi dinas kabupaten/ kota. Kadang ada yang kurang tepat sasaran
 11. IKM makanan dan minuman masih banyak yang belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik.
 12. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam rasa, jenis, bentuk maupun kemasan. Belum adanya diversifikasi bahan baku agro untuk mengganti bahan baku impor;
 13. Kebijakan Pemerintah tentang Pemberian Hibah Barang/Uang dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat , melalui UU Nomor 23



Tahun 2014 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2015, menjadi permasalahan karena KUB yang sudah didata untuk mendapatkan bantuan hibah mesin dan peralatan industri belum siap secara legalitas.



Gambar 3.29. Gubernur H. Sugianto Sabran saat menghadiri stand dagang UMKM

Rekomendasi Solusi :

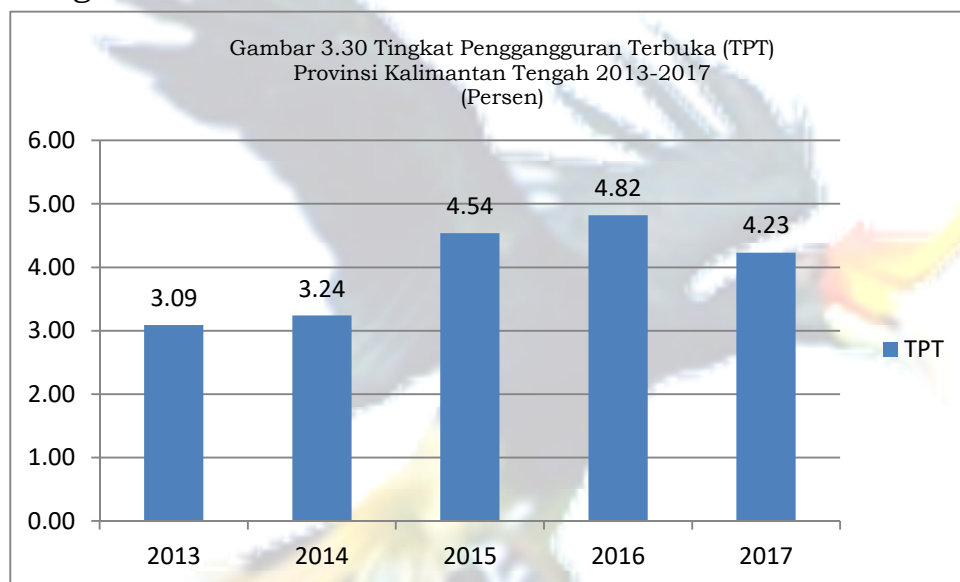
1. Proses pendataan tahun 2017 dilakukan dengan cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten/ kota, serta Badan Pusat Statistik Kalteng;
2. Sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota masih akan terus dilakukan dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten/ Kota untuk memberikan motivasi pada pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung program pengembangan industri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Ataupun sebaliknya Pemerintah Provinsi dapat mendukung kegiatan pengembangan industri yang diprioritaskan oleh kabupaten / kota;
3. Peta panduan/Roadmap untuk kawasan industri di Kalteng perlu disusun agar setiap Pihak yang terkait dapat mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri;



4. Komitmen dalam pengembangan industri melalui pendekatan klaster OVOP, komoditi potensial/ kompetensi inti daerah dan industri kreatif perlu diperkuat lagi baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten / Kota agar target dalam renstra tercapai dengan adanya anggaran yang memadai;
6. Setiap Pelaksana Teknis diarahkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desain produk industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia IKM, revitalisasi alat dan mesin produksi maupun pembuatan prototype produk guna meningkatkan mutu dan daya saing industri;
7. Pada waktu rekrutmen peserta dipersyaratkan syarat minimal peserta yang boleh mengikuti pelatihan;
8. Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota sehingga memiliki persepsi yang sama dalam pembinaan IKM;
9. Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama di sentra sentra hasil pertanian. Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi;
10. Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.



Salah satu masalah utama ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Dimana angka pengangguran ini digambarkan melalui Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) yang merupakan rasio jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka ini merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir bisa dilihat dalam grafik berikut, pada tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang membaik, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,59 persen poin dibanding tahun 2016.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2017

Isu Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam penempatan tenaga kerja adalah masih terbatasnya lowongan kerja dan kurang lancarnya informasi tentang pasar kerja. Sehingga di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan/pengembangan usaha mandiri dan usaha produktif serta meningkatkan pendataan lowongan dan mengefektifkan Bursa Kerja Online (BKOL) dan *Job Fair*

Tabel 3.39
Pencari Kerja yang Ditempatkan di
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Palangka Raya	110	94	204
2	Kobar	42	2	44
3	Kotim	392	282	674
4	Seruyan	1	9	10
5	Sukamara	10	10	20
6	Lamandau	47	16	63
7	Katingan	14	3	17
8	Pulang Pisau	52	23	75
9	Kapuas	69	37	106
10	Gunung Mas	61	59	120
11	Barito Selatan	25	28	53
12	Barito Timur	1.920	49	1.969
13	Barito Utara	25	3	28
14	Murung Raya	1890	210	2.100
	Provinsi Kalteng	4.658	825	5.483

Solusi :

1. Melatih pencari kerja di BLK/LLK sehingga dapat meningkatkan kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja;
2. Pemagangan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ilmu, ketrampilan dan pengalaman kerja;
3. Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) di perusahaan di Kalimantan Tengah;
4. Mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran dengan pembangunan yang berbasis ketenagakerjaan dan pembangunan yang ramah ketenagakerjaan. Pembangunan yang ramah ketenagakerjaan adalah pembangunan yang menciptakan kesempatan kerja yang besar, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
5. Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang antara lain melalui kredit mikro, pengembangan UKM, serta program pengentasan kemiskinan;
6. Peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan;
7. Peningkatan konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja;



SASARAN IX

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6 = (4/3*100)	7	8 = (4/6*100)
9.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Tabel 3.40. Capaian Indikator Pembangunan IX

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menorehkan hasil memuaskan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan pelaksanaan tata kelola APBD 2016.

WTP adalah status tertinggi dalam opini kewajaran pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Opini tersebut disampaikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI pada rapat paripurna istimewa yang digelar di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (2/6/2017).

Penyerahan LHP Provinsi Kalteng ini melengkapi penyerahan LHP pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalteng beberapa hari sebelumnya. Sebanyak 13 Kabupaten/Kota meraih WTP kecuali hanya satu daerah yaitu Barito Selatan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Selain opini BPK, setiap tahun pemeriksaan dan evaluasi akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dengan data diperoleh sebagai berikut :



Persentase Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Jumlah Temuan : 3.855 buah
- b. Jumlah Rekomendasi : 5.741 buah
- c. Status Tindak Lanjut :
 - Selesai sesuai dengan rekomendasi : 4.825 buah (83%)
 - Dalam proses : 140 buah (2%)
 - Belum sesuai : 773 buah (5%)
 - Tidak dapat ditindaklanjuti : -
dengan alasan yang sah

Status tindak lanjut untuk temuan tahun 2017 sebagai berikut :

Sebelum rakor jumlah rekomendasi sebanyak 443 rekomendasi dan setelah rakor jumlah rekomendasi sebanyak 113 rekomendasi.

Isu Permasalahan :

Masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum tuntas disebabkan beberapa hal, seperti :

- a. Adanya Mutasi/Pensiun/Meninggal Dunia Auditor sehingga kesulitan dalam proses penyelesaian tindak lanjut;
- b. Adanya Aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. Aparat/Pejabat yang diperiksa belum memahami bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan.

Solusi :

- a. Dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk temuan yang terkait kerugian keuangan;
- b. Diupayakan menagih secara langsung ke obyek terkait dan dengan membuat surat kepada semua obyek pemeriksaan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan tindak lanjutnya.



SASARAN X

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6 = (4/3*100)	7	8 = (4/6*100)
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	t.a.d	80	74,33	92,91	88	84,47

Tabel 3.41. Capaian Indikator Pembangunan X

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, salah satunya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang salah satunya adalah pelayanan publik, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal yang menjadi perhatian utama atas hasil survei tersebut adalah harus ada



saran perbaikan dari pemberi layanan yang harus disurvei terhadap peningkatan kualitas layanan.

Tabel 3.42. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Tahun

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
Indeks Kepuasan Masyarakat	2013	2014	2015	2016	2017
	79,84	81,26	t.a.d	t.a.d	74,33

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total Interval Konversi Perangkat Daerah Kalimantan Tengah}}{\text{Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang Mengadakan Survei}}$$

No.	PERANGKAT DAERAH	INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1.	RSUD dr. Doris Sylvanus	76,19	B	Baik
2.	RSJ Kalawa Atei	65,79	B	Baik
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,86	A	Sangat Baik
4.	Dinas Perhubungan	71,90	B	Baik
5.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	75,87	B	Baik
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68,96	B	Baik
7.	Badan Keuangan Daerah (SAMSAT)	79,71	B	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat Kalimantan Tengah		74,33	B	Baik

Tabel 3.43. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kalimantan Tengah

Isu Permasalahan :

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka didapat permasalahan umum sebagai berikut :

1. Petugas kurang independen dan belum berpengalaman;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta di dalam pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Metode Survei masih sederhana sehingga hasil yang diperoleh masih belum menggambarkan keseluruhan permasalahan;



4. Belum adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Pengaturan waktu survei yang terburu-buru sehingga tidak efisien.

Rekomendasi Solusi :



Gambar 3.42. Gubernur Kalimantan Tengah saat Pelepasan jemaah haji

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

1. Perlu dikaji ulang penetapan kebijakan dan prioritas upaya perbaikan terhadap Pelayanan Publik khususnya aspek waktu pelayanan;
2. Perlu dibuat perencanaan perbaikan atau rencana aksi berdasarkan skala prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan mengurangi gap antara kualitas dan harapan masyarakat;
3. Melakukan reviu atas Standar Operasional Prosedur untuk disesuaikan dengan kondisi dan peraturan terkini terkait waktu pelayanan dan maklumat pelayanan;
4. Perlu dikaji ulang kebijakan dan perbaikan system atas umpan balik responden baik berupa saran maupun keluhan responden pada unsur – unsur kepuasan masyarakat.

SASARAN XI

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3		4	5 = (4/3*100)	6	7 = (4/6*100)
11.	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	56,80	65	56,80 (2016)	87,38	85	66,82

Tabel 3.44. Capaian Indikator Pembangunan XI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 -2019, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 56,80 dengan kategori CC.



Isu Permasalahan :

Reformasi Birokrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017. Dalam usaha mencapai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Tabel 3.45. Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Tengah

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2015	2016
I.	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,31	2,50
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	2,71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,99	3,16
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,41	3,34
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,37	6,04
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,88
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	2,66	4,11
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,03	2,99
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	21,88	28,72
II.	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		8,50
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00		4,44
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		4,81
4.	Opini BPK	3,00		3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00		7,33
Total Komponen Hasil (B)		40,00		28,08
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00		56,80



Solusi :

Pemerintah Provinsi berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan berusaha menyoroti permasalahan yang terjadi dengan analisa data dan secara perlahan-lahan memperbaiki dari dalam. Langkah perbaikan yang telah diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Opini BPK, pentingnya opini atau hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setiap tahun, telah dibuktikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Anggaran		
		2014	2015	2016
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP

Tabel 3.46. Opini BPK Per Tahun

2. Indeks Demokrasi Indonesia, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Tingkat pencapaiannya diukur melalui perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Instution of Democracy*). Penilaian itu sendiri diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang



diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 74,77 dalam skala indeks 0 sampai 100, angka ini naik 1,31 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2015 yang hanya mencapai 73,46. Tingkat demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut secara umum masih dalam kategori “sedang”.

Provinsi Kalimantan Tengah	Tahun 2015	Tahun 2016			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
	73,46	74,77	84,98	70,66	68,43

Tabel 3.47. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-



masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Provinsi	IDI 2015				IDI 2016			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Kebebasan Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Kebebasan Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	67,78	74,81	63,96	64,97	72,48	92,92	63,94	60,33
Sumatera Utara	69,01	82,02	62,17	63,52	67,37	82,71	62,29	56,13
Sumatera Barat	67,46	52,99	69,77	82,01	54,41	51,01	54,33	58,82
Riau	65,83	66,46	66,61	63,80	71,89	71,78	77,98	82,34
Jambi	70,66	75,89	62,12	77,72	68,89	84,39	65,63	54,58
Sumatera Selatan	79,81	96,06	78,79	61,00	80,95	91,17	81,94	66,53
Bengkulu	73,60	78,50	68,45	75,61	74,23	85,14	63,84	77,01
Lampung	65,95	71,99	63,19	62,74	61,00	60,49	59,32	64,31
Kep. Bangka Belitung	72,31	81,21	66,95	69,60	83,00	87,85	81,09	80,20
Kepulauan Riau	70,26	80,14	65,01	66,13	72,84	85,43	71,28	59,48
DKI Jakarta	85,32	89,44	83,19	83,26	70,85	81,11	67,54	63,19
Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	51,07	66,82	73,07	72,34	48,79
Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	61,48	66,71	66,06	67,24	66,69
DI Yogyakarta	83,19	90,41	77,98	82,38	85,58	90,00	81,59	86,37
Jawa Timur	76,90	85,24	87,44	81,39	72,34	73,73	74,49	63,63
Banten	68,46	74,28	63,72	68,66	71,36	63,47	68,30	60,99
Bali	79,83	94,42	77,42	65,31	78,95	96,94	69,60	71,18
Nusa Tenggara Barat	65,08	51,59	61,11	68,36	65,41	65,04	62,08	71,13
Nusa Tenggara Timur	78,47	93,19	71,69	70,73	82,49	96,25	81,68	66,46
Kalimantan Barat	76,40	96,81	65,57	67,95	75,28	83,29	75,70	64,54
Kalimantan Tengah	73,48	85,07	68,31	67,05	74,77	84,98	70,66	68,63
Kalimantan Selatan	74,76	54,15	85,77	83,17	73,43	61,04	83,58	72,99
Kalimantan Timur	81,24	93,07	82,74	63,99	73,64	78,25	78,35	60,36
Kalimantan Utara	80,16	98,10	83,65	52,05	76,98	100,00	66,84	64,48
Sulawesi Utara	79,40	86,71	77,92	72,53	76,34	96,31	70,42	60,62
Sulawesi Tengah	76,67	94,60	68,85	66,53	72,20	80,39	67,89	68,76
Sulawesi Selatan	67,90	69,38	64,25	71,84	68,53	75,54	61,51	70,86
Sulawesi Tenggara	69,44	91,14	56,95	61,99	71,13	88,07	55,51	74,66
Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81	77,48	82,35	75,54	74,42
Sulawesi Barat	68,25	81,88	61,16	62,37	72,37	82,89	69,02	64,47
Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43	78,20	87,17	76,18	70,13
Maluku Utara	61,52	73,53	61,00	47,25	73,27	92,27	61,79	67,59
Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81	60,35	93,67	38,05	53,85
Papua	37,50	82,72	41,81	50,87	61,02	92,15	41,13	53,45
INDONESIA	72,82	80,30	70,63	66,87	70,09	76,45	70,11	62,05

Tabel 3.48. Indeks Demokrasi Indonesia Nasional Tahun 2016

3. Indeks Kepuasan Masyarakat, telah terealisasi dengan hasil :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
Indeks Kepuasan Masyarakat	2013	2014	2015	2016	2017
	79,84	81,26	t.a.d	t.a.d	77,43

Tabel 3.49. IKM Kalimantan Tengah Per Tahun



4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi, Berdasarkan hasil terakhir evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/380/M.AA.05/2018 tanggal 23 Januari 2018 dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 61,35 atau predikat B, menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel.

Laporan Kinerja	Penilaian	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Kategori
Laporan Kinerja 2015	Penilaian 2016	60,70	CC
Laporan Kinerja 2016	Penilaian 2017	61,21	B
Laporan Kinerja 2017	Penilaian 2018	61,35	B

Tabel 3.50. Laporan Kinerja Kalimantan Tengah Per Tahun

5. Penindakan kasus korupsi, dalam keterkaitan penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN maka diwajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN dan setiap tahun Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan melapor harta kekayaannya walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan perubahan data pejabat yang wajib lapor dikarenakan pensiun ataupun meninggal dunia serta beberapa kali pelantikan pejabat yang terjadi di tahun 2017 dan perubahan sistem pelaporan yang mulai diberlakukan pada tahun 2018 .

Jumlah ASN yang Melaporkan Administrasi LHKPN	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	593	457	506	620	371	218

Tabel 3.51. Wajib Laport LHKPN Per Tahun

6. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diumumkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.



SASARAN XII
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

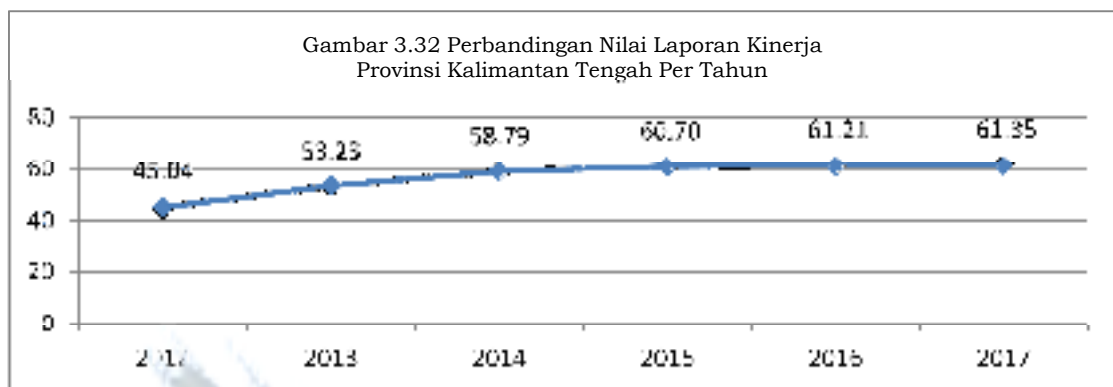
No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3		4	$\frac{5}{4/3 \times 100}$	6	$\frac{7}{4/6 \times 100}$
12.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	B	B (61,35)	100	A	50
	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B	B	B	100	A	50

Tabel 3.52. Capaian Indikator Pembangunan XII

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya dalam mewujudkan profesionalitas birokrasi secara menyeluruh diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih terarah dan tercapainya sesuai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.





Terakhir Laporan Kinerja Hasil pengukuran Kinerja LKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 61,35 atau predikat B. Penilaian tersebut juga berdampak tren positif pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017. Melalui Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Maret s.d. 02 April 2017 terhadap Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2016 diperoleh data sebagai berikut :

KATEGORI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 (4*100/3)
Nilai Kategori = AA > 90 – 100 (Sangat Memuaskan);	SKPD	-	-	-
Nilai Kategori = A > 80 – 90(Memuaskan);	SKPD	-	-	-
Nilai Kategori = BB > 70 – 80 (Sangat Baik);	SKPD	-	-	-
Nilai Kategori = B > 60 – 70 (Baik,Perlu Perbaikan);	SKPD	5	13	100
Nilai Kategori = CC> 50 – 60 (Cukup);	SKPD	25	13	100
Nilai Kategori = C > 30 – 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan);	SKPD	15	6	100
Nilai Kategori = D > 0 – 30 (Sangat Kurang);	SKPD	-	1	-

Tabel 3.53 Capaian Indikator Pemerintah XII

Isu Permasalahan :

- a. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja SKPD tahun sebelumnya belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam pembuatan Laporan di tahun berikutnya;
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja masih ditanggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi pencatatan dan pelaporan dokumen pencapaian target untuk IKU;



- c. Masih terdapat aparaturnya yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan kinerja sehingga dalam memproses/menginput data tidak sesuai aturan yang berlaku.
- d. Perubahan Perangkat Dinas pada tahun 2017 menyebabkan adanya Instansi yang bergabung sehingga Laporan Kinerja menjadi terbengkalai dan tidak terevaluasi secara penuh.

Upaya yang dilaksanakan :

- a. Inspektorat berkoordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dan pelaporan dokumen Laporan Kinerja SKPD;
- b. Inspektorat melakukan konsultasi dan pembinaan terhadap SKPD yang kesulitan dalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pada saat kegiatan evaluasi Laporan Kinerja oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

c.



Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

dapat melaporkan akuntabilitas kinerjanya menggunakan basis web (internet) dimanapun dan kapan saja selama masih terjangkau kawasan internet, sehingga memudahkan dan efektif untuk diimplementasikan di lingkungan instansi pemerintah yang telah memiliki jaringan internet. Dengan domain website www.lkip.kalteng.go.id diharapkan bisa lebih mempersingkat waktu dalam pelaporan kinerja yang mulai diterapkan secara perlahan. Dan segera terintegrasi dengan website utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

SASARAN XIII

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel 3.54. Capaian Indikator Pembangunan XIII

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	$\frac{6}{4/3 \times 100}$	7	$\frac{8}{4/6 \times 100}$
13.	IPM	68,53 (2015)	69,30	69,13 (2016)	99,75	72,50	95,35
	Rata-rata Lama Sekolah	8,03 (2015)	8,50	8,13 (2016)	95,65	10,00	81,30
	Angka Harapan Usia Sekolah	12,22 (2015)	12,75	12,33 (2016)	96,71	15,00	82,20

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Berikut data terakhir yang tersedia :

Tabel 3.55. Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah Per Tahun

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kalimantan Tengah	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
Kotawaringin Barat	68.43	68.53	68.63	69.51	70.14	70.60	71.13
Kotawaringin Timur	65.24	65.60	66.61	67.95	68.45	68.61	69.42
Kapuas	63.32	64.01	64.38	64.82	65.29	66.07	66.98
Barito Selatan	64.51	65.10	65.76	66.20	66.61	68.27	69
Barito Utara	63.87	64.36	64.72	65.12	66.30	67.38	68.28



Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sukamara	62.41	62.86	63.52	63.92	64.44	65.80	66.40
Lamandau	65.32	65.99	66.49	67.23	67.53	68.30	68.54
Seruyan	61.60	62.16	62.39	62.81	63.49	64.77	65.40
Katingan	63.25	64.54	64.87	65.29	65.79	66.81	67.41
Pulang Pisau	63.76	64.06	64.28	64.76	65	65.76	66.49
Gunung Mas	66.33	66.85	67.30	67.75	68.13	69.24	69.73
Barito Timur	66.76	67.31	67.97	68.82	69.12	69.71	70.33
Murung Raya	63.18	64.39	64.85	65.62	66.10	66.46	66.96
Palangka Raya	76.53	76.98	77.40	78.02	78.50	78.62	79.21

Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk kategori sedang, yakni mencapai angka 65,96 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 IPM mencapai angka 69,13. Data untuk tahun 2017 masih belum tersedia. Peningkatan IPM yang konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen penyusunnya baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomiannya.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta pertumbuhan ekonomi.

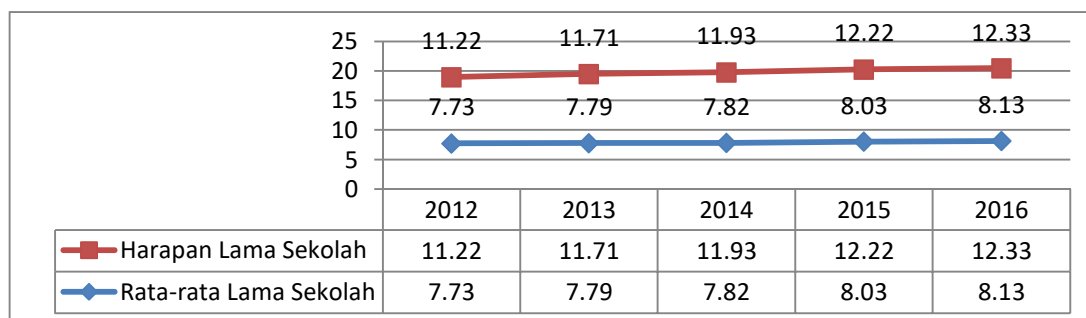


INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	8,03	8,50	8,13 (2016)	95,65
Angka Harapan Usia Sekolah	Persen	12,22	12,75	12,33 (2016)	96,71

Tabel 3.56. Capaian Indikator Pemerintah XIII

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Tengah telah meningkat sebesar 1,24 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,51 tahun.

Selama periode 2010 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,79 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Tengah telah mencapai 12,33 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Tengah tumbuh 1,09 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2016. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kalimantan Tengah yang lebih baik. Hingga tahun 2016, secara rata-rata penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II).



Gambar 3.33. Perbandingan HLS dan RLS Per Tahun





Gambar 3.34. Gubernur Kalimantan Tengah saat kunjungi sekolah yang terbakar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 3.57. Perbandingan APM dan APK Kalimantan Tengah 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017		
Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	97,71	109,84
SMP/MTs	88,90	90,19
SMA/SMK/MA	85,00	88,03

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kalteng 2017

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Bila melihat data yang tersedia, maka masyarakat Kalimantan Tengah paling banyak mengenyam pendidikan SD/Paket A dibandingkan jenjang pendidikan yang lain.





Gambar 3.35. Gubernur Kalimantan Tengah Saat Mengunjungi Sekolah Yang Terbakar

Terdapat beberapa komponen yang sangat penting untuk mendukung peningkatan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan salah satunya yang pokok tersebut adalah penyelenggaraan manajemen pendidikan yang dalam lingkup mikro disebut juga manajemen sekolah. Tanpa adanya manajemen pendidikan atau administrasi sekolah yang baik maka kemungkinan sekali segala upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan akan gagal sama sekali. Bidang ataupun aspek apapun yang akan dibenahi akhirnya kembali kepada adanya prasyarat utama yaitu terselenggaranya manajemen pendidikan yang handal.

No.	Jenjang Pendidikan	Presentase (%) Kelulusan									
		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017	
		Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
1.	SMP	99,33	91,67	99,22	00,78	100	0	100	0	100	0
2.	MTsN	98,93	01,07	98,04	01,96	100	0	100	0	100	0
3.	SMA	99,83	00,17	99,84	00,16	100	0	100	0	100	0
4.	SMK	99,98	0,10	99,30	0,70	100	0	100	0	100	0
5.	MA	99,24	00,76	99,12	0,88	100	0	100	0	100	0

Tabel 3.58. Perkembangan Hasil Ujian Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun

Untuk mengetahui kualitas dan mutu pendidikan, parameter yang paling dekat adalah hasil Ujian Nasional dan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (ASBN). Hasil Ujian Nasional jenjang pendidikan SMP, MTs, SMA, MA dan SMK untuk 4 (empat) tahun terakhir ini cukup mengembirakan. Hal ini tergambar dari persentase kelulusan pada Ujian Nasional (UN) adalah 100 persen.



Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2016 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten yang berstatus “tinggi” bertambah dari 2 kabupaten/kota pada tahun 2015 menjadi 3 kabupaten/kota pada tahun 2016. Kabupaten yang berubah status adalah Kabupaten Barito Timur sehingga tiga kabupaten/kota yang berstatus “tinggi” pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya.



Gambar 3.36. Peningkatan IPM di Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Peningkatan IPM di level provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2015 hingga 2016, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kapuas (1,38%), Kabupaten Barito Utara (1,34%), dan Kabupaten Kotawaringin Timur (1,18%). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Kabupaten Barito Utara lebih dikarenakan perbaikan dimensi kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya (0,75%), Kabupaten Gunung Mas (0,71%), dan Kabupaten Lamandau (0,35 %) tercatat paling lambat di Kalimantan Tengah selama tahun 2015-2016.



SASARAN XIV

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TAHUN	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	$\frac{6}{4/3 \times 100}$	7	$\frac{8}{4/6 \times 100}$
14.	Angka Harapan Hidup	69,54 (2015)	70,50	69,57 (2016)	98,68	72,75	95,63

Tabel 3.59. Capaian Indikator Pembangunan XIV

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2015. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

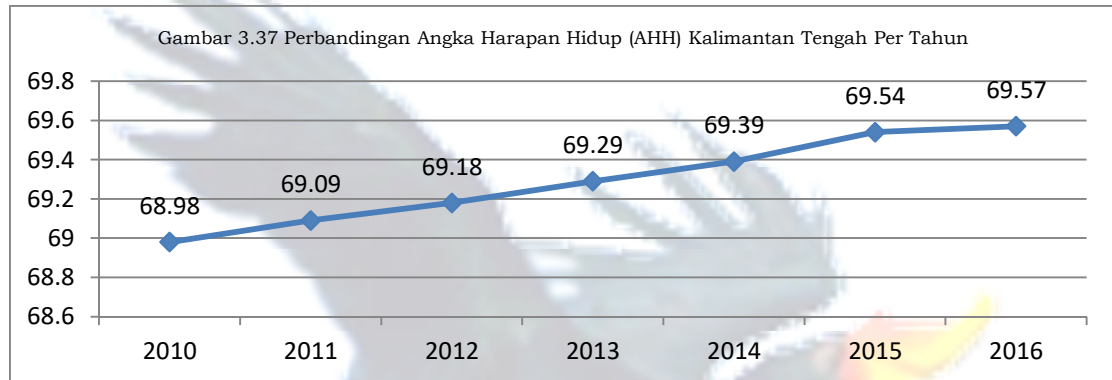
Tabel 3.60. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Per Tahun

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Angka Harapan Hidup (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kalimantan Tengah	68.98	69.09	69.18	69.29	69.39	69.54	69.57
Kotawaringin Barat	69.41	69.51	69.60	69.68	69.77	70.07	70.21
Kotawaringin Timur	69.05	69.15	69.24	69.32	69.41	69.51	69.60
Kapuas	67.94	68.04	68.13	68.21	68.30	68.40	68.49
Barito Selatan	65.74	65.83	65.92	65.99	66.08	66.48	66.63
Barito Utara	70.54	70.64	70.73	70.81	70.91	71.01	71.26
Sukamara	70.82	70.92	71.02	71.10	71.19	71.24	71.32
Lamandau	68.71	68.81	68.90	68.98	69.07	69.12	69.20
Seruyan	68.23	68.32	68.41	68.49	68.58	68.88	69.22
Katingan	64.64	64.73	64.82	64.89	64.98	65.28	65.40
Pulang Pisau	67.09	67.19	67.27	67.35	67.44	67.64	67.75
Gunung Mas	69.23	69.33	69.42	69.50	69.59	69.89	70.02
Barito Timur	67.06	67.16	67.24	67.32	67.41	67.71	67.84
Murung Raya	68.75	68.85	68.94	69.02	69.11	69.21	69.30
Palangka Raya	72.57	72.68	72.77	72.85	72.95	72.97	73.05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah



Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat terlihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 yang mencapai 69,57 tahun yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2016 akan memiliki peluang hidup hingga berumur 69-70 tahun dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya (69,54 tahun).



Pembangunan di bidang kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta memperpanjang rata-rata harapan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut data terakhir yang tersedia :

Tabel 3.61. Jumlah Persalinan Hidup dan Persalinan Mati Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Persalinan Hidup		Persalinan Mati	
	Ibu	Bayi	Ibu	Bayi
1. Kotawaringin Barat	6 264	5 567	11	22
2. Kotawaringin Timur	9 717	7 472	19	44
3. Kapuas	7 326	5 449	7	49
4. Barito Selatan	2 884	2 076	2	17
5. Barito Utara	2 754	2 305	6	7
6. Sukamara	1 349	970	-	5
7. Lamandau	1 619	1 334	1	8
8. Seruyan	4 252	2 945	7	27
9. Katingan	3 844	2 896	5	41
10. Pulang Pisau	2 570	2 148	2	5
11. Gunung Mas	2 776	2 687	6	16
12. Barito Timur	2 538	1 931	1	13
13. Murung Raya	2 808	1 967	6	44
14. Palangka Raya	5 590	5 090	-	4
Kalimantan Tengah	56 351	44 837	73	302

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016



Tabel 3.62. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Kabupaten/Kota	Bayi Lahir	BBLR		
		Jumlah	Dirujuk	Gizi Buruk
Kabupaten				
1. Kotawaringin Barat	5 567	92	92	15
2. Kotawaringin Timur	7 472	148	148	17
3. Kapuas	5 449	64	64	28
4. Barito Selatan	2 076	84	84	7
5. Barito Utara	2 305	47	47	23
6. Sukamara	970	83	83	2
7. Lamandau	1 334	6	6	10
8. Seruyan	2 945	35	35	19
9. Katingan	2 896	68	68	20
10. Pulang Pisau	2 148	11	11	14
11. Gunung Mas	2 687	19	19	21
12. Barito Timur	1 931	89	89	23
13. Murung Raya	1 967	2	2	25
Kota				
14. Palangka Raya	5 090	2	2	17
Jumlah	44 837	750	750	241

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

Tabel 3.63. Data Jumlah Rumah Sakit Umum Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kalimantan Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
1. Kotawaringin Barat	8	-	16	172
2. Kotawaringin Timur	1	-	20	305
3. Kapuas	1	-	26	324
4. Barito Selatan	1	-	12	161
5. Barito Utara	1	-	16	170
6. Sukamara	1	-	5	49
7. Lamandau	1	-	11	94
8. Seruyan	2	-	12	157
9. Katingan	1	-	16	200
10. Pulang Pisau	2	-	11	168
11. Gunung Mas	1	-	15	145
12. Barito Timur	1	-	11	164
13. Murung Raya	1	-	14	164
14. Palangka Raya	5	1	10	143
Kalimantan Tengah	27	1	195	2416

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016



Tabel 3.64. Data Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Kabupaten/Kota	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis					Jumlah
			Kandungan	Bedah	Anak	Dalam	Lain-lain	
Kabupaten								
1. Kotawaringin Barat	38	9	4	2	3	5	16	77
2. Kotawaringin Timur	50	14	7	3	3	2	14	87
3. Kapuas	57	11	3	2	3	2	7	82
4. Barito Selatan	20	7	1	-	1	2	3	34
5. Barito Utara	26	8	2	2	3	2	7	53
6. Sukamara	12	4	1	-	2	1	1	23
7. Lamandau	22	3	-	1	-	-	-	26
8. Seruyan	14	9	2	1	2	2	3	48
9. Katingan	30	5	1	1	3	1	5	44
10. Pulang Pisau	19	4	1	1	1	2	2	40
11. Gunung Mas	25	5	1	1	3	1	1	36
12. Barito Timur	14	5	1	2	3	1	3	28
13. Murung Raya	19	6	2	2	3	1	5	37
Kota								
14. Palangka Raya	110	23	7	5	5	7	32	188
Jumlah	468	112	27	25	24	27	99	788
2015	466	101	24	17	20	24	89	742
2014	465	113	24	21	18	20	71	813
2013	562	147	20	18	17	19	64	878
2012	533	113	10	16	1	19	43	753

Tabel 3.65. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Kabupaten/Kota	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
Kabupaten					
1. Kotawaringin Barat	77	312	225	32	160
2. Kotawaringin Timur	87	436	196	38	139
3. Kapuas	62	388	334	22	157
4. Barito Selatan	34	306	160	25	105
5. Barito Utara	50	278	161	23	111
6. Sukamara	21	125	83	14	58
7. Lamandau	28	188	128	15	75
8. Seruyan	48	832	356	21	69
9. Katingan	44	240	390	30	91
10. Pulang Pisau	30	190	161	20	73
11. Gunung Mas	35	215	150	11	55
12. Barito Timur	38	178	243	21	98
13. Murung Raya	37	245	258	18	93
Kota					
14. Palangka Raya	177	793	277	101	304
Jumlah	763	4.206	2.925	330	1.506



Isu Permasalahan :

1. Masih banyaknya ibu hamil yang melahirkan di rumah dan ditolong oleh tenaga dukun beranak;
2. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman;
3. Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melahirkan pada sarana kesehatan atau ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam mengurangi resiko melahirkan;
4. Motivasi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi belum optimal;
5. Kurang berminatnya tenaga dokter dan dokter spesialis untuk ditempatkan di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di kabupaten;
6. Kurangnya kemampuan daerah untuk mendatangkan tenaga dokter spesialis dasar maupun spesialis penunjang untuk di tempatkan di rumah sakit daerah atau rumah sakit kabupaten;
7. Adanya tenaga dokter yang pindah tugas ataupun yang sudah purna tugas;

Rekomendasi Solusi :

1. Kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
2. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK, Pengajian ibu-ibu, kelompok pendukung ibu (KP-Ibu);
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan RS swasta maupun bidan praktek swasta terutama dalam hal pelaporan/sosialisasi;
4. Penguatan jejaring lintas sektor baik PD, Organisasi Profesi maupun Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter;



5. Advokasi dan koordinasi ke Kementerian Kesehatan maupun Pemda Provinsi terkait kebutuhan dan pengadaan tenaga dokter/dokter gigi maupun dokter spesialis;
6. Mengangkat tenaga dokter, dokter gigi PTT daerah;
7. Memberikan insentif maupun tunjangan khusus kepada tenaga dokter, dokter gigi dan dokter spesialis agar bersedia ditempatkan pada puskesmas maupun di RSUD Daerah;
8. Melakukan Kontrak Kerja Dokter Spesialis Dasar maupun Tenaga Spesialis Penunjang dengan melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Besar dan Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Jawa.

Faktor Pendukung :

1. Adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Adanya aturan penerimaan dan penempatan tenaga kesehatan telah ditentukan berdasarkan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota telah membuat aturan yang menegaskan pada saat penerimaan tenaga kesehatan harus mengabdikan beberapa tahun dulu sebelum mengajukan permintaan pindah tugas;
4. Adanya pengangkatan tenaga honor dan tenaga kontrak serta tenaga TKS yang ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki tenaga kesehatan;
5. Peningkatan pembangunan sarana kesehatan tingkat pertama yang terus menerus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



SASARAN XV

Terpasarkannya Destinasi Wisata

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	$\frac{6}{4/3 \times 100}$	7	$\frac{8}{4/6 \times 100}$
15.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	373.000	433.000	866.915	200,21	673.000	128,81

Tabel 3.66. Indikator Capaian Pembangunan XV

Jumlah Kunjungan Wisatawan Meningkat pada Tahun 2017

Kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menjadi salah satu tolok ukur yang dapat menilai sejauhmana keberhasilan kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama ini.



Gambar 3.37. Gubernur dan Wakil Gubernur saat HUT Kalteng ke 60

Indikator ini dilakukan dengan tujuan selain mempromosikan kebudayaan dan pariwisata juga memberikan efek yang simultan terhadap pembangunan sektor lainnya, khususnya efek terhadap pertumbuhan ekonomi Kalteng atau kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lagi,

kontribusi wisatawan yang berkunjung terhadap pendapatan daerah juga menjadi perhatian dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada seperti pemanfaatan kawasan cagar budaya, cagar alam, pantai, sungai dan seterusnya untuk dijadikan kawasan wisata atau objek wisata yang layak kunjung yang kemudian menetapkan retribusi kepada pengunjung dan pajak pada para pengusaha usaha pariwisata, serta usaha-usaha yang ada di sekitar lokasi wisata



tentunya akan menjadi potensi pemasukan yang menjanjikan bagi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan budaya dan wisata yang tercantum dalam dokumen program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain Gelar Seni



Gambar 3.38. Foto bersama Gubernur saat Festival Budaya

wisata Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional terbukti mampu mendongkrak capaian kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kalimantan Tengah.

Budaya, Festival Borneo, Gelar Pesona Budaya TMII, Ritual Adat Kalteng, Gebyar Museum dan Festival Budaya Isen Mulang menjadi beberapa daya tarik wisatawan untuk juga berkunjung dan mengalami langsung pesona budaya dan

Kegiatan dengan publikasi nasional tersebut menjadi mampu menjadi agenda yang menarik minat orang untuk berkunjung menyaksikan dan terlibat didalamnya. Apabila dicermati lebih jauh, beberapa hal berikut menjadi faktor yang memiliki kontribusi sehingga target kunjungan tersebut mampu mencapai target, yaitu:

- a. Kalimantan Tengah memiliki beragam hasil budaya yang memiliki kekhasan pada masing-masing daerah. Tari, musik, makanan dan olahraga menjadi beberapa ragam budaya yang dimiliki Kalteng. Tentunya ini menjadi daya tarik yang seharusnya mampu menarik wisatawan untuk datang menyaksikannya atau berkunjung ke masing-masing daerah tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengapresiasi seni budaya juga mulai meningkat. Sehingga minat untuk datang menyaksikan rona budaya Kalteng,

mengalami dan mencintainya pun menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.

- b. Kegiatan pertunjukan seni budaya secara volume cukup sering kita jumpai terutama pada kegiatan-kegiatan non formal. Lain halnya pada kegiatan formal dalam lingkup pemerintahan yang sudah menjadi agenda/standar pelaksanaan dalam sebuah kegiatan, acara potong pita menyambut tamu contohnya.

Tingkat Hunian Hotel



Gambar 3.39 Keadaan Hotel di Kalimantan Tengah

Frekuensi kegiatan festival budaya di Kalimantan Tengah yang secara periodik dan terencana tentunya memberi pengaruh cukup signifikan bagi tingkat hunian hotel di Kalimantan Tengah.

Pertumbuhan jasa akomodasi yang juga meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 341 menjadi 382 di tahun 2017 menunjukkan bahwa ada peningkatan kunjungan ke Kalimantan Tengah dengan berbagai tujuan kunjungan yang tentunya memberi implikasi juga kepada sektor usaha yang lain.

Secara umum, hotel non bintang/jasa akomodasi relatif lebih mampu menyedot jumlah tamu menginap. Kondisi ini dipengaruhi oleh keunggulan jumlah, sebaran lokasi, dan masih terbatasnya ketersediaan hotel bintang di Kalimantan Tengah. Selama Januari-Desember 2017, jumlah tamu menginap di hotel bintang hanya 34,00 persen dari keseluruhan jumlah tamu bintang dan non bintang. Namun TPK hotel bintang mencapai 56,75 persen, jauh lebih tinggi

dari hotel non bintang/jasa akomodasi yang hanya sebesar 31,55 persen. Disisi lain, daya tarik tamu menginap di hotel bintang relatif lebih lama yakni 1,55 hari dibandingkan hotel non bintang/jasa akomodasi yang hanya selama 1,42 hari.



	Nov 2017	Des 2017	Jan-Des 2018	Jan-Des 2017
Domestik	23.645	25.111	192.944	255.822
Asing	350	255	4.360	4.308
Jumlah	23.995	25.366	196.804	260.420

Gambar 3.40. Jumlah Tamu Menginap di Hotel Bintang Desember 2016-Desember 2017



	Nov 2017	Des 2017	Jan-Des 2018	Jan-Des 2017
Domestik	69.688	72.538	712.627	764.634
Asing	36	21	1.848	1.408
Jumlah	69.724	72.559	714.475	766.042

Gambar 3.41. Jumlah Tamu Menginap di Hotel Non Bintang Desember 2016-Desember 2017



Isu Permasalahan :

1. Belum optimalnya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, heritage dan buatan manusia);
2. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kalimantan Tengah;
3. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah terutama untuk mendatangkan wisatawan mancanegara;
4. Integrasi dan koordinasi promosi wisata se Kalimantan Tengah yang belum juga optimal;

Rekomendasi Solusi :

1. Mengadakan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi keahlian dalam hal pemanfaatan sektor kebudayaan dan pariwisata.
2. Mengadakan agenda pertemuan sebagai media antara *stakeholders* dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat peluang-peluang pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata;
3. Melibatkan pelaku budaya dan wisata lokal dalam aktivitas-aktivitas penunjang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagai motor penggerak yang memacu elemen masyarakat lainnya untuk juga mencintai dan berperan aktif dalam pengembangan sektor tersebut di Provinsi Kalimantan Tengah.



SASARAN XVI

Menurunnya Degradasi Lingkungan

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4/6*100)
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	70,37		70,37 (2014)	100	73,5	95,74


Tabel 3.67. Capaian Indikator Pembangunan XVI

Pemerintah Pusat telah menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan, baik di pusat maupun daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan Presiden (Perpres) No. 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2015 mensyaratkan bahwa IKLH harus meningkat ke angka 64,50. Sementara Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 tentang perbaikan kualitas lingkungan hidup menetapkan target kualitas lingkungan hidup berada pada posisi 66,5-68,5 pada tahun 2019. Untuk mencapai target ini, tentu diperlukan aksi nyata dari semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan data terakhir Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2016 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah adalah 74,71% meningkat dari tahun 2014 yaitu 70,37%.



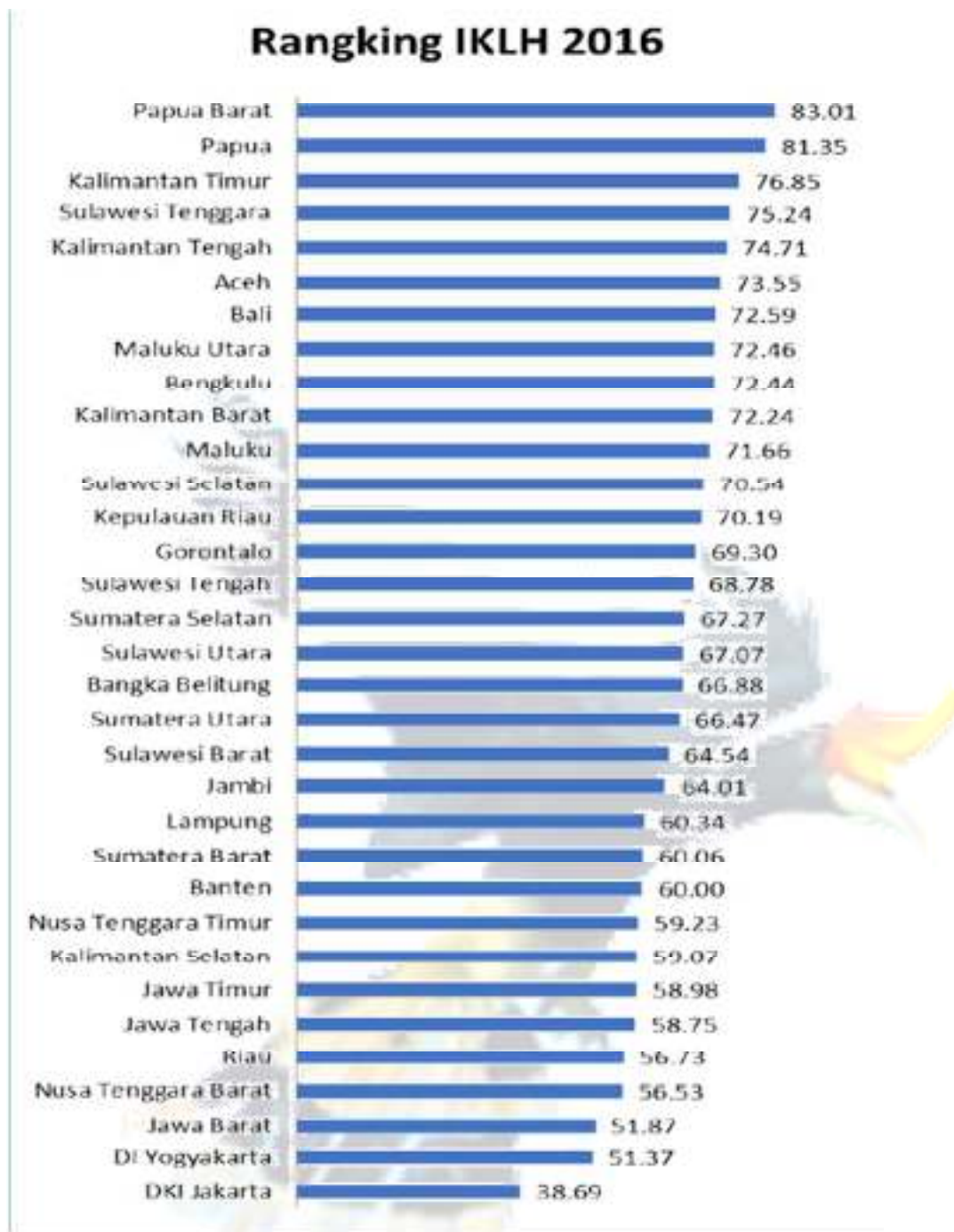
Lingkungan di Provinsi Kalimantan tengah bisa dikatakan masih sehat dan kurang pencemarannya. dengan rincian sebagai berikut :

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,71
	Indeks Kualitas Air	82,22
	Indeks Kualitas Udara	83,80
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,25

Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Tengah	
Letak	: 1° LU - 4° LS dan 110° - 116° BT
Luas Wilayah	: 153.564,50 Km ²
Persentase Terhadap Luas Wilayah Indonesia	: 7,94
Jumlah Kota	: 1 Kota
Jumlah Kabupaten	: 13 Kabupaten
Jumlah Pulau	: 32 Pulau
Potensi yang Mempengaruhi Kualitas Lingkungan Hidup	: Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan, Permukiman, Pertambangan, Pertanian, Peternakan, Industri Pariwisata, Jumlah Kendaraan, Limbah Padat Sarana Transportasi, Beban Limbah Cair dan Limbah B3 dari Sarana Penginapan serta Rumah Sakit, Keterbatasan Fasilitas Buang Air Besar, Timbunan Sampah.
Jumlah Penduduk	: 2.495.053 Jiwa
Kepadatan Penduduk	: 16, 25 Jiwa/Km ²

Tabel 3.68. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Tahun 2016

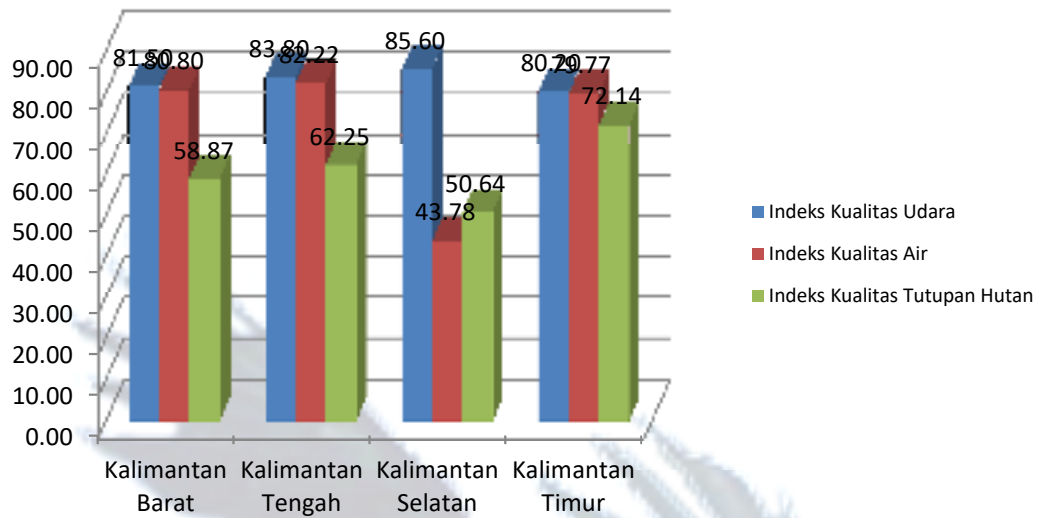




Gambar 3.42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Tahun 2016

Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Provinsi Kalimantan Tengah menduduki posisi 5 (lima) di tingkat nasional dan peringkat ke 2 (dua) dibawah Provinsi Kalimantan Timur di tingkat indeks Pulau Kalimantan.

Gambar 3.43. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan 2016



No.	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1.	Kalimantan Barat	81,50	80,80	58,87	72,24
2.	Kalimantan Tengah	83,80	82,22	62,25	74,71
3.	Kalimantan Selatan	85,60	43,78	50,64	59,07
4.	Kalimantan Timur	80,20	79,77	72,14	76,85

Tabel 3.69. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan Tahun 2016

Secara keseluruhan dari ketiga komponen IKLH, yaitu IKU, IKA dan IKTL, nampak bahwa tidak semua komponen memiliki tren yang sama pada setiap provinsi. Terdapat 9 provinsi yang ketiga komponen memiliki tren penurunan, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku Utara.

Sementara itu, 23 provinsi lainnya memiliki kecenderungan kenaikan pada 1-2 komponen dan menurun pada 1-2 komponen lainnya. Dengan kondisi kecenderungan yang bercampur ini, terdapat 11 provinsi mengalami kenaikan nilai IKLH, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua.

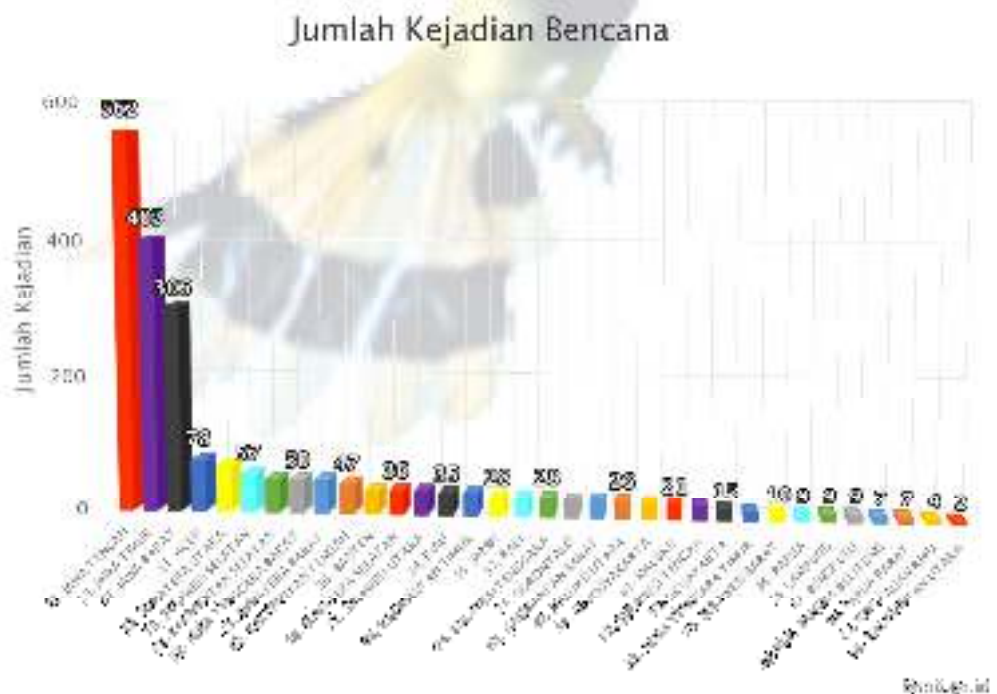


Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	98.4	SEDANG	PRN
KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	178	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN BARAT	Bengkayang	178	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN BARAT	Sambas	180.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN BARAT	Sintang	186.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN BARAT	Kapuas Hulu	163.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN BARAT	Kelapang	192.4	TINGGI	H Kelapang
KALIMANTAN BARAT	Landsak	131.6	SEDANG	H Landsak
KALIMANTAN SELATAN	Kotabaru	205.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN SELATAN	Berba Kuala	190	TINGGI	KSN Banjarbakula
KALIMANTAN SELATAN	Tanah Liris	178	TINGGI	KSN Banjarbakula
KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	148.4	TINGGI	PAN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN TENGAH	Kapuas	179.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	134.8	SEDANG	PAN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	189.2	TINGGI	PAN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN TIMUR	Kota Kutaiungga	160.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	132.4	SEDANG	PAN
KALIMANTAN UTARA	Nunukan	175.2	TINGGI	PASN Pertabakan

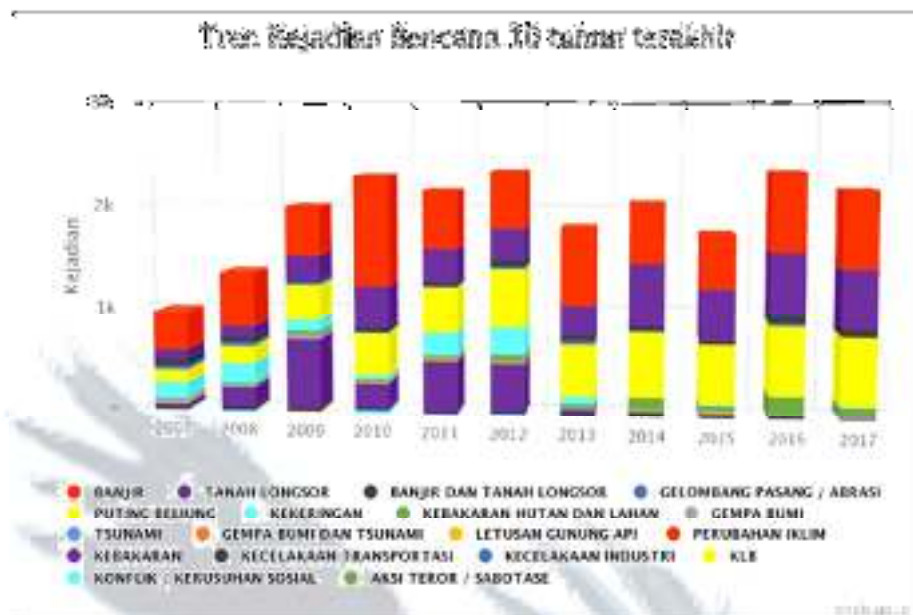
Tabel 3.71. Indeks Risiko Bencana Alam di Pulau Kalimantan

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia, intensitas kejadian bencana cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat sekitar 2163 kejadian bencana di Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri risiko bencana paling dominan adalah banjir, karlahut, tanah longsor, dan banjir bandang dengan 47 kejadian.



Gambar 3.45. Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia





Gambar 3.46. Tren Kejadian Bencana di Indonesia Per Tahun

Isu Permasalahan :

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- a. Paradigma dalam penanggulangan bencana banyak berorientasi pada tanggap darurat dan permasalahan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif masih minim.

2. Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- a. Penerapan regulasi utamanya terhadap Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya masih belum optimal sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat yang terkena bencana belum optimal;
- b. Penyusunan perencanaan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum berjalan secara optimal, bahkan sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota belum



menyusunnya, perencanaan tersebut meliputi rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi bencana dan rencana rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

- a. Koordinasi penanggulangan bencana belum berlangsung secara optimal. Dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, masih ada yang belum membentuk BPBD yakni 2 Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Barito Timur.
- b. Standard Operational Procedure (SOP) dalam penanggulangan bencana belum disusun dan disosialisasikan.
- c. Banyaknya pihak yang peduli dan terlibat dalam penanggulangan bencana belum tertata dan mempunyai struktur komando yang jelas.
- d. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana cukup tinggi namun belum dapat dioptimalkan.

4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

- a. Kurangnya tenaga teknis dan administrasi penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar kompetensi penanggulangan bencana;
- b. Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum ideal untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan cakupan dan tingkat ancaman bencana;
- c. Belum semua BPBD Kabupaten/Kota mempunyai gedung/kantor sebagai operasional;
- d. Logistik dan material kebencanaan belum tersedia secara ideal sesuai dengan tingkat bahaya dan kerentanan masyarakat.



5. Anggaran

Anggaran penanggulangan bencana masih minim, dianggap penting namun tidak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Faktor minimnya anggaran di Kabupaten/kota menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menjadi isu penting dalam pembangunan. Paradigma relief/responsive saat tanggap darurat masih lebih dominan dibandingkan dengan paradigma pengurangan risiko bencana yang mendasarkan pengelolaan program dan kegiatan pada saat tidak terjadi bencana, sehingga dukungan/alokasi dana masih relative minim dan cenderung menyediakan dana sebagai dana bantuan saat tanggap darurat.

Pengurangan anggaran ini berpengaruh terhadap Rencana Kerja yang disusun pada awal tahun sehingga ada beberapa kegiatan yang harus ditunda/tidak dianggarkan serta mempengaruhi target yang dicapai.

Solusi :

Strategi yang dilaksanakan untuk menyikapi dan menghadapi permasalahan yang ditemukan adalah :

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangnya tidak hanya kepada aparatur pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pada fase sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.



2. Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- a. Melakukan akselerasi dan advokasi penerapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 Tahun 2009.
- b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang meliputi rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

- a. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membentuk BPBD dengan peraturan daerah, untuk segera membentuk BPBD dengan peraturan daerah serta mengisi struktur dan lembaganya dengan personil yang berkompeten.
- b. Perlu segera disusun dan ditetapkan Standard Operational Procedure (SOP) penanggulangan bencana per jenis bencana oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelatihan Standard Sistem Manajemen Keadaan Darurat(SSMKD) dapat dijadikan rujukan dan pedoman bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kedaruratan.

4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

- a. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kalimantan Tengah sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana;
- b. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan darurat bagi relawan, pelajar maupun masyarakat umum perlu



- ditingkatkan dan dilaksanakan secara periodic untuk tiap jenis bencana;
- c. Rotasi jabatan dan staf dapat dilakukan jika sumber daya yang terlatih diganti dengan sumber daya yang terlatih dan mempunyai kompetensi yang sama. Kebijakan rotasi/pemindahan pegawai perlu memperhatikan kompetensi dan kebutuhan lembaga. Kapasitas dan fasilitas SDM di masing-masing lembaga harus lebih dari satu orang /mempunyai back-up sehingga sewaktu-waktu terjadi rotasi, kapasitas SDM dalam melanjutkan tugas pokok dan fungsi dapat lancar dan tidak menemui permasalahan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode untuk refreshing dan update pengetahuan sekaligus untuk menambah jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia yang kompeten bagi pengembangan sarana dan prasarana BPBD Kabupaten/Kota;
 - e. Meningkatkan peran Sekretariat BPBD Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan BNPB selaku instansi Pembina pusat untuk ikut membantu penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota. Penguatan tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana di BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Memberikan rekomendasi permohonan bantuan gedung sebagai salah satu sarana melalui dana tugas pembantuan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 - h. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan instansi terkait untuk memback-up persediaan logistic maupun perlengkapan kebencanaan yang lain.



5. Anggaran

- a. Memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain.
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional perlu dibina dan digalakkan terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.



SASARAN XVII

Meningkatnya Pendapatan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2		3	4	$\frac{5}{4/3 \times 100}$	6	$\frac{7}{4/6 \times 100}$
17. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	32,64	30-32	32,74	102,31	45-50	72,76
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Transfer (%)	66,44	42,33	51,83	122,44	55-60	94,24
	Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD (%)	46,03	33,3	41,23	123,81	55-60	74,96

Tabel 3.72. Capaian Indikator Pembangunan XVI

Tabel 3.73 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Rincian	Rencana Anggaran Tahun 2017	Anggaran Tahun 2017	Persentase	Perubahan Anggaran Tahun 2017	Persentase
1.	APBD Kalimantan Tengah	4.088.792.553.726	4.086.898.379.226	99,95	4.155.145.316.749,93	101,62
2.	Pendapatan Asli Daerah	1.327.494.134.000	1.327.494.134.000	100	1.327.494.134.000	100
3.	Pendapatan Transfer	2.760.273.619.726	2.615.492.050.226	94,75	2.615.492.050.226	94,75
4.	Pendapatan Lainnya	1.024.800.000	143.912.195.000	14.042,95	212.159.132.523,93	20.702,49
5.	Belanja Daerah	3.986.167.377.726	3.984.273.203.226	99,95	4.155.145.316.749,93	104.24
6.	Belanja Tidak Langsung	2.422.976.341.726	2.422.412.546.747	99,98	2.492.042.824.320,93	102.85
7.	Belanja Langsung	1.563.191.036.000	1.561.860.656.479	99,91	1.663.102.492.429	106.39

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 4.155.145.316.749,93- atau 101,62 persen dari rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sebesar 4.088.792.553.726,- yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok penerimaan, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi realisasi 31,95%, Pendapatan Transfer



dengan kontribusi realisasi sebesar 62,95% serta Pendapatan Daerah Lain yang sah dengan kontribusi realisasi sebesar 5,11%.

Tuntutan kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hal yang mutlak terkait dengan kemandirian daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Masih bergantungnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dana Transfer dipengaruhi oleh masih kecilnya Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Tengah. Diharapkan kedepannya dengan meningkatnya Pendapatan Daerah diharapkan Pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya dan perhatian terhadap peningkatan kebutuhan belanja kepentingan rakyat juga semakin besar. Untuk itu memerlukan upaya penguatan peran Pendapatan Asli daerah dengan menjalin sinergi, harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota secara kontinyu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap semua Objek Pendapatan Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sumber pendapatan lainnya seperti Hak Penguasaan Hutan, PSDH, Landrent, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isu Permasalahan :

Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun akibat menurunnya harga komoditi unggulan yang menjadi sumber pendapatan daerah masyarakat seperti karet, rotan, dan kelapa sawit masih kurang.



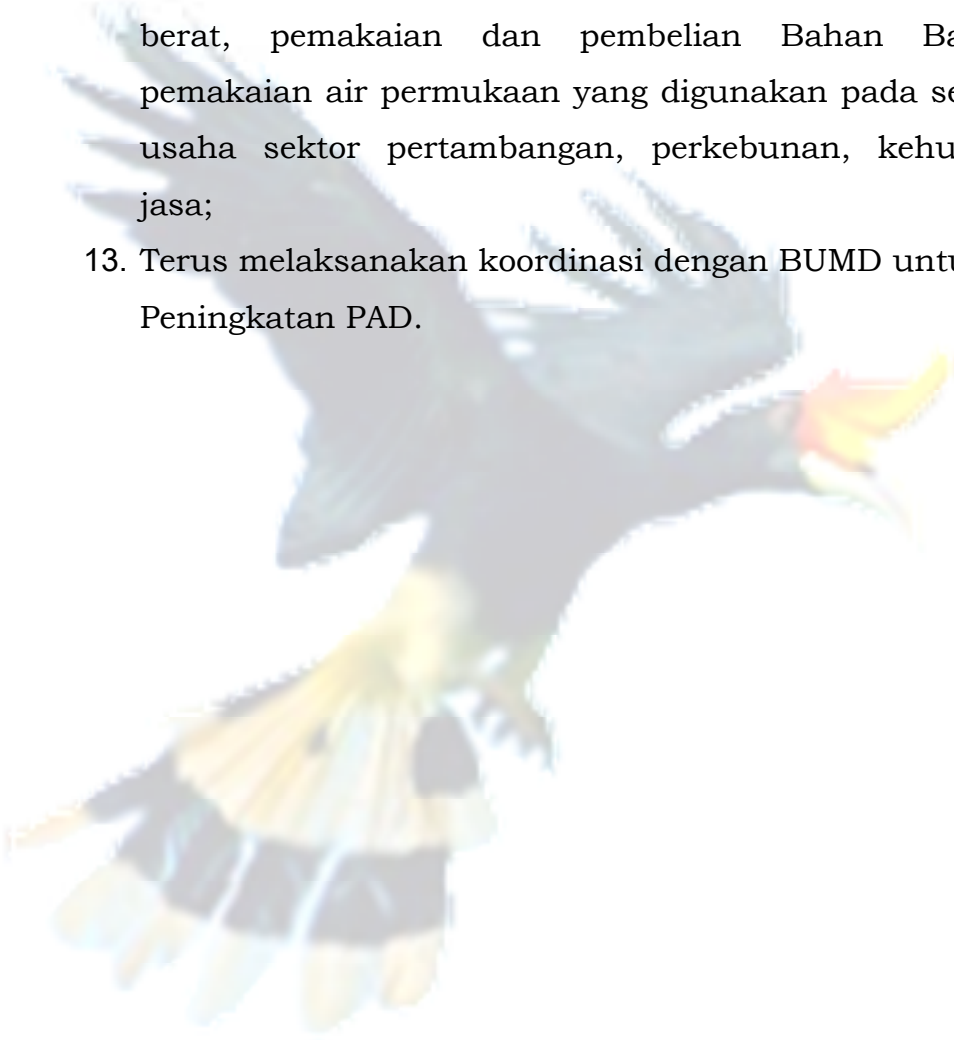
Solusi :

1. Terus melaksanakan sosialisasi PAD termasuk sosialisasi pajak daerah seperti informasi pembayaran pajak, pembayaran PKB dapat dilaksanakan di seluruh Kantor Bersama Samsat se-Kalimantan Tengah secara online dan Mobil Samsat Keliling;
2. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan Gubernur dengan Walikota/Bupati se Kalimantan Tengah dan mewujudkan penguatan pemungutan pajak daerah dengan instansi terkait pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Terus melaksanakan kegiatan operasional terpadu (razia bersama);
4. Meningkatkan pelayanan melalui mobil Samsat keliling sampai ke kelurahan;
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor langsung ke Wajib Pajak (*door to door*);
6. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
7. Terus meningkatkan tertib administrasi pungutan dan pembinaan aparat pemungutan PAD;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal, vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Pengusaha yang melakukan usaha dan atau Pekerjaan di Kalimantan Tengah;
10. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah;
11. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Pembebasan

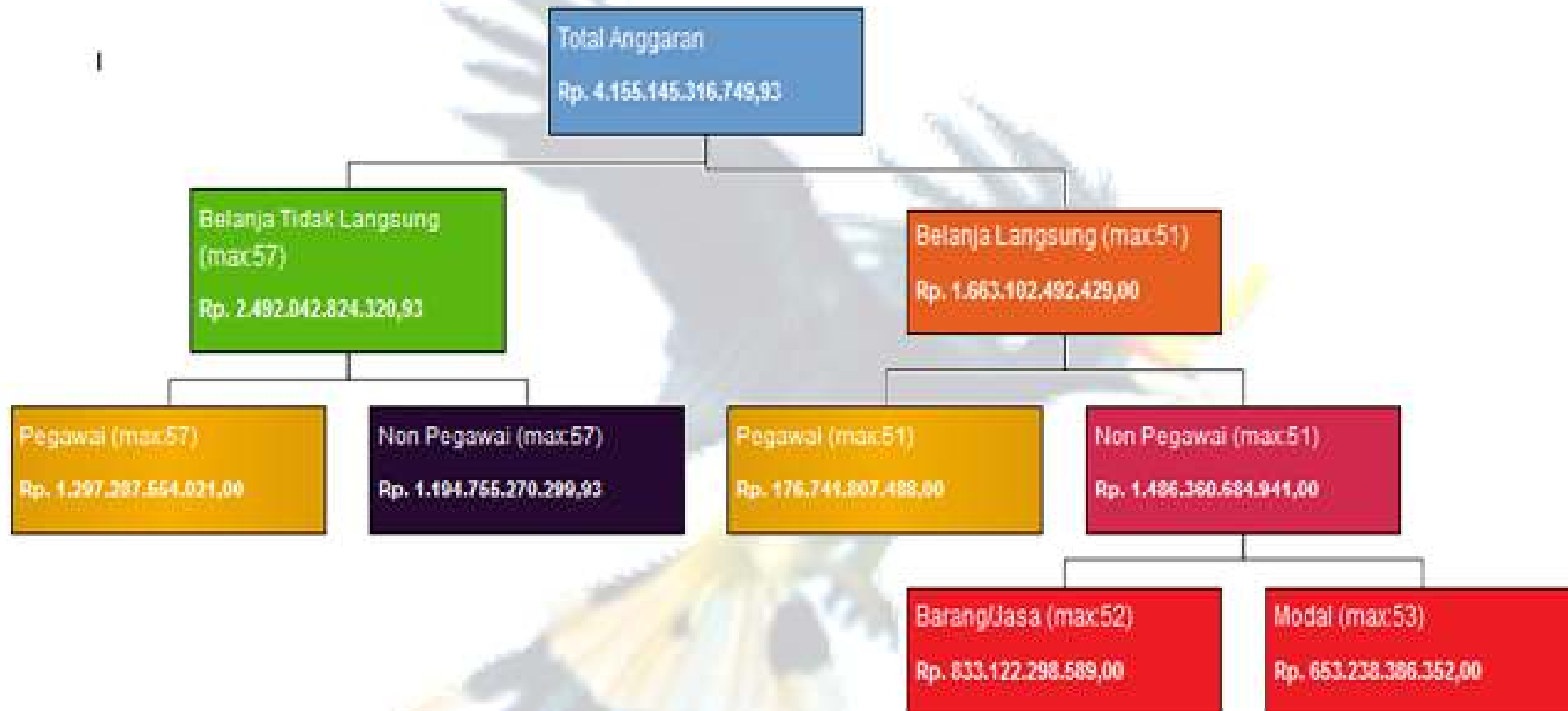


Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Bernomor Polisi Luar Daerah Kalimantan Tengah Pemilikan Kedua dan seterusnya;

12. Terus melaksanakan pendataan potensi Pajak Daerah berupa data penggunaan Kendaraan Operasional termasuk alat-alat berat, pemakaian dan pembelian Bahan Bakar serta pemakaian air permukaan yang digunakan pada setiap badan usaha sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan jasa;
13. Terus melaksanakan koordinasi dengan BUMD untuk Peningkatan PAD.



D. REALISASI ANGGARAN



Gambar 3.47. Rencana Pelaksanaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Berdasarkan Kebutuhan Tahun Anggaran 2017

Sumber : simp3d.kalteng.go.id



REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DISUSUN PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

KEADAAN: Desember 2017

NO.	JENIS AKUN	Jumlah DPA	Jumlah KESKAT	PAGU DANA	REALISASI			KET
					KEUANGAN(Rp.)	%	FISIK %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN			4.046.545.922.706,00	4.080.572.650.377,05	100,84		
BELANJA								
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	41 DPA	41 KESKAT	2.492.042.824.320,93	2.167.192.986.510,07	86,96	86,96	
3	BELANJA LANGSUNG	46 DPA	3006 KESKAT	1.663.102.492.429,00	1.520.705.274.919,02	91,44	90,49	
	Jumlah			4.155.145.316.749,93	3.687.898.261.429,09	88,75	84,37	

Tabel 3.74 Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

Sumber : simp3d.kalteng.go.id



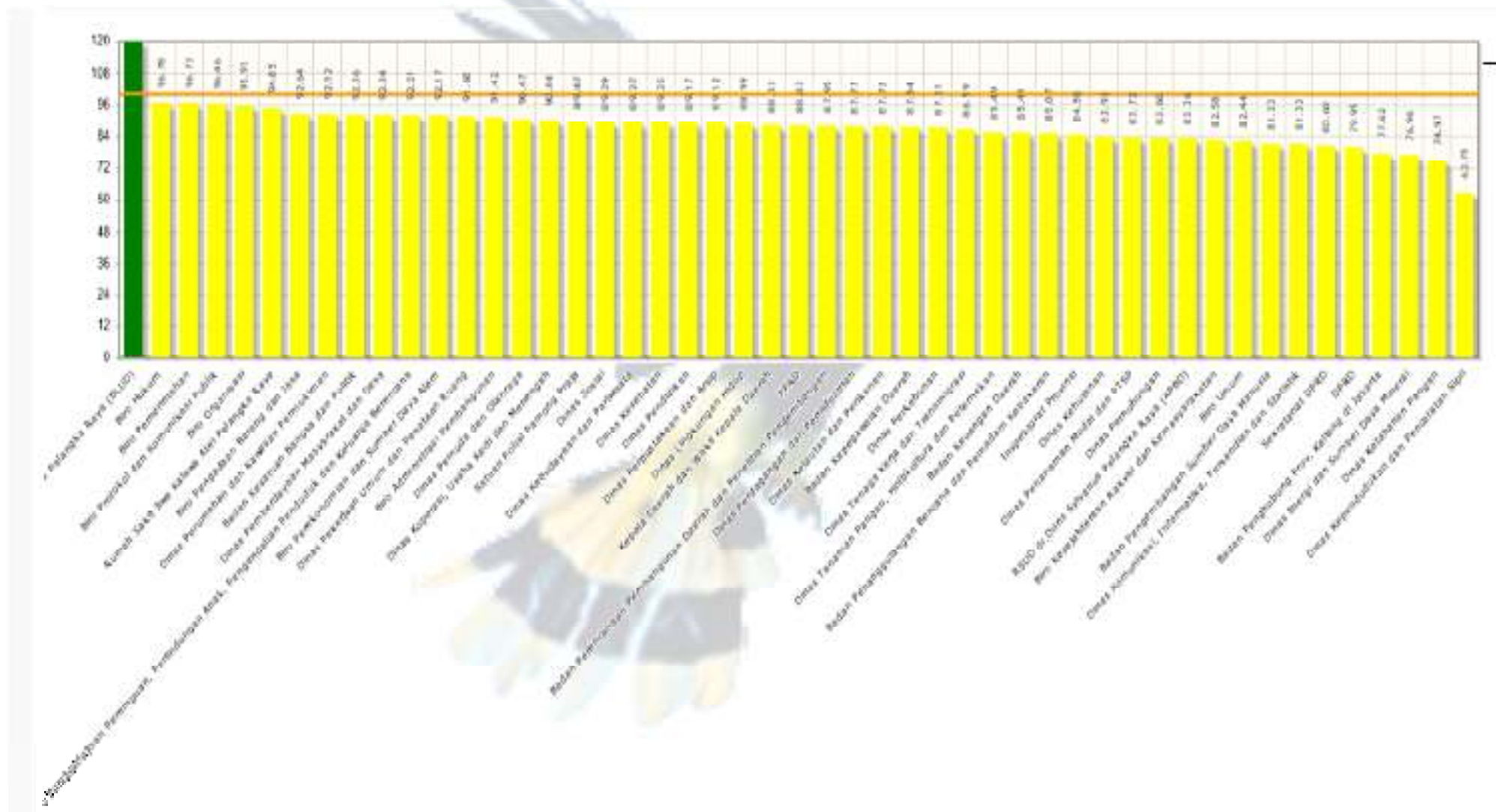
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3

Tabel 3.75 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	707.380.841.000,00	707.380.841.000,00	707.380.841.000,00	707.380.822.226,00	2.829.523.345.226,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	284.531.250.000,00	284.531.250.000,00	284.531.250.000,00	284.531.242.726,00	1.138.124.992.726,00
2.2	Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	15.591.207.000,00	15.591.207.000,00	15.591.207.000,00	15.591.203.000,00	62.364.824.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	41.247.498.000,00	41.247.498.000,00	41.247.498.000,00	41.247.506.000,00	164.990.000.000,00



Gambar 3.48 Grafik Realisasi Keuangan BL + BTL Perangkat Daerah s/d 31 Desember 2017



Sumber : simp3d.kalteng.go.id



sasi Fisik BL + BTI



MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No.	MISI	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	PEMANTAPAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	9.500.000.000			
2.	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	47.311.000.000	45.799.314.000	33.863.518.166	73,94
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	28.824.000.000			
		Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah	229.421.600.000			
3.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PESISIR DAN PANTAI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	5.245.195.000	5.718.837.500	5.193.430.950	90,81
		Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	13.644.530.000	13.759.894.300	12.683.495.710	92,18
		Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir	790.000.000	1.568.930.000	1.023.985.980	65,27
4.	PENGENDALIAN INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGENTASAN KEMISKINAN	Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah	575.000.000	704.000.000	683.133.065	97,04
5.	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2.051.657.500	3.173.030.000	2.995.776.615	94,41
6.	PENINGKATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PARIWISATA	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.913.904.000	4.615.558.000	4.212.859.441	91,28
7.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	825.000.000	953.500.000	930.725.115	97,61
8.	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.264.255.000	10.662.465.400	9.326.458.434	87,47



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 merupakan dokumen awal penjabaran pencapaian kinerja sasaran pembangunan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu adanya laporan yang akuntabel, akurat dan dapat dipercaya. Sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja yang diukur dari indikator-indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah mendapat perhatian khusus melalui perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Oleh karena itu dalam penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah perlu melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan setiap Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Koordinasi ini akan menjadi



mempertajam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan periode selanjutnya sehingga koridor pembangunan dapat diarahkan menuju perwujudan tujuan pembangunan.

Point penting lainnya dalam Laporan Kinerja adalah adanya integritas antara Sasaran Pembangunan Kalimantan Tengah dengan Indikator Kinerja Pemerintah serta rincian pencapaian sasaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung selama tahun 2017 mampu untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, dilihat dari Laju Perekonomian, menampakkan hasil yang positif (peningkatan) dari tahun ke tahun;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - > Segi Pendidikan dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun .
 - > Segi kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dilihat pada data tahun sebelumnya terjadi tren peningkatan : tahun 2015 (69,39 tahun) ke tahun 2016 (69,54 tahun).
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Menurunnya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun;
5. Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan.



SARAN

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegritasnya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan telah dilaksanakan dengan konsisten oleh stakeholder sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah akan terealisasi. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat, maka diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2017 ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

